



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEPENTINGAN CINA DALAM  
TRANSFER SENJATA KONVENSIONAL KE SUDAN:  
PERBANDINGAN STUDI KASUS KONFLIK DARFUR  
TAHUN 2004-2005 DAN 2006-2008**

**SKRIPSI**

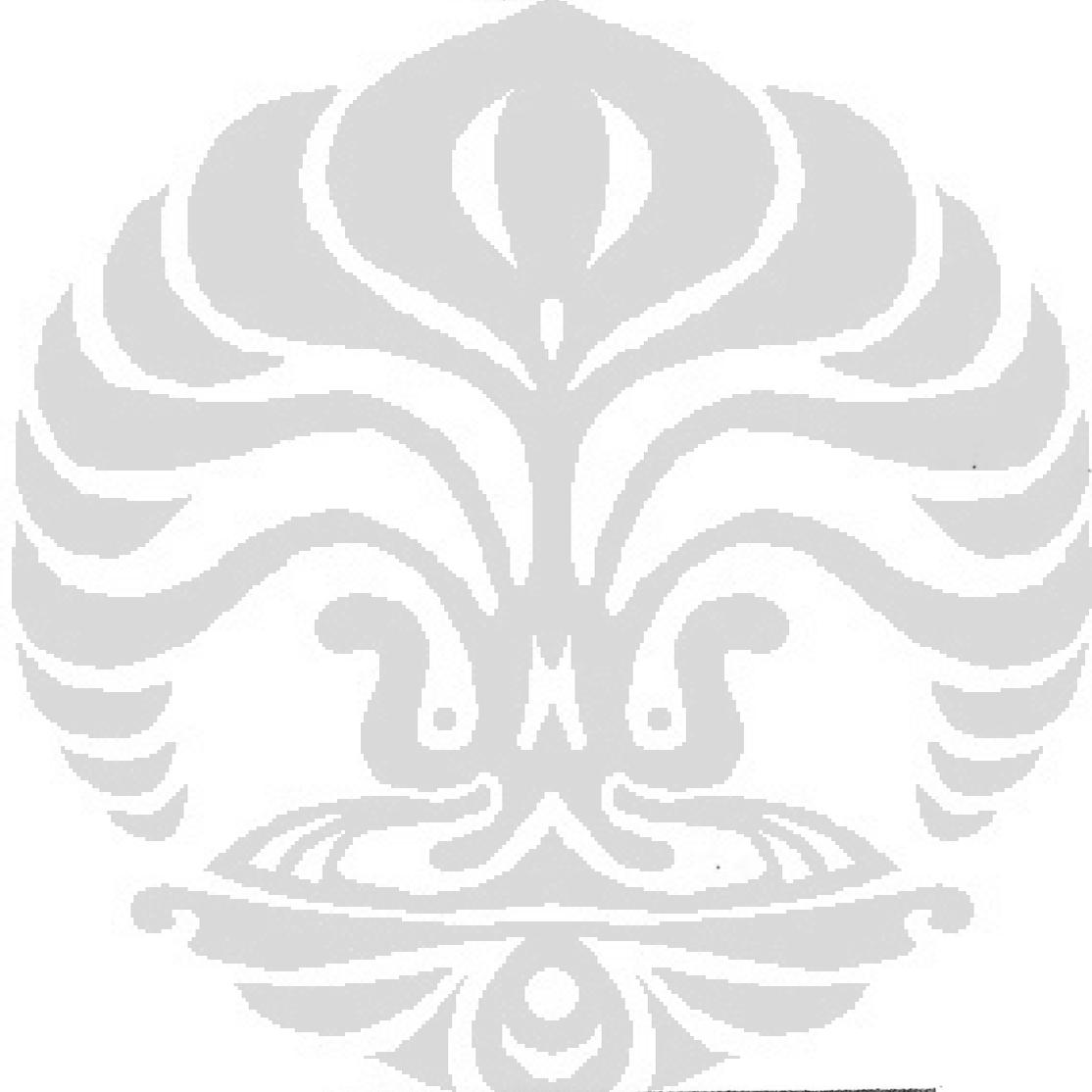
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**SYIFA FAUZIAH**

**0606097266**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
HUBUNGAN INTERNASIONAL  
DEPOK  
DESEMBER, 2010**

**Universitas Indonesia**



MBRU - PERPUSTAKAAN	
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
JURUSAN POLITIK	
CALL NUMBER	10-01-2011
SR. H1 008/2010	

FAU  
K

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Syifa Fauziah**

**NPM : 0606097266**

**Tanda Tangan**



**Tanggal : 15 Desember 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Syifa Fauziah

NPM : 0606097266

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata Konvensional ke Sudan:  
Perbandingan Studi Kasus Konflik Darfur Tahun 2004-2005 dan  
2006-2008

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Andi Widjajanto, Ph.D (.....)

Penguji Ahli : Edy Prasetyono, Ph.D (.....)

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D. (.....)

Sekretaris Sidang : Aninda R. Tirtawinata, M.Lit. (.....)

Ditetapkan di : Depok

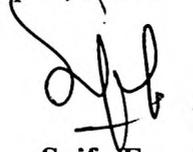
Tanggal : 18 Desember 2010

## KATA PENGANTAR

Sebagai mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang akhirnya memutuskan untuk mendalami Pengkajian Strategi, masalah persenjataan, khususnya proliferasi senjata kecil dan ringan kepada negara-negara yang tengah berkonflik dan menghadapi krisis telah menjadi perhatian tersendiri bagi penulis. Di tengah usaha negara-negara lain untuk semakin transparan dalam pengiriman senjatanya ke negara klien, Cina justru melakukan hal sebaliknya. Cina cenderung menutup diri dalam memberikan laporannya terkait transfer senjata meski penggunaan senjata-senjata Cina di daerah rawan konflik seperti Darfur telah diketahui secara meluas. Sulitnya mendapatkan data yang akurat mengenai transfer senjata Cina ke negara-negara dengan rezim represif, khususnya Sudan, telah menjadi tantangan tersendiri dalam penulisan skripsi yang memakan waktu cukup lama ini.

Kajian mengenai transfer senjata konvensional menjadi penting karena mudahnya perpindahan senjata dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga menyebabkan penggunaannya lebih banyak dan mematikan dari pada senjata non-konvensional. Pembahasan mengenai transfer senjata Cina kepada negara-negara yang tengah berkonflik juga semakin menjadi penting di tengah proyeksi Cina sebagai *responsible power*. Oleh karenanya, penulis semakin terdorong untuk melakukan penelitian mengenai kepentingan transfer senjata konvensional Cina ke Sudan dalam studi konflik Darfur yang mengalami peningkatan pada tahun 2004-2005 dan penurunan pada tahun 2006-2008. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dalam menambah khazanah Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Pengkajian Strategi, dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian lain yang sejenis.

Depok, Desember 2010



**Syifa Fauziah**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, bantuan, hikmah, serta karunia-Nya penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

(1) Andi Widjajanto, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Tanpa sumbangan ide-ide dan cara berfikir Mas Andi yang penulis begitu kagumi, maka skripsi ini akan terasa “hambar” dan kurang bermakna. Penulis amat bangga dapat dibimbing oleh seseorang yang amat terkenal dalam dunia pengkajian strategi dan dapat dikatakan sebagai salah satu “dewa” nya realis di Indonesia. Penulis mengagumi pembawaan Mas Andi yang begitu berwibawa dan karismatik ketika berbicara mengenai reformasi TNI, strategi, dan dinamika persenjataan dalam kuliah-kuliah Pengstrat ataupun ketika berbicara mengenai berbagai hal terkait dengan ilmu yang dikuasainya di stasiun-stasiun TV nasional. Kegigihan Mas Andi dalam menuntut ilmu memberikan inspirasi tersendiri bagi penulis untuk terus menggali ilmu hingga dapat berguna bagi bangsa, negara, dan orang lain.

(2) Almarhumah Nurani Chandrawati, M.Si. selaku mantan Ketua Jurusan HI UI dan dosen dalam sebagian besar kelas Pengkajian Strategi, yang telah memberikan ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk mengambil *cluster* Pengstrat. Pembawaan Mba Inung yang selalu santai dan murah senyum saat mengajar, namun tetap dapat menyampaikan isi kuliah dengan baik kepada mahasiswanya, sangat membekas bagi penulis. Menurut penulis, Mba Inung adalah salah satu dosen terbaik di UI. Sifatnya

yang begitu perhatian dan sangat dekat dengan mahasiswa hingga staff di jurusan, menjadikan lingkungan ajar-mengajar di HI UI sangat kekeluargaan dan seakan tidak ada jarak antara mahasiswa dan dosen. Sebelum kepergiannya, Mba Inung merupakan ketua sidang proposal yang penulis ajukan (sekitar Februari/Maret 2010). Ketika itu, Mba Inung menyatakan, “Kamu yakin skripsi ini akan selesai di bulan Juni? Ini cukup berat lho”. Penulis sama sekali tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu percakapan dengan beliau untuk terakhir kalinya. Oleh karenanya, Mba Inung merupakan salah satu motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

(3) Edy Prasetyono, Ph.D. selaku penguji awal yang telah memberikan masukan-masukan berbobot saat sidang proposal sehingga sangat membantu penulis untuk mengembangkan skripsi ini. Mas Edy amat terkenal dengan senyuman hangatnya dan pribadi yang karismatik saat mengajar. Meski beliau terkenal amat sibuk, namun Mas Edy tidak pernah segan untuk menyapa mahasiswanya terlebih dahulu jika berpapasan di kampus. Hal ini menjadikan dirinya tidak hanya sebagai dosen yang piawai dalam mengajar, tetapi juga dapat dijadikan tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah terkait dengan skripsi ini. Dukungan pun diberikan Mas Edy untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

(4) Dwi Ardhanariswari, M.A., M.Phil. selaku dosen MPHI yang sangat membantu logika berfikir penulis ketika mulai menyusun penelitian ini. Mba Riris, meski pembawaannya terkesan tegas ketika memberikan masukan, namun masukan-masukan tersebut memang sangat membantu dalam perkembangan penulisan skripsi ini. Meski beliau bukan merupakan seorang realis, namun Mba Riris mampu menempatkan dirinya dalam segala perspektif dan memberikan masukan yang berharga.

(5) Dosen-dosen HI UI lainnya, seperti Mas Hariyadi Wirawan, Ph.D., Pak Makmur Keliat, Ph.D., Mas DR. Kusnanto Anggoro, Mas Bantarto Bandoro, M.A., serta dosen

tetap dan tidak tetap lainnya yang telah amat berjasa selama masa perkuliahan penulis. Penulis amat bersyukur dan berterimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan ilmu tersebut sesungguhnya akan terus berguna dalam kehidupan penulis.

(6) Keluarga besar tersayang, khususnya kepada Papa, Ir. Abdul Aziz, MBA dan Mama, Prof. DR. Yahdiana Harahap yang telah membesarkan penulis dalam lingkungan yang begitu menghargai pendidikan. Dukungan materi dan moral, serta doa orang tua yang tidak pernah putus untuk anaknya amat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mama, di umurnya yang masih relatif muda untuk menjadi seorang profesor dalam bidang farmasi, telah memberikan inspirasi yang begitu besar bagi penulis dan membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin jika kita berusaha. Dan Papa, yang bekerja dari mulai pagi hari (bahkan di saat penulis belum bangun tidur) hingga larut malam (terkadang penulis sudah tidur) telah mengajarkan kepada penulis bahwa "*there's no such thing as a free lunch*". Kepada kedua adik saya, Aya Sofia dan Asghar Ali, yang semakin memacu penulis untuk menjadi contoh kakak yang baik. Kepada kedua Opung tercinta, Yahya Harahap dan Dewi Siregar, yang pada saat proses penulisan skripsi ini keduanya jatuh sakit namun tetap mendukung agar cucunya segera mendapatkan gelar sarjana. Hal ini semakin mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi agar bisa membahagiakan mereka. Serta om, tante, dan saudara yang terus mendukung pengerjaan skripsi ini.

(7) Maher M. Hilldiansyah, S.T., yang selalu berada di samping penulis di saat bahagia, sedih, hingga becucuran air mata ketika mengerjakan skripsi dan orang yang paling mengerti perjuangan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dia selalu mendukung dan bahkan banyak memberikan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, terutama dalam pembuatan grafik yang harus menggunakan banyak data dari berbagai sumber yang terkadang membuat penulis 'senewen' duluan, namun dia tetap berusaha menenangkan. Tanpanya, entah bagaimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *I really can't thank you enough, love.*

(8) Kepada sahabat dan 'mentor' penulis selama di HI, Yeremia Lalisang, S.Sos. yang sangat banyak berjasa dan membantu penulisan skripsi ini. Dengannya, penulis banyak menerima masukan dan dapat bertukar pikiran selama proses penulisan, meski sebenarnya ia juga tengah disibukkan dengan pendidikan masternya di Singapura.

(9) Kepada sahabat di HI UI 2006, Eki (teman seperjuangan 4,5 tahun, teman dari SMA, si pemalu), Tania (teman dari SMP, teman nyampah, kelakuannya seperti cumi, maka dia dipanggil cumi), Delcong (teman paling baik hati, teman nebeng, teman nyampah sejati), Mutti (si kerudung bejat yang memiliki *sex appeal* begitu besar), Keshia (teman sehati kalo ngomentarin orang karena mulut kita sampah), Dyana (termasuk dalam geng nyampah dan memiliki tingkat sensitivitas begitu tinggi), Lovely (suka menyampah bareng, pemalas seperti saya, *nocturnal*), Wufa (si kerudung bermulut pedas dan doyan berdebat), Rio (atlit berbadan kekar dan berkulit eksotis), Kokoh (selera musik di atas kokoh-kokoh lainnya di Jakarta dan juga doyan debat), dan Abi (anak juragan batik yang merantau). Serta teman-teman HI 06 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih semua atas dukungannya agar penulis cepat lulus dan bergabung dalam dengan kalian di realita hidup sebenarnya. *I've had four amazing years with you guys! Thanks for the journey!*

(10) *Last but not least*, kepada sahabat-sahabat terbaik, Anis, Anna, Rahma, Inka, dan Rendi yang terus mendukung dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera merampungkan skripsi ini. Dan juga kepada semua teman-teman yang telah memberikan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. *I love you all.*

Depok, Desember 2010



**Syifa Fauziah**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Fauziah  
NPM : 0606097266  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata Konvensional ke Sudan:  
Perbandingan Studi Kasus Konflik Darfur Tahun 2004-2005 dan 2006-2008**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 8 Juni 2010

Yang menyatakan

  
Syifa Fauziah

**Universitas Indonesia  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Program Sarjana Reguler**

**Syifa Fauziah (0606097266)**

**Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata Konvensional ke Sudan:  
Perbandingan Studi Kasus Konflik Darfur Tahun 2004-2005 dan 2006-2008**

(xv+133) halaman + 13 gambar + 11 tabel + daftar pustaka (8 buku + 1 dokumen resmi + 79 artikel internet + 21 jurnal)

---

### **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004-2005 dan 2006-2008, dengan studi kasus konflik Darfur. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan teori *Uncertain Rationales for Arms Sales* dari Andrew J. Pierre sebagai alat untuk menjelaskan perilaku Cina dan menguatkan analisa. Penelitian menunjukkan bahwa transfer senjata Cina ke Sudan, baik di saat tinggi maupun rendah, ditujukan untuk mencapai keuntungan ekonomi, berupa kepentingan minyak. Variabel-variabel independen lain, yakni pengaruh dan kemampuan mempengaruhi serta keamanan dan stabilitas berusaha diarahkan oleh Cina untuk mendukung kepentingannya, meski di saat transfer senjata Cina ke Sudan menurun. Hasil akhir dari penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis termodifikasi karena amat bergantung pada konteks yang ada.

*Kata kunci: Cina, transfer senjata, Sudan, Darfur, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi, keamanan dan stabilitas, minyak*

**ABSTRACT**

**Name : Syifa Fauziah**  
**Study Program : International Relations**  
**Title : Chinese Interest in Conventional Arms Transfer to Sudan:  
A Comparative Case Studies of Conflict in Darfur in 2004-2005  
and 2006-2008**

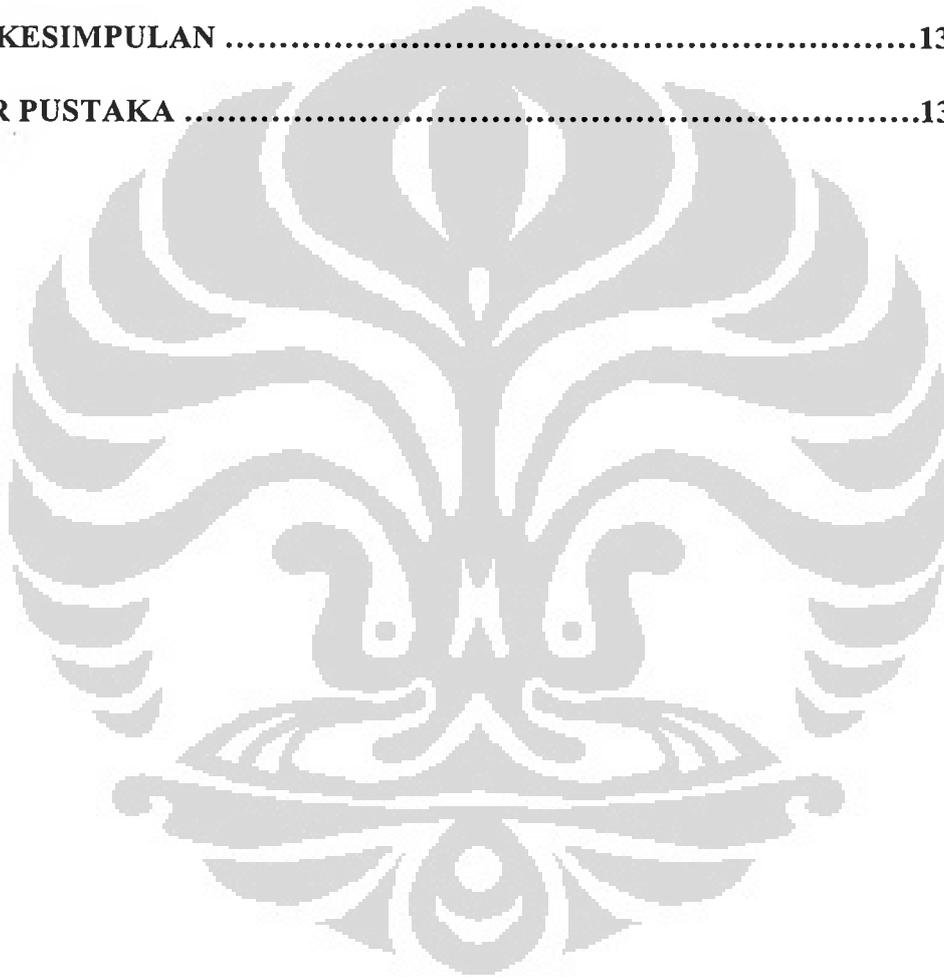
This thesis examines the factors that influence the level of Chinese arms transfers to Sudan in the year of 2004-2005 and 2006-2008, with a case study of conflict in Darfur. This research is quantitative descriptive analytic and using the theory of Uncertain Rationales for Arms Sales by Andrew J. Pierre as a tool to explain the behaviour of China and as well as strengthen analysis. Research shows that Chinese arms transfer to Sudan, during periods of high or low, is intended to achieve the economic benefits of oil interests. Other independent variables, namely influence-leverage and security-stability, are used by China to support their interest in oil, although Chinese weapons to Sudan began to decline. The end result of this study indicate that the hypotheses are modified because it is very dependent on the context.

*Keywords: China, arms transfer, Sudan, Darfur, influence and leverage, security and stability, oil.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Permasalahan .....	19
1.3. Definisi Konseptual .....	19
1.3.1 <i>Arms Transfer</i> .....	19
1.3.2 <i>Coventional Weapons</i> .....	21
1.4 Kerangka Teori .....	25
1.5 Operasionalisasi Konsep dan Hipotesis .....	29
1.6 Model Analisis .....	32
1.7 Metodologi Penelitian .....	32
1.8 Pembabakan Skripsi .....	33
1.9 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	34
<b>BAB II PERKEMBANGAN TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN ..36</b>	
2.1 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 1998-2003 .....	36
2.2 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 2004-2005 .....	43
2.3 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 2006-2008 .....	52
<b>BAB III <i>UNCERTAIN RATIONALES FOR ARMS SALES</i> DALAM MENJELASKAN TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN PADA TAHUN 2004-2005 DAN 2006-2008 .....</b>	<b>57</b>
3.1 Sejarah Transfer Senjata Cina .....	57
3.2 Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008.....	61
3.3 Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	83
3.4 Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	105
3.5 Analisa Variabel Independen .....	112

3.5.1	Analisa Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	115
3.5.2	Analisa Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	119
3.5.3	Analisa Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	123
3.5.4	Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan Tahun 2004-2005 dan 2006-2008 .....	125
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>134</b>



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Negara Pemasok Senjata Tertinggi (2007) .....	4
Gambar 1.2	Perjanjian Transfer Senjata antara Cina dengan Negara Berkembang, 1998-2005 .....	5
Gambar 1.3	Negara-negara Pemasok Senjata Konvensional Terbesar ke Afrika bagian Timur dan Selatan, 2004-2008 .....	8
Gambar 1.4	Transfer Senjata Cina ke Sudan (dalam dolar AS) 1997-2008 ..	14
Gambar 2.1	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 1998-2003 .....	41
Gambar 3.1	Peta Sudan .....	88
Gambar 3.2	Jumlah Penyerangan ke Perkampungan di Darfur Tahun 2004-2008 .....	100
Gambar 3.3	Jumlah Korban Jiwa di Darfur Tahun 2004-2008 .....	101
Gambar 3.4	Jumlah Pengungsi Darfur Tahun 2004-2008 .....	101
Gambar 3.5	Total Ekspor Minyak Sudan ke Seluruh Dunia dan Ekspor Minyak Sudan ke Cina Tahun 2000-2006 .....	110
Gambar 3.6	Jumlah Transfer Senjata Cina ke Sudan dan Ekspor Minyak ke Sudan Tahun 2001-2008 .....	111
Gambar 3.7	Peta Eksplorasi Minyak, Konflik Darfur, dan Pusat Pemerintahan di Sudan .....	121
Gambar 3.8	Temuan dan Hubungan Variabel dalam Teori <i>Uncertain Rationales for Arms Sales</i> .....	129
Tabel 1.1	Transfer Senjata Cina ke Seluruh Dunia, 1997-2008 (dalam juta dolar) .....	12
Tabel 1.2	Resolusi DK PBB terhadap Sudan .....	16
Tabel 2.1	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 1998-2003 .....	40
Tabel 2.2	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 1998-2003 ( <i>SIPRI</i> ) .....	42
Tabel 2.3	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2004 ( <i>Amnesty International</i> ) .....	45
Tabel 2.4	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2005 .....	49
Tabel 2.5	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2005 .....	49
Tabel 2.5	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2006-2008 .....	55
Tabel 2.6	Jumlah Senjata yang diterima Sudan dari Cina .....	55
Tabel 3.1	Kepemilikan Senjata di Sudan (April 2007) .....	102
Tabel 3.2	Hasil Temuan Penelitian .....	112

## DAFTAR SINGKATAN

AMIS	<i>African Union Mission in Sudan</i>
AS	Amerika Serikat
CNPC	<i>China National Petroleum Corporation</i>
CPA	<i>Comprehensive Peace Agreement</i>
CPECC	<i>China Petroleum Engineering and Construction Corporation</i>
DPA	<i>Darfur Peace Agreement</i>
DK	Dewan Keamanan
GNPOC	<i>Greater Nile Petroleum Operating Company</i>
GoSS	<i>Government of Southern Sudan</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	<i>International Criminal Court</i>
JEM	<i>Justice for Equality Movement</i>
NGOs	<i>Non-Governmental Organizations</i>
NRF	<i>National Redemption Front</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDF	<i>Popular Defence Forces</i>
PSC	<i>Peace and Security Council</i>
SAF	<i>Sudan Armed Forces</i>
SLA	<i>Sudan Liberation Army</i>
SPLA	<i>Sudan People's Liberation Army</i>
UA	Uni Afrika
UNAMID	<i>United Nations - African Union Mission in Darfur</i>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasca-Perang Dunia II, penjualan senjata mulai disadari sebagai salah satu bentuk perdagangan yang mempunyai legitimasi dalam perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan *superpower*, perdagangan senjata merupakan sumber kompetisi baru bagi Barat-Timur terhadap Negara Dunia Ketiga. Seperti halnya konsep HI lainnya, hubungan bilateral dalam perdagangan senjata dibentuk dan dipengaruhi oleh perkembangan sistem internasional secara keseluruhan. Perkembangan dalam sistem internasional mempengaruhi arah dan jumlah dari transfer senjata tersebut. Dalam periode polarisasi internasional, seperti pada era Perang Dingin, penerima akan bersekutu dengan pemasok utama dengan menggantungkan situasi geopolitik dan preferensi ideologi mereka, seperti yang terjadi di dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan Pakta Warsawa. Namun dengan berakhirnya polarisasi tersebut, negara penerima senjata akan lebih memilih penerimaan senjata dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan senjatanya.<sup>1</sup> Transfer senjata pasca Perang Dingin mengarah pada kompetisi atau dapat pula dikatakan sebagai pasar bebas. Hampir semua pihak menjual segalanya bagi orang yang dapat membayar atau bahkan dijual kepada sebagian yang tidak dapat membayar. Dalam sedikit kasus, beberapa negara menolak untuk mengirimkan senjata canggih ke kawasan yang kurang stabil atau negara pariah. Namun negara lainnya melihat adanya kesempatan dalam hal tersebut, dan menjual senjata ke negara-negara pariah tersebut.<sup>2</sup>

Transfer senjata sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan sistem senjata, amunisi, serta peralatan taktis dari satu negara ke negara lainnya. Perpindahan tersebut biasanya dilakukan atas dasar komersil, namun terkadang juga dilakukan

---

<sup>1</sup> Thomas M. Leonard, *Encyclopedia of the developing world*, (New York: Routledge, 2006), hlm.89.

<sup>2</sup> William W. Keller and Janne E. Nolan, "The Arms Trade: Business As Usual?", dalam *Foreign Policy*, No. 109 (Winter, 1997-1998), Hlm.113

secara cuma-cuma melalui bantuan militer.<sup>3</sup> Berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan beberapa negara memiliki ketersediaan senjata yang melebihi kebutuhan negara. Negara pun semakin terdorong untuk menjual sisa-sisa senjata tersebut demi keuntungan dan pada akhirnya meningkatkan transfer senjata dalam pasar internasional. Ada tiga tipe perdagangan senjata: (1) antara pemerintah dengan pemerintah; (2) antara pemerintah dengan *non-state actors* (misalnya kelompok pemberontak) di negara lain; (3) penjualan komersil. Penjualan antar pemerintah dan sebagian besar penjualan komersil merupakan perdagangan senjata yang legal. Sedangkan penjualan antar pemerintah dan *non-state actors* dan beberapa penjualan komersil sering dikategorisasikan sebagai penjualan ilegal dan *quasi-legal*, atau sering disebut sebagai *black/grey market*.<sup>4</sup> Namun tidak jarang, perdagangan ilegal berasal dari sumber yang legal tersebut.

Dalam membicarakan senjata yang diperdagangkan, terdapat setidaknya dua jenis senjata, yakni senjata konvensional dan non-konvensional. Sementara perhatian lebih banyak diarahkan pada proliferasi WMD (*weapon of mass destruction*) seperti nuklir, senjata biologis dan kimia, namun justru senjata konvensional seperti AK-47, ranjau darat, tank, dan pesawat tempur lah yang paling banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam konflik.<sup>5</sup> Masalah proliferasi senjata konvensional ini menjadi suatu hal yang penting, terutama jika dikaitkan dengan masalah *human security* karena pada saat ini diperkirakan ada sekitar 640 juta jumlah senjata konvensional yang beredar dalam sirkulasi global, dan ada sekitar 50.000-100.000 orang yang terbunuh setiap tahunnya dalam konflik, terutama yang terjadi di negara-negara miskin, seperti kawasan Afrika. Karena konteks ini, mantan Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan bahwa senjata konvensional, khususnya SALW (*small arms and light weapons*) seperti senapan, ranjau darat, dan granat merupakan *weapons of mass destruction in slow motion*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 88.

<sup>4</sup> Sarah Meek, "Combating Arms-trafficking: The Need for Integrated Approaches", dalam *African Security Review*, Vol 9 No 4, 2000.

<sup>5</sup> Arms Trade, diakses dari <http://www.cdi.org/program/index.cfm?ProgramID=73>, pada tanggal 12 September 2009, pukul 19.25 WIB.

<sup>6</sup> Stefan Markowski dan Peter Hall, "Real Weapons of Mass Destruction: Proliferation of Small Arms

Pola transfer senjata konvensional ini telah berubah pasca Perang Dingin dan pasca Perang Teluk. Hubungan antara pemasok senjata dan penerima terus berubah sesuai dengan berubahnya keadaan politik, militer, dan ekonomi. Selain itu, negara berkembang terus menjadi fokus utama dari penjualan senjata oleh para pemasok senjata konvensional. Pada periode 1998-2005, transfer senjata konvensional ke negara berkembang telah mencapai 66,8 persen dari seluruh jumlah transfer senjata internasional.<sup>7</sup> Angka ini pun terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya konflik internal yang terjadi di dalam negara-negara berkembang.

Bagi negara-negara berkembang atau rezim yang tidak mampu membeli sistem persenjataan canggih dari negara Barat karena alasan politik atau alasan harga yang mahal, Cina menjadi *last resort* bagi pemenuhan senjata di negara-negara tersebut. Penjualan senjata kepada rezim dengan reputasi yang buruk merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Cina, karena mereka merupakan pemasok yang tersisa setelah Amerika Serikat (AS), Inggris, Perancis, dan Rusia di dalam pasar senjata global.<sup>8</sup> Dengan adanya perkembangan dalam sistem internasional, transfer senjata yang dilakukan Cina tidak lagi dilandaskan atas dasar ideologi, melainkan sudah berkembang ke arah komersil. Dengan demikian, meski lebih banyak diarahkan pada negara berkembang, namun Cina masih berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari negara-negara tersebut.

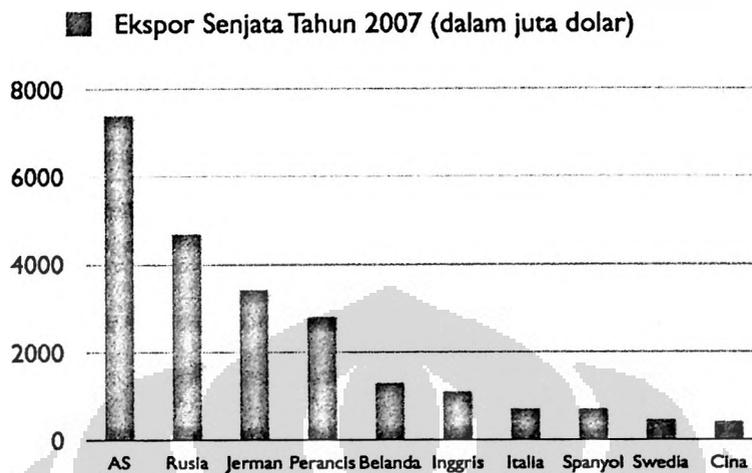
### Gambar 1.1 Negara Pemasok Senjata Tertinggi (2007)

---

and Light Weapons in Developing Countries”, diakses dari [www.unsw.adfa.edu.au/sbus/research/Small%20Arms.pdf](http://www.unsw.adfa.edu.au/sbus/research/Small%20Arms.pdf), pada tanggal 2 Desember 2008, pukul 22.35 WIB.

<sup>7</sup> Richard F. Grimmett, “Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005”, dalam *CRS Report for Congress*, 23 Oktober 2006, Hlm.2

<sup>8</sup> William D. Hartung, “Deadly Traffic: China’s Arms Trade with the Sudan”, diakses dari [www.newamerica.net/.../deadly\\_traffic\\_chinas\\_arms\\_trade\\_sudan](http://www.newamerica.net/.../deadly_traffic_chinas_arms_trade_sudan), pada tanggal 12 September 2009, pukul 21.40 WIB.

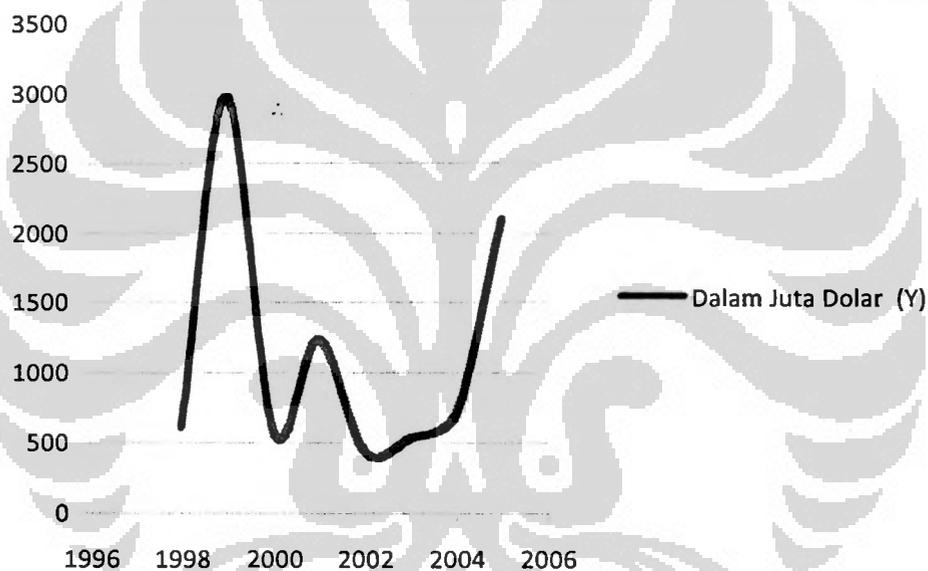


Sumber: Meredith Lauren Blank, "Hugging with Tactical Arms: What Motivates China to Export Weapons?", diakses dari [http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank\\_meredith\\_2009.pdf](http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank_meredith_2009.pdf)

Pemasok senjata tingkat pertama seperti AS memproduksi sistem persenjataan dengan kualitas lebih tinggi dari pada pemasok senjata tingkat kedua atau ketiga. Dalam hal teknologi serta program penelitian dan pengembangan, pemasok tingkat pertama memiliki keunggulan komparatif terhadap pemasok tingkat kedua dan ketiga. Keuntungan perdagangan senjata pemasok tingkat pertama dapat terlihat dari dominasi pasar mereka. Tabel di atas memperlihatkan pemasok senjata tingkat pertama semuanya menghasilkan 1 milyar dolar per tahun, sedangkan pemasok tingkat kedua berada di bawah 1 milyar dolar per tahun. Berdasarkan data dari SIPRI, pada tahun 2007, AS memiliki kepemilikan senilai 31% dari penjualan senjata. Pemasok senjata kedua terbesar setelah AS, Rusia hanya memiliki kepemilikan senilai 19 persen. Pada tahun 2007, AS telah menjual senjata kepada 58 negara sementara Cina hanya menjual kepada 17 negara. Meski kebanyakan penjualan senjata AS tidak terdiri dari perlengkapan pertahanan terbaru, namun lingkup dari negara penerima dan besarnya keuntungan memperlihatkan bahwa negara tingkat pertama tetap mendominasi pasar senjata. Pemasok senjata tingkat kedua seperti Perancis, Cina, dan Belanda juga memiliki persenjataan canggih meski belum

secanggih yang dimiliki AS. Meski ada celah yang besar antara negara pemasok senjata tingkat pertama dan kedua, namun mereka tetap merupakan kontraktor dan pemasok senjata utama bagi negara lain. Yang terakhir di dalam hierarki pemasok senjata adalah tingkat ketiga yang merupakan pemasok senjata yang baru muncul seperti Brazil, India, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.<sup>9</sup>

**Gambar 1.2 Perjanjian Transfer Senjata antara Cina dengan Negara Berkembang, 1998-2005**



Sumber: Richard F. Grimmett, "Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005", dalam *CRS Report for Congress*, [www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf)

Dari grafik di atas dapat terlihat adanya dinamika transfer senjata dari Cina ke negara-negara berkembang. Selama tahun 1980an, penjualan senjata merupakan sumber signifikan bagi pendapatan luar negeri Cina. Dari tahun 1984 hingga 1987, ketika penjualan senjata Cina mencapai puncaknya, penjualan senjata Cina telah

<sup>9</sup> Meredith Lauren Blank, "Hugging with Tactical Arms: What Motivates China to Export Weapons?", hlm.11, diakses dari [http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank\\_meredith\\_2009.pdf](http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank_meredith_2009.pdf), pada tanggal 15 Juni 2010, pukul 19.20 WIB.

menghasilkan setidaknya 8,2 milyar dolar AS atau setara dengan 7 persen dari total ekspor Cina pada tahun tersebut.<sup>10</sup> Namun setelah berakhirnya Perang Iran-Irak di tahun 1988, permintaan persenjataan dari negara-negara klien Cina di Asia dan Timur Tengah mengalami penurunan. Namun demikian, hal ini justru tidak terjadi di kawasan Sub-Sahara Afrika. Transfer senjata Cina ke Sub-Sahara Afrika mengalami peningkatan volume dan perubahan karakter pada tahun 1990an. Pada awal dekade, Afrika merupakan pasar dengan prioritas yang amat rendah bagi Cina, atau hanya sekitar sepersepuluh dari total ekspor senjata Cina. Namun demikian, dari 1995-1998, ekspor Cina ke Afrika semakin meningkat, baik dari volume maupun pasar. Cina telah mengekspor senjata senilai 600 juta dolar AS ke Afrika selama empat tahun tersebut, dan merupakan peningkatan sebanyak 500 persen sejak awal 1990an. Peningkatan tersebut juga memperluas kepemilikan Cina atas pasar Afrika yang hanya sekitar 4,6 persen pada 1991-1994 dan menjadi 22 persen pada 1995-1998. Oleh karenanya, pada pertengahan 1990an itu, Cina muncul menjadi satu-satunya eskportir senjata terbesar ke Afrika, yang disusul oleh Rusia.<sup>11</sup> Berakhirnya Perang Dingin, disintegrasi Uni Soviet serta mundurnya AS dan Rusia dari Afrika telah menciptakan peluang yang lebih besar bagi Cina untuk melebarkan pengaruhnya di sana demi mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Afrika memainkan peranan yang penting dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri Cina dan hubungan Sino-Afrika akan semakin menguat dan menjadi komponen yang penting bagi kemunculan Cina sebagai *new global power*. Keinginan Cina untuk lebih menonjol dalam sistem internasional telah memotivasi Cina untuk membangun hubungan dengan negara-negara berkembang dan memposisikan dirinya sebagai pemenang di dalam *world peace and justice*, yang mana kedua hal tersebut dijadikan alat untuk membedakan dirinya dari *great powers* lainnya. Dengan mengaliansikan dirinya dengan Negara Dunia Ketiga, Cina telah mampu mendapatkan dukungan serta

---

<sup>10</sup> Daniel Byman dan Roger Cliff, *China's Arms Sales: Motivations and Implications*, (Washington: RAND, 1999), hlm.21.

<sup>11</sup> Evan S. Medeiros dan Bates Gill, "Chinese Arms Exports: Policy, Players, and Process, hlm.11-12, diakses dari [www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?](http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?), pada tanggal 12 September 2009, pukul 20.55 WIB

pengakuan atas klaim status *great power* dari negara-negara tersebut.<sup>12</sup>

Transfer dan perdagangan senjata konvensional di Sub-Sahara Afrika telah menjadi permasalahan keamanan yang utama. Kawasan ini memiliki jumlah konflik yang paling banyak di antara kawasan lainnya di dunia. Meski termasuk dalam jajaran negara-negara yang miskin dan *underdeveloped*, namun negara-negara serta gerakan pemberontakan di wilayah ini mampu membeli senjata ringan dengan melalui uang tunai, berlian, minyak serta komoditas lainnya.<sup>13</sup> Sub-Sahara Afrika sendiri merupakan suatu istilah untuk menguraikan bagian benua Afrika yang terbentang di bagian selatan Sahara. Kawasan ini berbeda dengan Afrika Utara, yang merupakan bagian dari dunia Arab. *Horn Africa* dan sebagai besar Sudan secara geografis merupakan bagian dari Sub-Sahara Afrika, namun daerah ini juga memiliki pengaruh Timur Tengah yang cukup kuat dan juga menjadi bagian dari dunia Arab. Kawasan Sub-Sahara juga dikenal sebagai *Black Africa*, karena populasinya terdiri dari orang-orang kulit hitam.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Banyaknya konflik di kawasan Sub-Sahara Afrika ini telah menyebabkan angka kematian yang begitu tinggi, yakni sekitar 7 hingga 8 juta korban jiwa. Dan pada tahun 2001, sekitar lebih dari 3,5 juta dari jumlah pengungsi dunia sekitar 14 juta berada di Afrika.<sup>15</sup> Tingginya angka kematian tersebut tidak dapat dilepaskan dari peredaran senjata-senjata konvensional secara ilegal di kawasan sub-Sahara Afrika karena lemahnya kontrol terhadap perbatasan ataupun rendahnya penegakan hukum, terutama yang terkait dengan masalah proliferasi senjata kecil dan ringan.

### Gambar 1.3 Negara-negara Pemasok Senjata Konvensional Terbesar ke

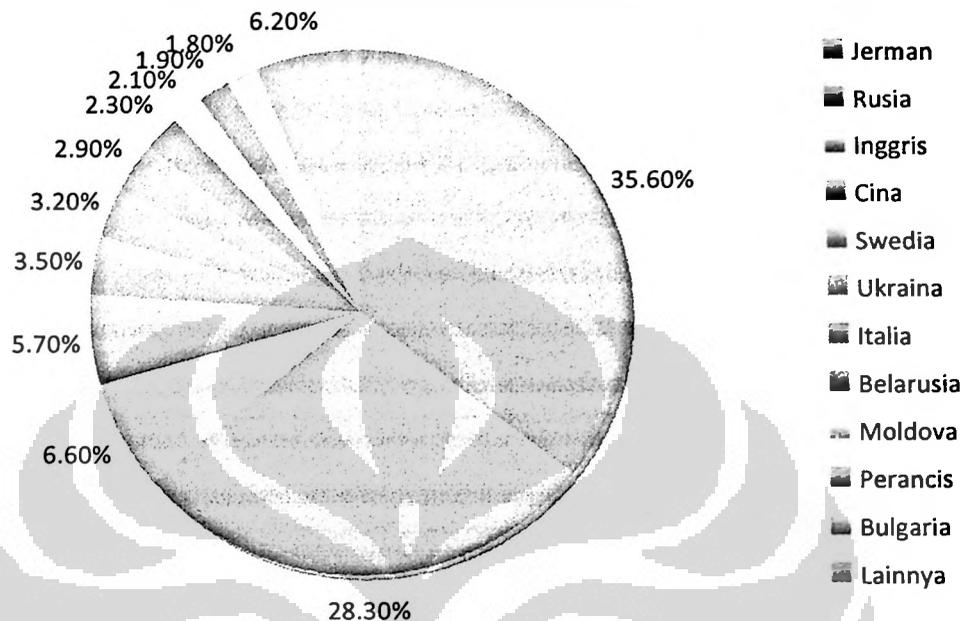
<sup>12</sup> Richard J. Payne dan Cassandra R. Veney "China's Post-Cold War African Policy", hlm. 867-868, dalam *Asian Survey*, Vol. 38, No. 9 (Sep., 1998)

<sup>13</sup> \_\_\_\_, "Arms and Conflict in Africa", diakses dari [www.state.gov/s/inr/rls/fs/2001/4004.htm](http://www.state.gov/s/inr/rls/fs/2001/4004.htm), pada tanggal 14 Desember 2008, pukul 10.25 WIB.

<sup>14</sup> Diakses dari <http://exploringafrica.matrix.msu.edu/images/subsaharan>, pada tanggal 14 Desember 2008, pukul 10.35 WIB

<sup>15</sup> \_\_\_\_, "Arms and Conflict in Africa", *Loc. Cit.*

### Afrika bagian Timur dan Selatan, 2004-2008



Sumber: SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>

**Keterangan:** Meski Cina memasok lebih sedikit senjata ke Afrika Timur dan Selatan dibanding Jerman, Rusia, dan Inggris, namun Cina memasok senjata ke lebih banyak negara seperti 58 persen ke Namibia, 14 persen ke Sudan, 12 persen ke Zimbabwe, dan porsi lebih kecil ke Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, dan Zambia.<sup>16</sup> Selain itu, adanya elemen masyarakat sipil di negara-negara Barat yang secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan serta regulasi ekspor senjata terhadap negara-negara lain pada akhirnya membentuk suatu kontrol yang membatasi negara dalam bertindak. Namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Cina. Hal tersebut membuat hampir tidak adanya tekanan dari rakyat ke pemerintah Cina untuk mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab terhadap penjualan senjata ke luar negeri. Selain itu, Cina telah menolak untuk menandatangani perjanjian terkait dengan penjualan senjata dan kebijakan Beijing pun tergolong ambigu serta menghalangi regulasi dan kontrol yang efektif terhadap ekspor senjata.

<sup>16</sup> Pieter D. Wezeman, "Arms Transfers to East and Southern Africa", *SIPRI Background Paper* December 2009, hlm.24.

Keengganan Cina untuk tidak mempublikasikan informasi terkait dengan ekspor senjata –data terakhir yang dimasukkan ke dalam *UN Register in Conventional Arms* adalah ekspor di tahun 1996- membuat penjualan senjata Cina menjadi begitu mencurigakan dan tidak jelas.<sup>17</sup>

Sudan, sebagai negara terbesar di kawasan Sub-Sahara Afrika dan produsen minyak mentah terbesar ketiga di Sub-Sahara Afrika (memiliki cadangan minyak sebesar 563 juta barel)<sup>18</sup>, selama tujuh tahun belakangan tengah terlibat dalam operasi militer dalam melawan populasi sipil di Darfur. Dengan meningkatnya pemberontakan pada tahun 2003, pemerintah membentuk milisi kontra-pemberontakan, atau yang lebih dikenal sebagai *Janjaweed*, yang menargetkan komunitas etnis di mana para pemberontak itu berasal. Dengan adanya penyerangan terhadap desa-desa, pemerintah Sudan dan milisi lokal *Janjaweed* mendapatkan bantuan dari tentara Sudan.<sup>19</sup> Konflik Darfur yang berkepanjangan ini telah meluas hingga Chad serta Republik Afrika Tengah dan hingga kini konflik ini telah menyebabkan ratusan ribu nyawa melayang dan jutaan orang harus kehilangan tempat tinggalnya. Konflik berkepanjangan ini diantaranya disebabkan oleh aliran senjata kepada rezim Khartoum yang sebagian besar justru berakhir di tangan milisi *Janjaweed* yang banyak melakukan kekerasan di Darfur.<sup>20</sup>

Terkait dengan hal tersebut, pembelian senjata kecil serta amunisinya oleh Sudan telah meningkat secara drastis sejak 1999. Pada tahun 2005, impor senjata konvensional Sudan telah meningkat sebanyak 680 kali lipat di banding tahun 1999. Sejak tahun 2003 dan 2006, periode di mana terjadi penyiksaan paling parah oleh pemerintah Sudan di Darfur, Cina telah menjual senjata kecil senilai lebih dari 55 juta dolar kepada Khartoum. Sejak 2004, tahun di mana DK PBB menerapkan embargo senjata ke Darfur, Cina telah menjadi pemasok senjata kecil paling penting bagi

<sup>17</sup> Ian Taylor, "Arms Sales to Africa: Beijing's Reputation at Risk", dalam *China Brief Volume: 7 Issue: 7*, hlm. 213.

<sup>18</sup> \_\_\_\_, "China's Oil Rush in Africa", LCDR Cindy Hurst July 2006, diakses dari [www.iags.org/chinainafrika.pdf](http://www.iags.org/chinainafrika.pdf) pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 15.45 WIB, hlm.6

<sup>19</sup> \_\_\_\_, "Stopping the Flow of Arms to Sudan: China's Arms Transfers and the Need to Expand the Arms Embargo", diakses dari [www.ajws.org/emergencies/darfur/.../china\\_arms\\_brief\\_9-08-08.pdf](http://www.ajws.org/emergencies/darfur/.../china_arms_brief_9-08-08.pdf), pada tanggal 12 September 2009, pukul 22.45 WIB.

<sup>20</sup> William D. Hartung, *Loc. Cit.*

Khartoum, memasok setidaknya 90 persen senjata kecil bagi Sudan setiap tahunnya. Pengamat di Darfur melaporkan telah melihat senjata-senjata yang berasal dari Cina seperti peluncur granat dan amunisi bagi senapan maupun mesin senjata berat.<sup>21</sup> Selain itu, Cina juga mengekspor truk militer serta pesawat tempur yang digunakan untuk oleh tentara Sudan untuk penyerangan ke Darfur. Selain melakukan ekspor senjata, perusahaan senjata Cina juga dilaporkan membantu pemerintah Sudan untuk membentuk pabrik senjata kecil dan amunisi di luar Khartoum, yang memproduksi senjata berat dan ringan, peluncur roket, mortir, senjata anti-tank, dan amunisi.<sup>22</sup> Di sisi lain, meski mengetahui adanya kekejaman yang terjadi di Darfur dengan menggunakan persenjataan yang mereka ekspor, Cina terus meningkatkan kerjasama dalam bidang militer dengan Sudan. Cina yang merasa pengeksportan senjata tersebut diarahkan kepada pemerintah Sudan tidak merasa bertanggung jawab jika pada akhirnya senjata tersebut berpindah tangan ke milisi.

Dalam membahas transfer senjata Cina ke Sudan, kepentingan Cina dalam mengamankan pasokan minyaknya di Sudan memang tak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi Cina yang begitu pesat membuat kebutuhannya akan energi, khususnya minyak terus meningkat di mana saat ini Cina merupakan konsumen minyak kedua terbesar di dunia setelah AS. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan minyaknya ini, Cina berusaha menghindari kompetisi langsung dengan AS. AS melalui perusahaan minyaknya, Chevron, sebelumnya pernah beroperasi di Sudan namun harus keluar karena adanya Perang Sipil antara wilayah Utara dan Selatan Sudan. Setelah itu, AS juga memberlakukan sanksi finansial terhadap Sudan karena pemerintah Sudan dianggap memiliki hubungan dengan kelompok militan Islam. Dengan demikian, semua yang sempat dimiliki oleh AS saat itu, kini diambil alih oleh Cina.<sup>23</sup> Saat ini, Sudan merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi Cina di mana Cina memiliki kepemilikan yang dominan di dalam perusahaan eksplorasi

---

<sup>21</sup> \_\_\_\_, "Made in China: China's Arms Sales to Sudan", diakses dari [www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=45](http://www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=45) pada tanggal 11 September 2009, pukul 11.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lindsey Hilsum, "Re-enter the Dragon: China's New Mission in Africa", dalam *Review of African Political Economy*, Vol.32, No.104/105 (Jun. - Sep., 2005), hlm. 421.

minyak di Sudan.<sup>24</sup> Terkait dengan pengamanan pasokan minyak ini, Buku Putih yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Cina pada tahun 1998 juga memaparkan bahwa *energy security* merupakan bagian yang integral dari keamanan, ekonomi global, kebijakan luar negeri dan keamanan semakin terkait satu sama lain.<sup>25</sup> Kaitan antara transfer senjata Cina dan kepentingan Cina terhadap minyak Sudan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Selain adanya kebutuhan dari negara-negara berkembang untuk mendapatkan peralatan dan persenjataan militer dengan harga yang terjangkau, Cina juga mulai menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga di kawasan luar Asia sejak awal 1989. Reaksi keras yang datang dari Barat atas peristiwa *Tiananmen square* (Juni 1989), termasuk embargo senjata yang diberlakukan oleh AS dan Uni Eropa, serta keseriusan negara-negara Barat dalam mengkritisi pelanggaran HAM yang terjadi di Cina, telah membuat Beijing berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara non-Barat. Negara-negara berkembang telah dijadikan Cina sebagai dasar bagi kebijakan luar negeri Cina dalam usahanya membangun koalisi untuk melindungi Beijing dari ancaman Barat.<sup>26</sup> Faktor kedua yang mendorong pemimpin Cina untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif pasca-1989 adalah adanya hegemoni internasional AS yang tidak dapat ditandingi dan ditakutkan dapat menghalangi pengaruh Cina sebagai *global political power*. Untuk menghadapi permasalahan ini, Beijing mengedepankan konsep multipolaritas yang didefinisikan sebagai pembentukan aliansi yang fleksibel untuk menampung setiap bentuk hegemoni dan membangun tata internasional yang baru dan adil. Karena Cina menganggap dirinya sebagai kekuatan yang tidak dapat dihindari dalam sistem internasional, maka pemerintah Cina berusaha mendekati negara non-Barat untuk menyokong posisi internasionalnya *vis-a-vis* dengan AS, terutama ruang bagi Cina untuk melakukan manuver di dalam DK PBB dan badan

<sup>24</sup> Andrei Chang, "China Sells Arms to Sudan", diakses dari [http://www.upi.com/Business\\_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/](http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/), pada tanggal 17 Maret 2010 pukul 17.10 WIB.

<sup>25</sup> Denis M. Tull, "China's Engagement in Africa: scope, significance and consequences", dalam *Journal of Modern African Studies*, 44, 3 (2006), hlm.469.

<sup>26</sup> Denis M. Tull, *Op.Cit.*, hlm. 460.

internasional lainnya.<sup>27</sup>

**Tabel 1.1 Transfer Senjata Cina ke Seluruh Dunia, 1997-2008 (dalam juta dolar)**

Negara	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	Total
Algeria				11	12	15				61			98
Armenia			2										2
Bangladesh			27	9	2			6	1	184	54	10	293
Bolivia						5							5
Chad											1		1
Ethiopia			18										18
Gabon								5		1			6
Ghana											9		9
Indonesia										12	5	3	20
Iran	52	80	58	63	83	111	88	90	63	81	77	77	924
Kamboja											40		40
Kenya	9			9							8		26
Kongo										0	0		1
Kuwait				26	26	23	24						99
Laos												7	7
Mali				7									7
Mauritania	8					15	7						30
Mesir					12	45	59	59	14		24	24	235
Mexico										5			5
Myanmar	197	154	99	3	43	5	44	32	76		2		654
Namibia	3				9					66		66	144
Nepal									1				1
Oman						3	9						12
Pakistan	101	100	83	64	295	282	256	78	79	99	143	209	1787

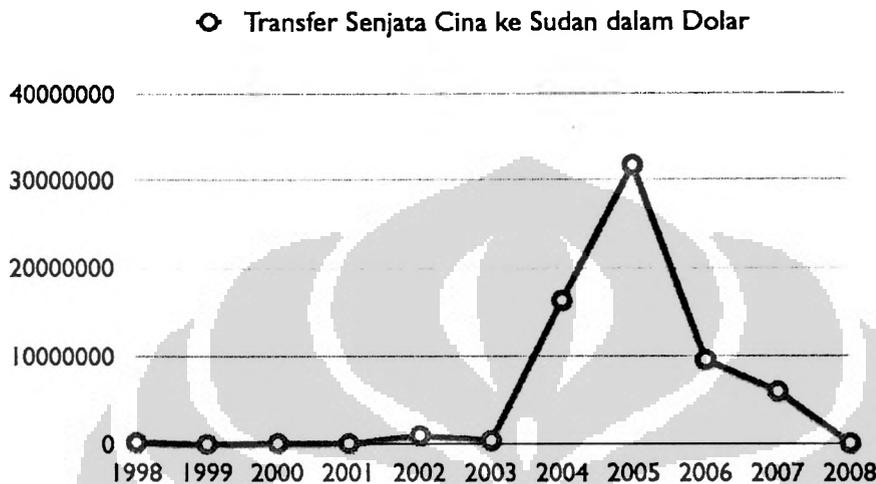
<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.461.

Rwanda											2	2	5
Saudi Arabia												36	36
Sierra Leone	8									10			18
Sri Lanka		17	18	32	14	2		10	17	10	8	53	180
Sudan	66					14	95	2	14	4		14	209
Tanzania							46			0	0		47
Thailand				25					11	11			48
Turkey		6	6	6					8	8	8		43
Uganda												3	3
Venezuela										14	27	41	82
Yordania									8				8
Zambia				19						20	3		42
Zimbabwe									14	14			28
<b>Total</b>	<b>443</b>	<b>357</b>	<b>311</b>	<b>272</b>	<b>496</b>	<b>515</b>	<b>632</b>	<b>282</b>	<b>306</b>	<b>599</b>	<b>412</b>	<b>544</b>	<b>5169</b>

Sumber: [http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export\\_values.php](http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa transfer senjata Cina ke Sudan masih berada di bawah transfer senjata Cina ke Iran, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, dan Mesir. Meski demikian, Sudan merupakan negara di kawasan Afrika yang paling banyak menerima transfer senjata dari Cina. Dari tabel di atas dapat terlihat pula bahwa transfer senjata Cina ke Sudan berjumlah sekitar 4 persen dari total transfer senjata Cina ke seluruh dunia.

**Gambar 1.4 Transfer Senjata Cina ke Sudan (dalam dolar AS) 1997-2008**



Data telah diolah dari NISAT (*Norwegian Initiative on Small Arms Transfers*), [http://balder.prio.no:8080/PublicQuery\\_SQL.aspx](http://balder.prio.no:8080/PublicQuery_SQL.aspx) dan *UN Comtrade*

Pelanggaran HAM serta konflik yang berkepanjangan di Darfur telah membawa respon internasional terhadap hal tersebut. Sejak 29 Maret 2005, Dewan Keamanan (DK) PBB telah melarang transfer senjata bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam konflik Darfur dan menspesifikasikan bahwa Pemerintah Sudan dilarang untuk mentransfer perlengkapan militer ke Darfur tanpa mendapat izin dari *Sanction Committee* DK PBB. Meski demikian, pihak yang berkonflik terus menerima dan menempatkan senjata-senjata mereka di Darfur. Hal ini disebabkan oleh implementasi hukum kontrol perdagangan senjata yang amat buruk.<sup>28</sup>

Embargo senjata telah dikemukakan di dalam resolusi DK PBB. Pada paragraf 7 dan 8 Resolusi 1556 (2004), 30 Juli 2004, DK PBB memutuskan bahwa “seluruh negara harus berpartisipasi dalam mencegah penjualan atau pemasokan senjata bagi seluruh entitas non-pemerintah dan individu, termasuk Janjaweed, yang

<sup>28</sup> Amnesty International, “Blood at the Crossroads: Making the case for a global Arms Trade Treaty”, diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/011/2008/en/19ea0e74-8329-11dd-8e5e-43ea85d15a69/act300112008en.pdf>, pada tanggal 8 Februari 2010, pukul 15.40 WIB.

beroperasi di Darfur Utara, Selatan, dan Barat, dari negara mereka atau dari teritori mereka atau menggunakan *flag vessels* atau *aircraft* mereka, bagi senjata dan material lainnya yang terkait, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan perlengkapan militer, perlengkapan paramiliter, dan juga suku cadang” termasuk juga pemberian “pelatihan atau bantuan” yang berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>29</sup> Dalam paragraf 7 Resolusi 1591 (2005), 29 Maret 2005, DK PBB memutuskan bahwa Resolusi 1556 “juga diberlakukan bagi seluruh pihak dalam *N’djamena Ceasefire Agreement* dan juga bagi pemberontak lainnya” dan juga bagi pemerintah Sudan.<sup>30</sup>

Meski demikian, dua negara DK PBB yang menolak embargo terhadap Sudan, Cina dan Rusia, terus memberikan aliran senjata kepada pemerintahan Darfur. *Sanction Committee* mengklarifikasi pemahamannya di dalam laporan 28 Desember 2006 bahwa embargo memungkinkan negara anggota untuk “menyediakan senjata dan perlengkapan militer bagi Pemerintah Sudan selama masih berada di luar wilayah Darfur dan Pemerintah dapat memindahkan perlengkapan militer ke dalam wilayah Darfur selama pemindahan tersebut disetujui oleh Komite atas permintaan dari pemerintah”.<sup>31</sup> Oleh karenanya, secara praktis, *Sanctions Committee* PBB memutuskan bahwa China, dapat terus mengirimkan senjata, segala material yang terkait, bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintah Sudan meski adanya pelanggaran terhadap embargo PBB, selama kesemuanya itu tidak ditujukan ke dalam Darfur. Pemerintah Cina mengaku bahwa mereka telah memberitahu Pemerintah Sudan bahwa senjata mereka tidak boleh dipergunakan di Darfur. Namun demikian, Pemerintah Sudan secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan mengirim perlengkapan militer ke wilayah manapun yang mereka inginkan. Mengetahui adanya resiko tersebut, pada Maret 2007, *UN Panel of Experts* yang ditunjuk oleh Resolusi 1591 merekomendasikan bahwa negara pemasok harus meminta pemerintah Sudan

---

<sup>29</sup> Amnesty International, “Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur”, diakses dari <http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR541392004>, pada tanggal 18 Maret 2010, pukul 15.10 WIB

<sup>30</sup> *UN Security Council Resolution 1591*, 29 Maret 2005.

<sup>31</sup> Amnesty International, “Blood at the Crossroads: Making the case for a global Arms Trade Treaty”, *Op.Cit.*

untuk menyediakan “*end-use certificate*” yang menyebutkan tujuan dari perlengkapan dan jasa militer serta harus memberitahu *Committee* terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Tabel 1.2 Resolusi DK PBB terhadap Sudan

No. Resolusi	Tanggal Dikeluarkan	Isi Resolusi
S/RES/1556 (2004)	30 Juli 2004	Menerapkan embargo senjata kepada seluruh entitas non-pemerintah serta individu, termasuk <i>Janjaweed</i> , yang beroperasi di Darfur bagian Utara, Selatan, dan Barat, Sudan.
S/RES/1591 (2005)	29 Maret 2005	Memperluas embargo senjata kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam <i>N'djamena Ceasefire Agreement</i> dan pemberontak lainnya yang berada di Darfur Utara, Darfur Selatan, dan Darfur Barat, Sudan; Membentuk Komite untuk mengawasi seluruh pihak yang menjadi subjek dari resolusi tersebut; Membentuk <i>Panel of Experts</i> untuk membantu Komite dalam mengawasi implementasi dan mengkoordinasikan aktivitasnya dengan operasi <i>African Union Mission in Sudan</i> (AMIS).
S/RES/1651 (2005)	21 Desember 2005	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi 1591 (2005) hingga Maret 2006

<sup>32</sup> *Ibid.*

S/RES/1665 (2006)	29 Maret 2006	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi 1591 (2005) hingga September 2006
S/RES/1672 (2006)	25 April 2006	Menunjuk empat orang sebagai subjek dari pelarangan untuk bepergian dan pembekuan aset yang ditetapkan oleh paragraph 3 dalam Resolusi 1591 (2005)
S/RES/1679 (2006)	16 Mei 2006	Menunjukkan intensinya dalam mengambil langkah yang keras dan efektif, seperti larangan untuk bepergian dan pembekuan aset kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran atau melakukan usaha untuk memblokir implementasi <i>Darfur Peace Agreement</i>
S/RES/1713 (2006)	29 September 2006	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi 1591 (2005) hingga 29 September 2007
S/RES/1779 (2007)	28 September 2007	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi 1591 (2005) hingga 15 Oktober 2008
S/RES/1841 (2008)	15 Oktober 2008	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi 1591 (2005) hingga 15 Oktober 2009
S/RES/1891 (2009)	13 Oktober 2009	Memperpanjang mandat <i>Panel of Experts</i> untuk menerapkan Resolusi

	1591 (2005) hingga 15 Oktober 2010
--	------------------------------------

Sumber: [www.un.org/sc/committees/1591/](http://www.un.org/sc/committees/1591/)

Transfer senjata yang terus dilakukan oleh Cina ke Sudan semakin memperkeruh konflik yang ada. Hal ini cukup bertentangan dengan tiga prinsip dalam negosiasi senjata yang tertulis di dalam buku putih Cina tahun 1998, *China's National Defense*. *Pertama*, penjualan senjata mereka harus membantu negara penerima untuk menambah kapabilitasnya bagi *legitimate self-defense*. *Kedua*, ekspor senjatanya harus tidak bertentangan dengan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan maupun dunia secara keseluruhan. *Ketiga*, Cina berpendapat bahwa ekspor senjatanya tidak akan menginterferensi masalah dalam negeri suatu negara.<sup>33</sup> Selain itu, Cina, sebagai penandatangan Konvensi Genosida 1948 yang menyebutkan bahwa “pihak-pihak yang terlibat mengakui bahwa genosida merupakan kejahatan di bawah hukum internasional dan oleh karenanya pihak-pihak yang terlibat dalam konvensi ini harus bertanggung jawab dalam mencegah dan menghukum mereka”. Dengan demikian, penjualan senjata Cina memperlihatkan kegagalannya dalam mencegah genosida dan menghasilkan kompleksitas di dalam kejahatan tersebut.<sup>34</sup>

Di tengah proyeksi pencitraan Cina sebagai *new global power* yang bertanggung jawab, Cina justru mempersenjatai salah satu rezim yang paling represif di dunia. Cina juga berani melanggar embargo senjata yang diberlakukan DK PBB terhadap Sudan pada tahun 2004.

Pada Grafik 1.2 (Transfer senjata Cina ke Sudan, 1997-2008) dapat terlihat bahwa transfer senjata konvensional dari Cina ke Sudan mengalami peningkatan di tahun 2004 dan meningkat tajam pada tahun 2005, meski pada tahun itu embargo senjata terhadap pemerintah Sudan telah diberlakukan oleh DK PBB. Namun setelah tahun 2005, transfer senjata kembali menurun drastis. Oleh karenanya, dalam skripsi ini peneliti berusaha meneliti bagaimana variabel-variabel pengaruh dan kemampuan mempengaruhi, keamanan dan stabilitas, serta keuntungan ekonomi memberikan

<sup>33</sup> Evan S. Medeiros dan Bates Gill, *Op.Cit.*, hlm.24.

<sup>34</sup> \_\_\_\_, “Stopping the Flow of Arms to Sudan: China’s Arms Transfers and the Need to Expand the Arms Embargo”, *Loc.Cit.*

pengaruh pada transfer senjata Cina ke Sudan di saat transfer senjata sempat begitu tinggi (2004-2005) dan di saat transfer senjata kembali turun (2006-2008) yang sesuai dengan teori *Uncertain Rationales for Arms Sales* dari Andrew J. Pierre.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Dari Grafik 1.2 (Transfer senjata Cina ke Sudan, 1997-2008) terlihat bahwa aliran senjata Cina ke Sudan meningkat begitu tajam di tahun 2004-2005 namun kemudian menurun tajam pada tahun setelahnya. Oleh karenanya, pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

***“Mengapa transfer senjata konvensional Cina ke Sudan pada tahun 2004-2005 meningkat tinggi, sementara pada tahun 2006-2008 menurun tajam?”***

## 1.3 Definisi Konseptual

### 1.3.1 *Arms Transfer*

Penelitian ini akan banyak menggunakan istilah transfer senjata dalam kaitannya dengan hubungan Cina-Sudan. Oleh karenanya, diperlukan suatu penjabaran mengenai definisi transfer senjata yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini. Sejak perang di Timur Tengah pada tahun 1973, dua tren dominan yang melibatkan persenjataan semakin mendapat perhatian yang khusus, yakni pengembangan senjata konvensional dan semakin meningkatnya transfer senjata ke Negara Dunia Ketiga. Adanya transfer senjata secara umum dapat mengancam stabilitas seperti meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata. Secara umum, transfer senjata dapat dinilai sebagai hal yang dapat membawa kestabilan ataupun ketidakstabilan dengan melihat insentif mereka apakah (1) mendorong konflik, khususnya *preemptive/surprise attack* (2) meningkatkan skala dan komposisi *arms race* lokal (3) meningkatkan eskalasi konflik.<sup>35</sup>

Transfer senjata dapat diartikan sebagai perpindahan sistem senjata, amunisi,

---

<sup>35</sup> James L. Foster, “New Conventional Weapons Technologies: Implications for the Third World”, dalam Uri Ra’anan, Robert L. Pfaltzgraff, Jr., dan Geoffrey Kemp, *Arms Transfer to the Third World: the Military Buildup in Less Industrial Countries*, (Colorado: Westview Press, 1978), hlm.65.

serta peralatan taktis dari satu negara ke negara lainnya. Perpindahan tersebut biasanya dilakukan atas dasar komersil, namun terkadang juga dilakukan secara cuma-cuma melalui bantuan militer. Selain itu, ada pula perdagangan senjata melalui pasar gelap kepada pemberontak, kelompok separatis, dan bentuk paramiliter lainnya. Perdagangan senjata telah meningkat sekitar tiga kalipat antara 1970an dan pertengahan 1980an.<sup>36</sup>

Transfer senjata internasional merupakan transaksi antara negara pemasok dan penerima. Dalam penelitian ini, Cina merupakan negara pemasok dan Sudan merupakan negara penerima. Pemasok menyediakan peralatan militer kepada negara penerima dengan balasan tunai, kredit, barter barang atau bantuan politik/militer (seperti partisipasi dalam aliansi atau bantuan militer). Bergantung dengan kekuatan motif yang terlibat dan sumber daya negara penerima, hubungan ini dapat hanya sementara dan bersifat dangkal namun dapat juga menjadi hubungan yang amat panjang. Kepentingan yang melandasi adanya transfer senjata ini pun akan menjadi bahasan lanjut dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

Transfer senjata merupakan fenomena multifaset, baik dari segi politik maupun militer. Transfer senjata sendiri merupakan pengiriman kapabilitas militer dari satu negara ke negara lainnya. dampaknya terhadap stabilitas regional bisa positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana cara kapabilitas itu ditempatkan (atau tidak ditempatkan) dan reaksi dari aktor regional. Transfer senjata juga memperlihatkan adanya hubungan antara negara pengirim dan penerima, dan hubungan tersebut juga berpengaruh beragam terhadap signifikansi politik mereka.<sup>38</sup>

Seperti halnya konsep HI lainnya, hubungan bilateral dalam perdagangan senjata dibentuk dan dipengaruhi oleh pembangunan dalam sistem internasional secara keseluruhan. Perkembangan dalam sistem internasional mempengaruhi arah dan jumlah dari transfer senjata tersebut. Dalam periode polarisasi internasional,

---

<sup>36</sup> Thomas M. Leonard, *Encyclopedia of the developing world*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 88-89

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> David Kinsella, "Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict", dalam *Journal of Peace Research*, Vol. 35, No. 1 (Jan., 1998), hlm.7

seperti pada era Perang Dingin, penerima akan bersekutu dengan pemasok utama dengan menggantungkan situasi geopolitik dan preferensi ideologi mereka. Dengan berakhirnya polarisasi tersebut, negara penerima senjata akan lebih memilih dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan senjatanya.<sup>39</sup>

Para ilmuwan telah mengklasifikasikan sistem transfer senjata saat ini sebagai sistem yang multipolar dan aliansi hegemoni semakin berkurang. Negara-negara klien tidak lagi hanya bergantung pada salah satu *superpowers* untuk mendapatkan senjata. Meski AS tetap merupakan negara pemasok senjata yang dominan, namun negara-negara pemasok senjata baru mulai bermunculan. Setidaknya saat ini diperkirakan ada 1.300 perusahaan senjata yang tersebar di hampir 100 negara. SIPRI pun mendukung klaim tersebut dengan menyebutkan beberapa negara pengeksport senjata baru seperti Israel, Singapura, Belanda, dan Cina. Tidak seperti *major powers* yang lebih sensitif jika dikaitkan dengan konflik lokal ataupun regional, negara-negara pemasok senjata tingkat kedua ini tidak begitu ketat dalam hal pengaturan ekspor di mana mereka lebih terbuka untuk menjual senjatanya kepada negara yang sedang berkonflik. Globalisasi transfer senjata pun menjadikan semakin besarnya akses untuk mendapatkan senjata dan sistem senjata.<sup>40</sup>

### 1.3.2 *Conventional Weapons*

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai senjata jenis konvensional yang ditransfer oleh Cina ke Sudan. Berakhirnya Perang Dingin telah membawa efek buruk, yaitu meningkatnya jumlah konflik bersenjata. Dalam tata dunia yang baru ini, perang etnis, konflik batas wilayah, ketegangan religi, dan kondisi tidak stabil lainnya semakin meningkat. Dengan adanya tren ini, dunia semakin dibanjiri oleh senjata konvensional. Sementara itu, dalam beberapa tahun, dunia justru semakin fokus pada resiko dari proliferasi nuklir. Meski masalah ini pantas untuk mendapatkan fokus tersendiri, namun penting juga untuk diingat bahwa tidak ada senjata nuklir yang digunakan lebih dari setengah abad setelah berakhirnya

---

<sup>39</sup> Thomas M. Leonard, *Op.Cit.*, hlm.89.

<sup>40</sup> Meredith Lauren Blank, *Loc.Cit.*, hlm.18

PD II. Konsekuensi dengan adanya perhatian yang begitu besar terhadap isu nuklir adalah adanya resiko dan bahaya yang tersembunyi yang dihasilkan dari proliferasi senjata konvensional.<sup>41</sup>

Dalam membatasi jenis senjata konvensional yang akan dibahas, penulis akan merujuk pada penggolongan yang dilakukan oleh SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*), di mana senjata konvensional terdiri atas :<sup>42</sup>

1. Pesawat (*aircraft*) : segala pesawat dan helikopter, termasuk pesawat pengintai atau mata-mata tanpa awak, di luar *microlight aircraft*, pesawat layang yang bertenaga ataupun tidak, dan *target drones*.
2. Kendaraan bersenjata (*armoured vehicles*): segala kendaraan dengan perlindungan senjata yang terintegrasi, termasuk berbagai tipe tank, tank penghancur, mobil bersenjata, pengangkut personel bersenjata, kendaraan pendukung bersenjata, dan kendaraan tempur infantri. Hanya kendaraan dengan perlindungan senjata amat ringan (seperti truk dengan senjata yang terintegrasi namun ringan) yang terkecuali.
3. Artileri : *naval, fixed, self-propelled* dan *towed guns, howitzer*, peluncur roket ganda, mortar yang berkaliber sama dengan atau di atas 100 mm.
4. Sensor: (a) seluruh sistem aktif (radar) dan pasif (e.g. *electro-optical*) di darat, laut, dan udara dengan jangkauan setidaknya 25 kilometer, dan tidak termasuk radar cuaca dan navigasi, (b) seluruh radar pengontrol api, terkecuali *range-only radars*, (c) sistem sonar anti kapal selam dan kapal bagi kapal dan helikopter.
5. Sistem pertahanan udara: (a) seluruh sistem misil darat hingga udara (*surface to air missile/SAM*) dan (b) seluruh senjata anti pesawat dengan kaliber lebih dari 40 mm.

<sup>41</sup> Andrew J. Pierre, *Cascade of arms: Managing conventional weapons proliferation*, (Cambridge: The World Peace Foundation, 1997), hlm.1.

<sup>42</sup> SIPRI, "Types of Weapons", diakses dari [http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/data\\_on\\_inter\\_arms\\_trade\\_default/background/coverage/coverage\\_default?searchterm=conventional+ar](http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/data_on_inter_arms_trade_default/background/coverage/coverage_default?searchterm=conventional+ar), pada tanggal 20 Oktober 2009, pukul 18.25 WIB.

6. Misil : seluruh misil dan torpedo yang memiliki hulu ledak konvensional.
7. Kapal : (a) seluruh kapal dengan kapasitas standard 100 ton atau lebih dan (b) seuruh kapal yang dipersenjatai dengan artileri berkaliber 100 mm atau lebih, torpedo atau *guided missiles*, namun tidak termasuk kapal penunda, survey, dan beberapa kapal transport.
8. Mesin : (a) mesin bagi pesawat militer, seperti pesawat tempur, pesawat pendukung dan transport militer, termasuk helikopter; (b) mesin bagi kapal laut tempur seperti *attack craft, corvette, frigate, destroyer, cruiser, aircraft carrier*, dan *submarine*; (c) mesin bagi hampir seluruh kendaraan bersenjata.

Pembahasan terkait dengan transfer senjata konvensional menurut Andrew J. Pierre ini menjadi penting karena :<sup>43</sup>

1. Kekuatan dasar militer dari suatu bangsa sebagian besar terdiri dari senjata konvensional dan senjata inilah yang digunakan dalam konflik. Senjata konvensional merupakan komponen yang penting di dalam perencanaan militer dan pertempuran.
2. Senjata konvensional mengalami perkembangan sehingga menjadi lebih canggih dan mematikan.
3. Sebagai konsekuensi dari teknologi militer, perbedaan tradisional antara senjata konvensional dan senjata pemusnah massal semakin terkikis. Beberapa sistem senjata konvensional memiliki dua fungsi, seperti mampu mengangkut hulu ledak senjata kimia, biologis, dan nuklir atau material lain yang memiliki daya ledak tinggi. Selain itu, dengan semakin besarnya *power* dan keakuratan beberapa senjata konvensional, penempatan mereka di medan pertempuran memiliki tingkat kerusakan yang sama dengan senjata nuklir.
4. Senjata dengan teknologi tingkat tinggi seperti pesawat tempur,

---

<sup>43</sup> Andrew J. Pierre, *Op.Cit.*, hlm. 2-4

teknologi perang elektronik, misil dengan jarak yang jauh dan akurat, kapal selam dan lain sebagainya penggunaannya semakin meluas dan dapat ditemukan di berbagai negara. Para pengamat militer telah memberikan peringatan akan adanya kemungkinan efek bumerang di masa yang akan datang terhadap negara yang memasok senjata tersebut. Tidak saja senjata konvensional semakin mudah untuk didapatkan di dalam pasar senjata internasional, namun beberapa negara juga semakin meningkatkan industri persenjataan mereka. Lebih dari 45 negara yang telah memproduksi sendiri persenjataan mereka dan kebanyakan di antaranya berusaha untuk mengeksport senjatanya dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi dan mendapatkan keuntungan ekonomi.

5. Perdagangan senjata saat ini telah berkembang menjadi *arms bazaar*. Senjata akan semakin mudah untuk didapatkan bagi negara mana saja yang mampu membayar.
6. Adanya akuisisi senjata konvensional dalam level yang tinggi dapat mengganggu kestabilan kawasan.
7. Pembelian senjata akan menghabiskan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Di dalam negara berkembang, anggaran militer biasanya lebih besar dari gabungan pengeluaran bagi kesehatan dan pendidikan.
8. Di dalam negara yang dikuasai oleh rezim otoriter, ada hubungan yang signifikan antara akuisisi senjata dan pelanggaran HAM, terutama digunakan untuk menekan kelompok dan pergerakan domestik yang menekannya.
9. Adanya pertumbuhan yang begitu cepat dalam penggunaan senjata kecil dan ringan di dalam konflik di negara berkembang. Senjata seperti pistol, senapan, senjata mesin, peluncur granat, dan ranjau dapat diperoleh dengan mudah. Senjata-senjata inilah yang sering kali digunakan dalam kuantitas yang besar di berbagai konflik etnis atau

internal. Menurut PBB, senjata ini bertanggung jawab atas 90 persen jumlah kematian di berbagai perang.

10. Dengan semakin meningkatnya aksi terorisme, maka ada alasan yang kuat untuk lebih memperhatikan ketersediaan senjata di dalam pasar gelap dunia.
11. Mempersenjatai suatu kawasan yang sedang terjadi tensi atau potensi konflik, dapat semakin meningkatkan *arms race*. Pola ini telah terjadi di Timur Tengah dan Teluk dan sekarang mulai adanya ketakutan di wilayah lain. Meski demikian di sisi lain ada pula argumen bawa transfer senjata dapat mencegah agresi dan mewujudkan keseimbangan regional dan dengan demikian dapat mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan.
12. Penjualan senjata memiliki potensi dalam menciptakan konflik politik yang serius. Persaingan ekonomi di dalam perdagangan senjata di antara negara produsen pun dapat terjadi.

#### 1.4 Kerangka Teori

##### *Uncertain Rationales for Arms Sales*<sup>44</sup>

Di dalam buku *The Global Politics of Arms Sales*, Andrew J. Pierre memaparkan setidaknya tiga alasan yang mendasari suatu negara untuk melakukan penjualan senjata, yakni pengaruh dan kemampuan mempengaruhi (*influence and leverage*), keamanan dan stabilitas (*security and stability*), serta keuntungan ekonomi (*economic benefits*). Meski demikian, ia juga menyadari bahwa alasan ini seakan bukan alasan yang pasti karena alasan-asalan yang disebutkan tidak selalu mengarah para keuntungan, tetapi juga ada resiko di balik masing-masing alasan.

Alasan politik yang begitu besar dalam transfer senjata adalah pengaruh (*influence*) yang didapatkan oleh negara penyuplai terhadap negara penerima senjata. Senjata merupakan simbol penting dari dukungan dan hubungan pertemanan

---

<sup>44</sup> Andrew J. Pierre, *The Global Politics of Arms Sales*, (New Jersey: Princeton University Press, 1982), hlm.14-24.

sehingga dapat menciptakan pengaruh. Keuntungan politis terpenting dari transfer senjata adalah adanya kemampuan mempengaruhi (*leverage*) terhadap pembuatan kebijakan luar negeri yang sensitif. Hal ini misalnya dilakukan oleh Henry Kissinger ketika menggunakan transfer senjata sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri pada saat konflik Israel-Arab terjadi. Saat itu ia menjanjikan pada Israel senjata baru jika Israel menyetujui Perjanjian Sinai 1975.

Penjelasan lebih jauh mengenai pengaruh dan kemampuan mempengaruhi disampaikan oleh Wheelock yang mendefinisikan pengaruh atau kemampuan mempengaruhi sebagai manipulasi dari hubungan transfer senjata untuk memaksa atau merayu negara penerima agar mengubah atau menyesuaikan kebijakan dan tidakannya seperti sebagaimana yang diinginkan oleh negara penerima. Dengan demikian, negara penerima sebelumnya dianggap bertindak sejalan dengan negara pengirim senjata sehingga negara pengirim berusaha memanipulasi ekspor senjatanya untuk mendorong negara penerima agar mengubah kebijakannya.<sup>45</sup>

Penjualan senjata dapat dijadikan sebagai instrumen yang penting bagi kebijakan luar negeri. Oleh karenanya, transfer senjata ini menjadi hal yang menarik bagi para pembuat kebijakan yang membutuhkan instrumen dalam mengimplementasikan strategi mereka. Meski demikian, nilai politik dari penjualan senjata dalam politik global dianggap terlalu tinggi atau berlebihan. Menciptakan hubungan suplai senjata ini tidak cukup untuk mengokohkan hubungan kedua negara dan justru akan membawa resiko tertentu. Pengaruh yang didapatkan mungkin hanya berlangsung dalam jangka pendek sedangkan kemampuan mempengaruhi akan tergantung pada alternatif yang dimiliki oleh negara penerima. Jika ada penyuplai dari negara lain, maka tingkat kemampuan mempengaruhi akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara penerima yang tidak memiliki pilihan lain.

Mentransfer senjata untuk mencapai tujuan politik bukanlah hal yang berlebihan. Sebagaimana yang sebelumnya terjadi pada era Perang Dingin, negara *superpower* sevara rutin menjual senjatanya ke negara kliennya. Negara *superpower*

---

<sup>45</sup> John Sislis, "Arms as Influence: The Determinants of Successful Influence", dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.38, No.4 (Dec., 1994), hlm. 667.

menggunakan senjata sebagai mekanisme tawar-menawar, karena negara pemasok senjata saat itu jumlahnya amat terbatas. Sebagai contoh, Uni Soviet mentransfer volume senjata yang begitu besar ke Korea Utara saat Perang Korea untuk mengimbangi dukungan AS atas Korea Selatan. Uni Soviet tidak pernah secara langsung bertempur dengan AS, namun tentara Korea Utara menggunakan persenjataan tersebut untuk melawan Korea Selatan dan tentara aliansi AS. Cina mungkin berusaha untuk mencapai tujuannya melalui transfer senjata, seperti yang AS dan Uni Soviet lakukan pada tahun 1950-an hingga 1980-an.<sup>46</sup> Selain itu, pengiriman senjata ke negara lain juga dapat membantu untuk menambah dan memelihara akses kepada pemimpin politik dan militer (transfer senjata AS ke Shah Iran), menyangkal lawan terhadap kesempatan untuk membuat serangan mendadak (penjualan *Hawk SAM* oleh AS ke Jordan di tahun 1975 untuk mengantisipasi usaha Soviet dalam mencapai kesepakatan dengan Amman), atau hasil dalam kebijakan yang spesifik di negara penerima (Mesir dan Israel mencapai kesepakatan dalam perjanjian *Camp David*). Oleh karenanya, usaha untuk mendapatkan kemampuan mempengaruhi terhadap Negara lain melalui pengiriman perlengkapan militer telah memberikan hasil yang berbeda-beda.<sup>47</sup> Alasan tradisional lain dalam memasok senjata adalah membantu memenuhi kebutuhan keamanan dan stabilitas (*security and stability*) bagi negara aliansi atau sahabat. Senjata bagi aliansi biasanya disadari untuk ditransfer dalam konteks menciptakan dan memelihara *balance of power* di kawasan. Namun persepsi satu pihak sebagai keseimbangan, mungkin disadari oleh negara lain sebagai ketidakseimbangan. Resiko dari adanya akuisisi secara kompetitif dapat membawa pada *local arms race*. Hal ini misalnya pernah terlihat di Amerika Latin dan Asia Selatan.

Menurut Leslie H. Gelb, transfer senjata biasanya dilakukan ketika negara pengirim memiliki kepentingan dalam stabilitas internal dari rezim tertentu. Dalam

---

<sup>46</sup> Meredith Lauren Blank, *Loc. Cit.*, hlm. 2

<sup>47</sup> Karl W. Eikenberry, *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*, (Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 1995), hlm.18

banyak kasus, ini biasanya untuk mendukung pemimpin diktator yang represif.<sup>48</sup> Selain itu, adanya kapabilitas senjata yang besar dianggap dapat memberikan efek yang besar terhadap stabilitas militer regional dan situasi keamanan di beberapa tempat di Negara Dunia Ketiga dan dengan demikian dapat mempengaruhi kepentingan negara pengirim senjata di negara-negara tersebut.<sup>49</sup>

Andrew J. Pierre juga menambahkan bahwa kelangkaan energi yang tengah terjadi telah membuat keamanan di daerah-daerah yang kaya akan energi menjadi penting dan hal ini membuat penjualan senjata menjadi alat yang penting bagi negara pengirim untuk mengamankan kepentingannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan *economic benefits* yang dihasilkan dari penjualan senjata ke negara yang kaya akan minyak.<sup>50</sup>

Selain itu, ada pula beberapa beban dan kerugian militer yang harus disadari oleh pemerintah sebelum mengirimkan senjatanya ke luar negeri. Misalnya, ketika senjata mereka telah berada di gudang senjata negara lain, maka negara pengirim akan sulit untuk mengontrol penggunaannya. Perhatian lain yang muncul adalah setiap militer menginginkan adanya prioritas bagi peralatan dan kesiapan dari kekuatan bersenjata. Namun ada resiko ketika terjadi transfer senjata dalam jumlah besar dan justru mengurangi pasokan senjata di negara pengirim itu sendiri. Selain itu, ada bahaya politik di masa yang akan datang dan sulit diprediksi terkait dengan transfer senjata ini. Siapa yang mengira pemimpin seperti Idi Amin atau Qaddafi atau Ayatollah Khomeini dapat naik ke tahta dalam suatu negara yang sedang mendapatkan bantuan senjata dari luar. Selain itu, perubahan di dalam persekutuan dan aliansi tidak dapat diprediksi. Terakhir, harus diperhatikan pula bahwa pasokan senjata dapat membentuk suatu lingkaran kejadian yang mendorong suatu negara untuk berperang. Untuk memasuki perang tentunya merupakan keputusan politis tertinggi yang didasari atas kebijakan luar negeri. Namun selalu

---

<sup>48</sup> Leslie H. Gelb, "Arms Sales", dalam *Foreign Policy*, No. 25 (Winter, 1976-1977), hlm.14

<sup>49</sup> Richard A. Bitzinger, "Arms to Go: Chinese Arms Sales to the Third World", dalam *International Security*, Vol. 17, No. 2 (Autumn, 1992), hlm. 84.

<sup>50</sup> Andrew J. Pierre, "Arms Sales: The New Diplomacy", dalam *Foreign Affairs*, Vol.60, No.2 (Winter, 1981), hlm.270.

ada perlibatan langsung melalui suplai senjata yang mendorong pembentukan hubungan pemasok secara paralel di sisi lain, dan oleh karenanya menciptakan kompetisi senjata yang menjadi isu *political will* atau negara pemasok merasa harus berpartisipasi secara langsung karena ia tidak dapat membiarkan partner dagangnya dikalahkan.

Alasan ketiga diadakannya transfer senjata adalah keuntungan ekonomi. Penjualan senjata telah disadari sebagai sumber devisa penting dan penghasil *balance of payment*. Penjualan senjata juga dapat menjadi penciptaan lapangan kerja dalam industri pertahanan di negara pengirim. Ekspor senjata juga dilihat sebagai jalan yang baik dalam menciptakan skala ekonomi sehingga dapat mengurangi biaya senjata per-unitnya untuk dibuat bagi kekuatan bersenjata di negara asal. Ekspor juga menjadi jalan untuk menyebarkan atau mengganti biaya penelitian dan pengembangan. Di sisi lain, pentingnya alasan ekonomi di dalam penjualan senjata ternyata tidak sebesar kenyataannya. Adanya persepsi bahwa angka penjualan senjata yang tinggi akan berdampak besar bagi ekonomi negara pemasok tidak begitu jelas dan lebih bertumpu pada wacana umum daripada data sebenarnya. Keuntungan ekonomi lebih sedikit daripada yang diasumsikan terutama ketika terjadi pembatasan penjualan senjata yang mengakibatkan dampak pada ekonomi yang lebih kecil.

### 1.5 Operasionalisasi Konsep dan Hipotesis

Dengan menggunakan teori *Uncertain Rationales for Arms Sales* dari Andrew J. Pierre, maka teori tersebut akan dioperasionalkan sebagai berikut:

Variabel		Kategori	Indikator
Dependen	Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan	Naik	Total Penjualan Senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004-2005 dan 2006-2008
		Turun	
Independen	Pengaruh dan	Besar	Kebijakan luar

	Kemampuan Mempengaruhi	Kecil	negeri, keamanan, dan keamanan energi Cina yang diarahkan khusus kepada Sudan pada tahun 2004-2005 dan 2006-2008.
	Keamanan dan Stabilitas	Aman - Stabil	Perkembangan dan stabilitas rezim Khartoum pada tahun 2004-2005 dan 2006-2008.
		Tidak Aman – Tidak Stabil	
	Keuntungan Ekonomi	Besar	Jumlah keuntungan ekonomi yang diperoleh Cina di Sudan dilihat dari nilai investasi dan keuntungan yang diperoleh Cina dari pasokan minyak Sudan.
		Kecil	

Dari tabel operasionalisasi diatas, terbangun proporsi-proporsi sebagai berikut:

1. Jika pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri, Keamanan, dan Keamanan Energi terhadap suatu negara besar, maka transfer senjata dari negara lain ke negara tersebut tinggi.
2. Jika kondisi domestik suatu negara aman dan stabil, maka transfer senjata dari negara lain ke negara tersebut tinggi.
3. Jika keuntungan ekonomi yang ditawarkan besar, maka transfer

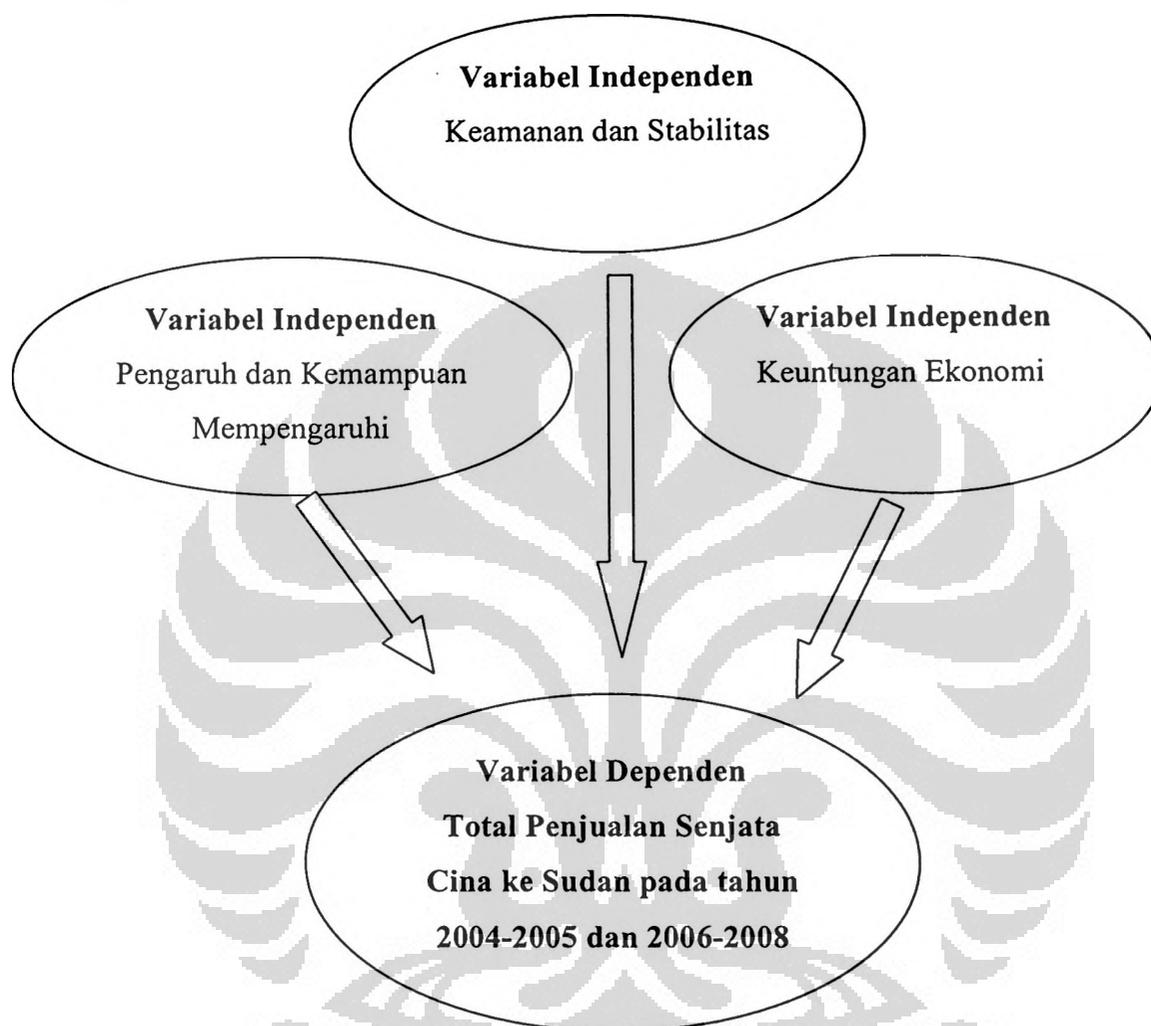
senjata dari negara lain ke negara tersebut tinggi.

4. Jika pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri, Keamanan, dan Keamanan Energi terhadap suatu negara kecil maka transfer senjata dari negara lain ke negara tersebut rendah.
5. Jika kondisi domestik suatu negara tidak aman dan tidak stabil, maka transfer senjata dari negara lain ke negara tersebut rendah.
6. Jika keuntungan ekonomi yang ditawarkan kecil, maka transfer senjata dari negara lain ke negara tersebut rendah.

Dengan memerhatikan proporsi-proporsi diatas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pada tahun 2004-2005, transfer senjata Cina ke Sudan tinggi disebabkan oleh:
  - a. Cina sangat mampu memberikan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi yang besar kepada Sudan melalui kebijakan-kebijakannya
  - b. Kondisi domestik Sudan aman dan stabil
  - c. Keuntungan ekonomi yang ditawarkan amatlah besar
2. Pada tahun 2006-2008, transfer senjata Cina ke Sudan rendah disebabkan oleh:
  - a. Cina kurang mampu memberikan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi kepada Sudan melalui kebijakan-kebijakannya
  - b. Kondisi domestik Sudan tidak aman dan tidak stabil
  - c. Keuntungan ekonomi yang ditawarkan terbilang kecil

## 1.6 Model Analisis



## 1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk membahas dan menjawab permasalahan tentang faktor-faktor pendorong Cina dalam transfer senjata konvensional ke Sudan pada periode 2004-2005 dan 2006-2008. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan mencoba memaparkan faktor-faktor yang mendorong Cina dalam transfer senjata dan kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut melalui teori yang ada. Teori dalam hal ini digunakan sebagai lensa analisa dan merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan dan menjelaskan suatu fenomena dengan

menspesifikkan hubungan antarvariabel.<sup>51</sup> Sedangkan konsep adalah abstraksi atau pernyataan yang terbentuk sebagai akibat generalisasi hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian tersebut dihasilkan beberapa hipotesis (dugaan awal) yang diturunkan dari variabel yang terdapat dalam kerangka teori. Hipotesis-hipotesis tersebutlah yang akan diuji kebenarannya.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi literatur melalui buku, jurnal, serta media cetak dan elektronik lainnya. Data yang kompeten akan dipergunakan dalam pemaparan latar belakang, pembahasan serta untuk menganalisa permasalahan dengan menggunakan teori-teori hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pengkajian strategi.

## 1.8 Pembabakan Skripsi

Skripsi ini dirancang untuk disusun dalam empat bab. Rincian dari pembabakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Permasalahan
- 1.3 Definisi Konseptual
- 1.4 Kerangka Teori
- 1.5 Operasionalisasi Konsep
- 1.6 Model Analisis
- 1.7 Hipotesis
- 1.8 Metodologi Penelitian
- 1.9 Pembabakan Skripsi

### BAB II : PERKEMBANGAN TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN

- 2.1 Transfer Senjata Cina ke Sudan sebelum Tahun 2004 -2005

<sup>51</sup> Betty H. Zisk, *Political Research: A Methodological Sampler*, (Lexington: DC Heath and Company, 1981), hal: 17.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal: 18.

2.2 Transfer Senjata Cina ke Sudan pada Tahun 2004-2005

2.3 Transfer Senjata Cina ke Sudan pada Periode 2006-2008

**BAB III: *UNCERTAIN RATIONALES FOR ARMS SALES* DALAM MENJELASKAN TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN PADA TAHUN 2004-2005 DAN 2006-2008**

3.1 Sejarah Transfer Senjata Cina

3.2 Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.3 Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.4 Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.5 Analisa Variabel Independen

3.5.1 Analisa Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.5.2 Analisa Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.5.3 Analisa Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

3.5.4 Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

**BAB IV: KESIMPULAN**

**1.9 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan deskriptif, di mana berusaha memaparkan serta menjelaskan kepentingan Cina dibalik transfer senjata yang dilakukan terhadap Sudan pada tahun 2004-2005 dan 2006-2008. Faktor-faktor yang mendorong Cina

dalam transfer senjata ini akan dijelaskan melalui teori *uncertain rationales for arms sales* yang dipaparkan oleh Andrew J. Pierre yang kemudian akan dianalisa melalui data-data yang ada untuk menemukan jawabannya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memotret hubungan Cina dengan negara berkembang seperti Sudan, di tengah-tengah usaha Cina untuk merangkul negara-negara berkembang, demi mencapai kepentingannya sebagai *new global power*.

Signifikansi dari penelitian ini terhadap ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang Pengkajian Strategi adalah memberikan pandangan serta analisa mengenai hal-hal yang mendorong transfer senjata oleh Cina terhadap negara-negara berkembang dan memiliki rezim represif seperti Sudan. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di dalam kajian transfer atau penjualan senjata konvensional yang saat ini pembahasannya lebih 'marjinal' jika dibandingkan dengan transfer senjata nuklir atau senjata non-konvensional lainnya.

## BAB II

### PERKEMBANGAN TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN

#### 2.1 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 1998-2003

Data mengenai jangkauan serta jumlah ekspor senjata konvensional Cina – termasuk tank, kendaraan lapis baja, misil, dan jet tempur- sulit untuk diketahui secara pasti karena Cina telah berhenti melaporkan data mengenai ekspor senjatanya ke dalam *UN Register of Conventional Arms (UNROCA)* sejak 1997 dengan alasan adanya ekspor senjata dari AS ke Taiwan.<sup>53</sup> Cina merupakan satu-satunya negara pengeksport senjata besar yang belum masuk ke dalam *multilateral agreement* yang mengatur tentang kriteria, termasuk penghormatan kepada HAM, yang berguna dalam izin ekspor senjata. Kebanyakan perusahaan yang terlibat di dalam perdagangan senjata dibentuk di bawah kontrol *PLA (People's Liberation Army)* ataupun polisi. Aliran senjata lebih banyak diarahkan kepada negara yang cenderung menggunakan senjata tersebut untuk pelanggaran HAM.<sup>54</sup> Atas alasan tersebut, penulis berusaha untuk mendapatkan data-data mengenai transfer senjata Cina ke Sudan melalui beberapa sumber, seperti *SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)*, *NISAT (Norwegian Initiative on Small Arms Transfers)*, maupun *UN Comtrade (Commodity Trade)*. Data yang didapatkan di dalam *NISAT* tidak jauh berbeda dengan data yang didapatkan dari *UN Comtrade* karena pada dasarnya *NISAT* menggunakan basis data yang diperoleh dari *UN Comtrade*. Di sisi lain, data yang didapatkan dari *SIPRI* cukup berbeda dengan keduanya. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan data yang diolah dari *NISAT* dan *UN Comtrade* sebagai data utama dan data dari *SIPRI* digunakan untuk melengkapi data yang ada.

Kehadiran formal pertama Cina di Afrika dimulai pada tahun 1955 dan sejak itu Cina menjadi aktor besar dengan kepentingan vital di benua tersebut. Interaksi Cina-Afrika terbesar terjadi pada 1960-1965 dengan adanya dekolonisasi Afrika

---

<sup>53</sup> Amnesty International, "China: Sustaining conflict and human right abuses: The flow of arms continues", diakses dari [www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/030/2006](http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/030/2006), pada tanggal 1 Maret 2010, pukul 10.20 WIB.

<sup>54</sup> *Ibid.*

dan konflik antara Cina-Soviet. Pada tahun 1965-1970 interaksi Cina-Afrika beriringan dengan Revolusi Kebudayaan Cina. Ada beberapa komponen penting dalam peranan Cina di Afrika, yakni *superpower* dan kebijakan Negara Dunia Ketiga Cina. Cina telah menekankan perjuangan melawan *superpower*, AS dan Soviet, dengan berpihak pada negara Dunia Ketiga untuk melawan mereka. Maka tidak ada keraguan bahwa Afrika berada pada posisi yang sentral di dalam kebijakan luar negeri Cina saat itu.<sup>55</sup>

Meski telah lama memiliki keterlibatan di Afrika, namun saat ini keterlibatan Cina di Afrika berada di level yang berbeda. Awalnya, intensi Cina di Afrika hanya kepentingan diplomatik untuk melawan pengakuan terhadap Taiwan dan mendongkrak jumlah voting di dalam PBB untuk menolak keanggotaan Taiwan. Tujuan Cina lainnya adalah tidak hanya berkompetisi dengan pengaruh Barat, tetapi juga Rusia. Keterlibatan dan pengaruh Cina mulai menurun di tahun 1980an karena tidak mampu bersaing dengan program bantuan dari Barat dan semakin tidak takut dengan kehadiran Taiwan (meski mengurangi pengakuan terhadap Taiwan tetap penting bagi Cina). Yang telah berubah dalam beberapa tahun belakangan adalah kemunculan Cina sebagai pemain yang penting dalam ekonomi dunia dan kebutuhannya bagi minyak serta sumber daya alam lainnya. Cina kembali ke Afrika pada abad 21 tidak hanya dengan kebutuhannya akan sumber daya alam tetapi juga dengan dana yang membuatnya dapat bermain secara kompetitif.<sup>56</sup>

Lebih jauh, sebagai *rising world power*, Cina semakin aktif mencari sekutu. Cina membutuhkan jumlah suara di dalam PBB dan forum lainnya agar dapat membuat celah antara kebijakan luar negeri konvensional di Barat dan kebijakan konvensional di Selatan. Afrika sendiri berusaha mencari sekutu bagi kondisi perekonomian mereka dan apapun fleksibilitas yang bisa mereka dapatkan dari *great powers*. Cina menggunakan berbagai cara untuk melakukan hal ini termasuk melalui

<sup>55</sup> George T. Yu, "China's Role in Africa", hlm.96 dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 432, African in Transition (Jul., 1977)

<sup>56</sup> Princeton Lyman, "China's Rising Role in Africa", hlm.1 diakses dari [http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/written\\_testimonies/05\\_07\\_21\\_22wrts/lyman\\_princeton\\_wrts.pdf](http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/written_testimonies/05_07_21_22wrts/lyman_princeton_wrts.pdf) pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 16.20 WIB

diplomasi tradisonal, diplomasi komersial, diplomasi publik serta *soft power*.<sup>57</sup> Oleh karenanya, masuknya Cina ke Sudan setelah kepergian perusahaan-perusahaan minyak dari Barat membawa satu paket yang lengkap yakni uang, ahli teknis, dan pengaruh di dalam DK PBB untuk melindungi Sudan dari sanksi internasional atas aliran senjata yang terus berdatangan dan kekerasan yang terus terjadi di Darfur. Selain berusaha melindungi kliennya dari sanksi internasional, Cina juga tidak menerapkan syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan pemerintahan –hal yang cukup berbeda dengan negara-negara Barat.<sup>58</sup>

Afrika, khususnya kawasan Sub-Sahara Afrika, merupakan kawasan rawan konflik internal dan konflik di sekitar daerah perbatasan, seperti yang saat ini masih terjadi di Darfur, Sudan. Konflik tersebut terus berlangsung dan diperparah dengan aliran senjata konvensional yang terus beredar, khususnya yang berasal dari Cina. Sejarah hubungan transfer senjata antara Cina dan Sudan sebenarnya telah terjalin sejak lama, jauh sebelum cadangan minyak Sudan menjadi penting bagi Cina. Dari akhir 1960an, Cina sudah mulai menjual jet tempur Mig-17 kepada Khartoum. Hubungan Cina dan Sudan dalam hal transfer senjata pun terus berlangsung di tahun 1970an dan 1980an.<sup>59</sup> Jenis persenjataan yang dikirimkan juga semakin beragam, terlihat dari pengiriman senjata Cina ke Sudan pada kepemimpinan Sadiq al-Mahd (1986-1989) yang telah meliputi amunisi, bom tingkat tinggi, tank, truk militer, helikopter, dan pesawat tempur.<sup>60</sup> Menurut peneliti Inggris di tahun 1991, sebagai contoh, Cina mengirim persenjataan senilai 300 juta dolar ke Sudan, termasuk pengiriman 500 kilogram bom tingkat tinggi serta pengiriman tim pelatih dari *PLA* untuk melatih pilot Sudan dalam menggunakan munisi yang membawa efek mematikan baik bagi *SPLA (Sudan People's Liberation Army)* dan target sipil di Sudan Selatan saat terjadinya perang sipil antara Utara-Selatan selama akhir tahun

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>59</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", hlm.11 diakses dari <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>, pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 13.15 WIB

<sup>60</sup> \_\_\_\_, "China-Sudan Briefing Paper", hlm.2, diakses dari [www.darfuraustralia.org/files/China\\_briefing\\_paper.pdf](http://www.darfuraustralia.org/files/China_briefing_paper.pdf), pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 17.30 WIB.

1990an.<sup>61</sup> Pada perkembangannya, Cina mulai menjadi pemasok senjata utama bagi Sudan di tahun 1994. Hal ini terutama dikarenakan Cina mampu menyediakan persenjataan yang Sudan butuhkan dan Cina tidak mengajukan persyaratan tertentu kepada Sudan. Selain itu, persenjataan yang dijual Cina relatif murah dan kebanyakan persenjataan yang dibeli Sudan dari Cina merupakan stok lama.<sup>62</sup> Cina kemudian dalam perkembangannya menjadi penyedia senjata utama bagi Sudan dengan menyediakan berbagai macam senjata dan perlengkapan militer dari 122 mm howitzer, truk bersenjata, tank T-59, pesawat tempur Shenyang J-8 hingga jet tempur supersonik F-7.<sup>63</sup>

Menurut data *UN Comtrade*, setidaknya ada 34 negara yang mengekspor senjata kecil-ringan beserta amunisinya ke Sudan dengan nilai hampir 70 juta dolar antara tahun 1992-2005. Namun sebagian besar dari senjata tersebut atau sekitar 72 persen berasal dari Cina. Meski demikian, nilai perdagangan legal diperkirakan lebih tinggi dari jumlah yang dilaporkan.<sup>64</sup> Di sisi lain, saat ini diperkirakan ada sekitar 1,9-3,2 juta senjata kecil dan ringan yang beredar di Sudan. Dua per tiga dari jumlah tersebut beredar di kalangan rakyat sipil yang di antaranya juga disokong oleh pemerintah, 20 persen oleh Pemerintah Sudan dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Sudan Bagian Selatan serta kelompok bersenjata.<sup>65</sup>

Peningkatan belanja militer Khartoum sendiri dimulai pada tahun 1999, tahun di mana ekspor minyak pertama kali mengalir dari negara tersebut dan ketika pendapatan minyak dari Cina semakin memperkaya pemerintah Sudan. Belanja militer ini terus meningkat lebih dari enam kali lipat antara tahun 1997 dan 2000. Pada saat itu, Khartoum sedang menghadapi Perang Utara-Selatan dan terisolasi

---

<sup>61</sup> J. Peter Pham, Ph.D., "Khartoum's Partners in Beijing", diakses dari [www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml](http://www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml), pada tanggal 16 November 2010, pukul 08:35 WIB

<sup>62</sup> \_\_\_\_\_, "Arms Transfers to the Government of Sudan", diakses dari <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-05.htm>, pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 10.35 WIB

<sup>63</sup> J. Peter Pham, "Khartoum's Partners in Beijing", *Loc.Cit.*

<sup>64</sup> Small Arms Survey, "Supply and Demand: Arms Flows and Holdings in Sudan", diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-15-arms-flows-and-holdings-in-Sudan.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 16.20 WIB

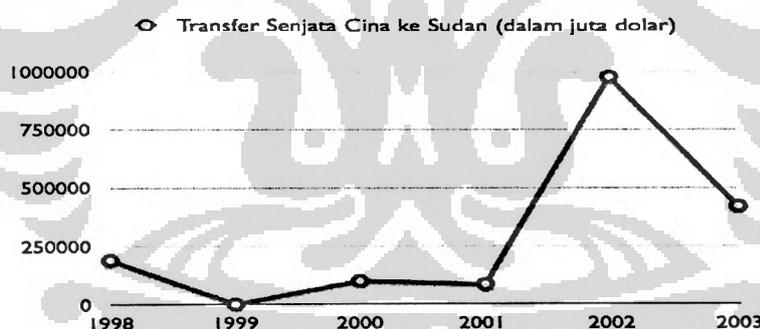
<sup>65</sup> Small Arms Survey, "The Militarization of Sudan: A Preliminary Review of Arms Flows and Holdings", dalam *Sudan Issue Brief*, No.6, April 2007

	Senapan Angin/Senapan Berburu	242	US\$ 97.436	
	Suku Cadang dan Aksesoris		US\$ 845.903	<b>US\$ 978.166</b>
2003	Suku Cadang dan Aksesoris Senjata Militer	1	US\$ 420.438	<b>US\$ 420.438</b>
	<b>Total</b>			<b>US\$ 1.848.886</b>

Data diolah dari *UN Comtrade* (<http://comtrade.un.org/db/>) dan *NISAT* ([http://balder.prio.no:8080/PublicQuery\\_SQL.aspx](http://balder.prio.no:8080/PublicQuery_SQL.aspx))

Jika ditunjukkan ke dalam grafik, maka dapat terlihat bahwa dalam periode ini transfer senjata Cina ke Sudan cenderung rendah pada tahun 1999-2001, mengalami peningkatan di tahun 2002 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2003.

**Gambar 2.1 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 1998-2003**



Data diolah dari *UN Comtrade* (<http://comtrade.un.org/db/>) dan *NISAT* ([http://balder.prio.no:8080/PublicQuery\\_SQL.aspx](http://balder.prio.no:8080/PublicQuery_SQL.aspx))

Data yang didapatkan dari *SIPRI* memperlihatkan bahwa pada tahun 1998-2003 ada beberapa transfer senjata konvensional yang dilakukan oleh Cina terhadap Sudan. Untuk lebih jelasnya, transfer senjata tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan  
Tahun 1998-2003 (SIPRI)**

Tahun	Jumlah Ekspor Senjata Konvensional
2002	10 tank tempur tipe 85 IIM
	12 pesawat tempur A-5C Fantan
2003	10 APCs ( <i>armoured personnel carriers</i> ) tipe WZ-551

Sumber: SIPRI ([http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade\\_register.php](http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php)) dan UN Register on Conventional Arms

Dari paparan data di atas, terdapat perbedaan di mana data yang dimiliki *UN Comtrade* memperlihatkan bahwa pada tahun 2002 dan 2003 hanya terdapat transfer senjata kecil dan ringan dari Cina ke Sudan, sedangkan data yang dimiliki *SIPRI* memperlihatkan bahwa ada pembelian tank, jet tempur, serta *APCs*. Oleh karenanya, nilai transfer senjata Cina ke Sudan kemungkinan lebih tinggi dari jumlah yang dilaporkan *UN Comtrade* meski jika dilihat dari data yang dimiliki *SIPRI*, jumlah transfer senjata di tahun 2002 memang lebih banyak dari pada tahun 2003.

Transfer senjata Cina ke Sudan pada periode ini memang belum memasuki tahapan di mana PBB menetapkan embargo senjata bagi Sudan. Namun dari jenis senjata yang Sudan dapatkan dari Cina, dapat terlihat bahwa senjata tersebut digunakan untuk tujuan ofensif, seperti halnya *main battle tank* tipe 85IIM yang diperkenalkan oleh Cina pada tahun 1990an ke pasar ekspor dan pertama kali terlihat di Sudan pada tahun 2007.<sup>70</sup> Kendaraan berat militer seperti tank dan *APCs* yang pemerintah Sudan gunakan di Darfur dirancang sepenuhnya untuk tujuan militer dan keamanan serta memiliki fasilitas untuk menggunakan senjata mesin dan senapan. Atas fungsi tersebut, pemerintah Sudan secara aktif mengimpor kendaraan militer jenis ini. Bukti dari transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2003 dapat terlihat pada bulan Maret 2007 di mana enam *APCs* milik pemerintah Sudan terlihat berada

<sup>70</sup> Mike Lewis, "Skirting the Law: Sudan's Post-CPA Arms Flows", diakses dari [http://www.humansecuritygateway.com/documents/SAS\\_SudansPostCPAArmsFlows.pdf](http://www.humansecuritygateway.com/documents/SAS_SudansPostCPAArmsFlows.pdf), pada tanggal 23 April 2010, pukul 23:30 WIB

di Nyala, ibu kota Darfur Selatan. APCs tersebut kemudian ditempatkan di Darfur dan digunakan dalam penyerangan terhadap warga sipil maupun pemberontak.<sup>71</sup>

Selain transfer kendaraan lapis baja, Sudan juga membeli jet penyerang “Fantan” pada tahun 2002. Hal ini terbukti dengan laporan *UN Panel Experts* mengenai kedatangan tiga jet penyerang A-5 “Fantan” di Darfur Selatan pada Januari 2007. Pesawat tersebut diproduksi oleh pabrik *Nanchang* di Cina dan dikirim ke Khartoum pada tahun 2006. Pemerintah Sudan mengklaim bahwa pesawat tersebut digunakan untuk melindungi perbatasan negara, meski pada dasarnya pesawat tersebut diciptakan untuk serangan udara ke darat dan bukan merupakan pesawat yang dirancang untuk pertempuran di udara. Pesawat itu hingga laporan tersebut ditulis (tahun 2008) masih terus beroperasi di Darfur dan dari bukti gambar yang ada memperlihatkan bahwa jet Fantan telah dilengkapi dengan 90mm roket udara-darat. Dokumenter *BBC* yang diudarakan pada Juli 2008 memperlihatkan bahwa jet A-5 atau Fantan kemungkinan besar digunakan dalam serangan terhadap sipil pada Februari 2008.<sup>72</sup> *Amnesty International* juga melaporkan bahwa pemerintah Sudan mengirimkan persenjataan dan pesawat yang didapatkan dari Cina ke Darfur dan kemudian digunakan oleh tentara Sudan dan Janjawid (milisi bersenjata yang didukung oleh pemerintah Sudan) untuk melakukan pembersihan etnis terhadap kawasan yang didominasi oleh komunitas petani Afrika.<sup>73</sup>

## 2.2 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 2004-2005

Sejak 2004, tahun di mana pertama kali PBB menetapkan embargo transfer senjata ke Darfur yang mengikat seluruh negara anggota termasuk Cina, Cina justru

<sup>71</sup> *Amnesty International*, “Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur”, hlm.7, diakses dari <http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGAFR540192007&lang=e>, pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 23.45 WIB.

<sup>72</sup> Human Rights First, “A Three-Step Guide to Strengthening the Darfur Arms Embargo: Targeting the Arms Supply Chain”, diakses dari [www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf), pada tanggal 22 November 2010, pukul 20:55 WIB

<sup>73</sup> Sam Knight, “China Denies Selling Weapons for Use in Darfur”, diakses dari [www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article1762733.ece](http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article1762733.ece), pada tanggal 21 November 22 2010, pukul 22:05 WIB

telah menjadi penyedia senjata konvensional terbesar bagi Sudan.<sup>74</sup> Embargo senjata PBB saat itu hanya ditujukan untuk seluruh entitas non-pemerintah, individu dan kepada seluruh aktor (termasuk Janjawid, kelompok milisi lainnya serta kelompok oposisi bersenjata –*Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*).<sup>75</sup> Dalam paragraf 7 dan 8 Resolusi 1556 pada 30 Juli 2004, DK PBB memutuskan:<sup>76</sup>

*“that all states shall take the necessary measures to prevent the sale or supply, to all non- governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories”*

Hal tersebut juga termasuk bantuan dan latihan teknis yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan di atas.

Dalam embargo senjata tahun 2004, pemerintah Sudan bukan merupakan salah satu pihak yang terkena dampak embargo meski pemerintah Sudan juga aktif dalam melakukan serangan di Darfur dan melakukan proliferasi senjata terhadap milisi Janjawid. Oleh karenanya, pemerintah Sudan masih dapat menerima senjata dari luar wilayahnya, khususnya dari Cina. Dan dengan adanya embargo senjata tersebut, Cina merupakan penyedia senjata kecil yang eksklusif bagi Sudan dengan mengirimkan hampir 90 persen dari jumlah pembelian senjata Khartoum tiap tahunnya.<sup>77</sup>

Penjualan senjata dan peralatan militer Cina ke Sudan sejak 2004 semakin ekstensif dan para pengamat lapangan di Darfur telah melaporkan melihat

<sup>74</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *Loc. Cit.*, hlm.11

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.13

<sup>76</sup> \_\_\_\_\_, “UN Security Council Resolution 1556 on the Situation in Sudan”, diakses dari [http://www.fcni.org/issues/item.php?item\\_id=992&issue\\_id=104](http://www.fcni.org/issues/item.php?item_id=992&issue_id=104), pada tanggal 16 April 2010, pukul 12:05 WIB.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. ii

persenjataan Cina, seperti peluncur granat, amunisi senapan, dan senjata mesin berat. Meski Cina mengaku bahwa mereka terus melakukan perdagangan senjata dengan Sudan dalam keadaan embargo, namun mereka menyampaikan bahwa transfer senjata yang dilakukan tidak besar dan tidak berakhir di Darfur karena transfer senjata tersebut ditujukan bagi pemerintah Sudan.<sup>78</sup> Meski Cina menyangkal telah mempersenjatai Sudan dalam memperparah kondisi di Darfur, laporan yang dikeluarkan oleh *Amnesty International* di bawah ini memperlihatkan bahwa transfer senjata Cina ke Sudan mencapai lebih dari 11 juta dolar hanya pada tahun 2004. Data lain dari *UN Comtrade* bahkan memperlihatkan transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004 telah mencapai 16 juta dolar. Meski angka pasti dari transfer senjata tersebut sulit diketahui, namun terlihat adanya peningkatan transfer senjata Cina ke Sudan yang signifikan dari periode sebelumnya (1998-2003) yang hanya sekitar ribuan hingga ratusan ribu dolar Amerika per tahunnya.

**Tabel 2.3 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2004 (*Amnesty International*)**

Tahun	Tipe Senjata	Nilai Perdagangan atau Jumlah Barang
2004	Tank dan kendaraan lapis baja bersenjata	US\$ 3.061.414
	Senjata militer selain senjata tangan, pedang, dan lain-lain	US\$ 1.015.973
	Senjata militer selain senjata tangan, pedang, dan lain-lain	US\$ 3.288.973
	Senapan dan pistol	US\$ 172.543

<sup>78</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", diakses dari <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>, pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 13.15 WIB

	Suku cadang dan aksesoris senjata	US\$ 3.798.843
	Peralatan untuk perang, amunisi, dan suku cadang	US\$ 16.321
<b>Total</b>		<b>US\$ 11.337.746</b>

Sumber: Eric Reeves, "China's Propaganda Campaign Can't Obscure Complicity in Darfur Genocide", diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article26260>, pada tanggal 1 Juni 2010 pukul 11.00 WIB.

Aliran senjata Cina yang terus masuk ke Sudan menurut Cina tidak melanggar embargo karena sesuai dengan interpretasi *Sanctions Committee* PBB yang mengawasi pelaksanaan embargo, menganggap bahwa resolusi DK PBB hanya berlaku bagi kawasan Darfur, sementara transfer senjata diperbolehkan di luar Darfur. Hal ini memungkinkan Cina untuk secara legal mengekspor senjatanya ke Khartoum meski laporan PBB memperlihatkan bahwa Khartoum mentransfer pesawat penyerang Fantan, APC, dan senjata kecil beserta amunisi kepada tentara dan milisinya di Darfur tanpa mendapat izin dari komite sanksi PBB. Meski Sudan juga terikat dalam embargo senjata tersebut dan tidak diperkenankan untuk mentransfer senjata kepada milisi yang ada di Darfur, Khartoum secara terbuka menolak untuk mematuhi embargo senjata karena menganggap bahwa mereka memiliki hak berdaulat untuk mentransfer senjata ke Darfur atau ke wilayah manapun di negaranya.<sup>79</sup>

Persenjataan yang Sudan miliki pada umumnya dibeli oleh Angkatan Bersenjata Sudan, lalu sistem persenjataan tersebut digunakan oleh tentara, kemudian didistribusikan ke pasukan keamanan seperti *PDF (Popular Defense Forces – kekuatan paramiliter dan termasuk milisi Janjawid)*, *Border Intelligence Guards* dan *Central Reserve Police*, hingga dapat beredar ke tangan ke kelompok non-pemerintah dan kelompok milisi kesukuan, termasuk ke kelompok musuh. Penelitian yang dilakukan oleh *Small Arms Survey* memperlihatkan adanya bukti bahwa senjata kecil dan ringan terbaru, seperti peluncur granat QLZ-87 35mm dan juga amunisi telah

<sup>79</sup> Human Rights First, "The Facts: China's Arms Sales to Sudan", diakses dari [www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=22](http://www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=22), pada tanggal 16 Maret 2010, pukul 20:15 WIB

dijual oleh Cina ke Sudan. Persenjataan tersebut dengan cepat jatuh ke tangan kelompok pemberontak Sudan seperti *JEM* dan juga kelompok pemberontak Chad di mana pemerintah Sudan sedang terlibat dalam *proxy war* dengan negara tetangganya tersebut.<sup>80</sup> Aliran senjata dalam kasus Darfur ini membentuk alur yang sikuler, berpindah dari tangan satu aktor ke aktor lainnya sehingga sulit untuk diawasi.

Sesuai dengan penjelasan saksi mata yang ada di Darfur, Janjawid banyak menggunakan senjata kecil dan ringan dalam melakukan penyerangan. Setelah melakukan penyerangan udara dengan menggunakan jet tempur dan helikopter bersenjata, Janjawid kemudian melakukan penyerangan darat terhadap warga sipil dengan menunggangi kuda atau unta. Dalam serangan kedua tersebut, mereka menggunakan *assault rifles* (senapan serbu), *Doshkas* (senjata anti-pesawat), serta persenjataan lainnya.<sup>81</sup>

Dengan aliran senjata yang terus ditransfer oleh Khartoum ke Darfur dan konflik yang terus berlanjut maka pada Maret 2005, Resolusi 1591 DK PBB memperluas embargo transfer senjata hingga ke kekuatan bersenjata Sudan yang beroperasi di kawasan tersebut. DK PBB memutuskan bahwa isi dari Resolusi 1556 juga berlaku bagi seluruh pihak dalam *N'djamena Ceasefire Agreement* (pemerintah Sudan, *JEM*, dan *SLA*) serta pihak pemberontak lainnya.<sup>82</sup> *Panel of Experts* juga dibentuk untuk mengawasi situasi di Darfur, termasuk pelaksanaan embargo senjata. Meski Cina abstain dalam pengambilan suara terhadap kedua resolusi tersebut, namun Cina tetap terikat dalam embargo di bawah hukum internasional.<sup>83</sup> Sesuai dengan resolusi tersebut, DK PBB telah melarang transfer senjata kepada seluruh kelompok yang terlibat dalam konflik Darfur dan Pemerintah Sudan tidak diperbolehkan untuk mentransfer peralatan militer ke Darfur tanpa adanya

<sup>80</sup> Claire McEvoy, "Powder Keg: Unfettered Arms Flows Reflect Sudan's Instability", diakses dari <http://odin.riresearch.net:42086/@api/deki/files/256/=HSBA-2009-JIR12-Unfettered-arms-flows-reflect-Sudan-instability.pdf>, pada tanggal 20 November 2010, pukul 20:00 WIB

<sup>81</sup> Kevin Ngang Che, "Small Arms and Light Weapons, Africa's True WMDs: The Role of SALW in Conflict and Insecurity in Sub-Saharan Africa", hlm.64, diakses dari [www.aspr.ac.at/epu/research/Che.pdf](http://www.aspr.ac.at/epu/research/Che.pdf), pada tanggal 22 November 2010, pukul 19:00 WIB

<sup>82</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party, *Loc. Cit.*, hlm.87

<sup>83</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc. Cit.*, hlm.14.

persetujuan dari *Sanctions Committee* DK PBB. Meski demikian, pihak yang terlibat dalam konflik terus mendapatkan dan menempatkan senjatanya di Darfur.<sup>84</sup> Salah satu bukti dari pelanggaran embargo dari pemerintah Sudan adalah adanya foto yang memperlihatkan jet tempur Cina, A-5 'Fantan' berada di bandar udara Nyala, Darfur Selatan, antara Januari dan Maret 2007. Pesawat yang secara khusus dirancang untuk digunakan dalam operasi penyerangan darat. Pada awal Maret 2007, jet A-5 'Fantan' yang ketiga terlihat berada di Nyala.<sup>85</sup> Hal tersebut tentunya dapat terjadi karena buruknya sistem dan implementasi hukum kontrol perdagangan senjata dan mekanisme negara pengirim senjata.

Data yang didapatkan dari *UN Comtrade* di bawah ini memperlihatkan bahwa transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2005 telah mencapai 31 juta dolar, sementara sumber lain memaparkan bahwa tahun 2005 pemerintah Sudan telah mencapai kesepakatan dalam paket kerjasama militer dengan Cina. Dengan demikian, Sudan mendapatkan senjata dan amunisi senilai 24 juta dolar, perlengkapan dan suku cadang pesawat senilai 57 juta dolar, serta suku cadang helikopter senilai 2 juta dolar dari Cina.<sup>86</sup> Oleh karenanya, jumlah transfer senjata Cina ke Sudan pada periode 2004-2005 telah meningkat ratusan kali lipat jika dibandingkan dengan periode 1998-2003. Lebih jauh, saat diadakan pertemuan di Beijing, Menteri Pertahanan Cina menyampaikan kepada Kepala Staff Angkatan Bersenjata Sudan bahwa hubungan militer di antara keduanya telah berkembang dengan lancar dan menyatakan kesediaannya untuk membangun kerjasama militer di antara keduanya ke arah yang lebih luas.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", diakses dari [www.amnestyusa.org/pdf/arms\\_bloodcrossroads.pdf](http://www.amnestyusa.org/pdf/arms_bloodcrossroads.pdf), pada tanggal 19 Maret 2010, pukul 15.45 WIB

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>86</sup> Amnesty International, "Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur", *loc.cit.*, hlm.7.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm.7

Tabel 2.4 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2005

Tahun	Tipe Senjata	Nilai Perdagangan atau Jumlah Barang
2005	Tank dan kendaraan lapis baja bersenjata lainnya	US\$ 7.094.565
	Teleskop bagi senjata atau perlengkapan lainnya, periskop	US\$ 6.980
	Senjata militer selain senjata tangan, pedang, dan lain-lain	US\$ 11.153.406
	Senjata (senjata gas atau udara, pegas, tongkat polisi, dan lain-lain)	US\$ 45.495
	Suku cadang dan aksesoris senjata	US\$ 11.862.354
	Peluru senjata udara, suku cadang peluru senapan	US\$ 1.128.848
	Mesiu perang, amunisi, dan suku cadang	US\$ 277.163
	Pedang, pedang pendek, bayonet, lembing, sarung pedang, dan lain-lain	US\$ 156.823
<b>Total</b>		<b>US\$ 31.725.634</b>

Sumber: COMTRADE – Sudan

Tabel 2.5 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2005

Tahun	Tipe Senjata	Nilai Perdagangan atau Jumlah Barang
	Paket kerjasama militer,	\$80.000.000

	termasuk dua penyerang A-5, kendaraan infantri tempur T-92, tank tempur T-96, misil darat ke udara FN-6 dan 12 simulator penerbangan K-8	
	Truk militer Dongfeng model EQ2100E6D dan EQ1093F6D	222 truk
<b>Total (nilai)</b>		<b>\$80.000.000</b>
<b>Total (jumlah barang)</b>		<b>222 truk</b>

Sumber: [http://www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id\\_article=26537](http://www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id_article=26537)

Pada Agustus 2005, *UN Panel*, yang menginvestigasi pelanggaran pada embargo senjata internasional ke Sudan melihat adanya pengiriman truk militer Dong Feng di pelabuhan Sudan. Investigasi tersebut memperlihatkan bahwa ada sebanyak 222 truk militer yang diproduksi oleh *Dongfeng Automobile Import and Export Limited* di Cina, yang juga merupakan pembuat perlengkapan dan kendaraan militer. Penerimaannya adalah Kementerian Keuangan dan Ekonomi Nasional Sudan. Namun dalam laporan selanjutnya diketahui bahwa kendaraan tersebut diterima oleh Kementerian Pertahanan Sudan.<sup>88</sup> Beberapa truk tersebut digunakan untuk menempatkan tentara dan milisi di Darfur dan tentara Sudan telah menggunakan truk militer untuk memfasilitasi serangan di Darfur di saat pelanggaran HAM yang serius terjadi. Oleh karenanya hal ini kembali telah melanggar embargo senjata PBB.<sup>89</sup>

Dari data di atas, diketahui bahwa Cina telah mengirim versi paling baru dari FN-6 (misil darat ke udara) ke Sudan. Hal ini dibuktikan dengan adanya video parade militer saat Hari Kemerdekaan Sudan di tahun 2007. FN-6 merupakan misil darat ke

<sup>88</sup> Eric Reeves, *Loc. Cit.*

<sup>89</sup> Amnesty International, "Blood at The Crossroads", hlm. 95, diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/011/2008/en/19ea0e74-8329-11dd-8e5e-43ea85d15a69/act300112008en.pdf>, pada tanggal 16 Maret 2010, pukul 12.00 WIB

udara milik Cina paling canggih yang telah dikenalkan ke pasar internasional dan video tersebut merupakan bukti pertama bahwa rudal tersebut telah diekspor ke Sudan.<sup>90</sup> Dalam video parade militer tersebut juga diperlihatkan bahwa Sudan telah memiliki generasi terbaru tank tempur T96 dan T59D serta kendaraan tempur infantri beroda T92. Hal tersebut merupakan pertama kalinya bagi Cina untuk mengekspor T92 *IFVs (infantry fighting vehicles)* dan T96 *MBTs (main battle tanks)* ke negara Afrika. Standard teknologi yang dipakai dalam perlengkapan militer tersebut jauh lebih tinggi dari perlengkapan militer lainnya yang pernah diekspor Cina ke Afrika. Senjata-senjata dari Cina yang beredar di Sudan juga termasuk *howitzer* Tipe 54 122-mm, meriam Tipe 59-I 130-mm, senjata roket Tipe 81 122-mm, senjata pertahanan udara Tipe 59 57-mm, mortar dari kaliber yang berbeda, delapan J-6 *fighters* dan beberapa J-7M *fighters*.<sup>91</sup>

Selain itu, foto satelit juga memperlihatkan markas Angkatan Udara Sudan yang dipenuhi oleh dua pesawat penyerang A-5S, satu jet tempur F-7, dan satu pesawat latih K-8. Tentu saja kemungkinan masih ada pesawat lain yang tidak tertangkap dalam gambar tersebut.<sup>92</sup> Pada Februari 2008, dua jet Fantan yang Sudan beli dari Cina pada tahun 2005 digunakan dalam penyerangan udara di daerah Beybey di mana tiga bom besar menewaskan 8 orang sipil, termasuk anak-anak, dan melukai beberapa orang lainnya.<sup>93</sup> Serangan tersebut hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak serangan milisi dan tentara Sudan yang menggunakan jet tempur Fantan. Selain itu, meski sudah ada larangan mengenai bantuan teknis ke Darfur, namun tetap ada bukti yang memperlihatkan tidak hanya penjualan senjata dan jet tempur, tetapi juga bantuan teknisi Cina dan pemeliharaan bagi jet A-5 di Wadi Sayyidna (markas besar Angkatan Udara Sudan) dan Darfur. Penjualan sistem persenjataan pada umumnya memang melibatkan penyediaan suku cadang dan

<sup>90</sup> Andrei Chang, "China Ships More Advanced Weapons to Sudan", diakses dari [http://www.upiasia.com/Security/2008/03/28/china\\_ships\\_more\\_advanced\\_weapons\\_to\\_sudan/6836/](http://www.upiasia.com/Security/2008/03/28/china_ships_more_advanced_weapons_to_sudan/6836/), pada tanggal 16 November 2010, pukul 19:30 WIB

<sup>91</sup> Andrei Chang, "China Sells Arms to Sudan", diakses dari [http://www.upi.com/Business\\_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/](http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/), pada tanggal 17 Maret 2010 pukul 17.10 WIB.

<sup>92</sup> Andrei Chang, "China Ships More Advanced Weapons to Sudan", *Loc.Cit.*

<sup>93</sup> Amnesty International, "Blood at The Crossroads", hlm. 94, *Loc. Cit.*

bantuan teknis sebagai bagian dari kontrak. Hal ini tentunya sudah melanggar embargo karena pemerintah Cina membantu melatih dan memelihara pesawat yang digunakan di Darfur.<sup>94</sup>

Embargo senjata PBB yang diterapkan pada tahun 2004 kemudian diperpanjang tahun 2005, dan terus berlaku hingga saat ini, secara legal telah mencegah seluruh negara anggotanya untuk mentransfer senjata dan peralatan perang ke Darfur. Keengganan Cina untuk menghentikan ekspor senjata dalam keadaan tersebut ke Sudan mengindikasikan adanya suatu signifikansi yang besar dari Khartoum bagi Beijing.<sup>95</sup> Seiring dengan krisis di Darfur yang terus berlangsung dan adanya embargo senjata oleh PBB, transfer senjata Cina ke Sudan justru mencapai titik puncaknya di periode ini. Sebagaimana data yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa transfer senjata militer dan ringan dari Cina ke Sudan bernilai hampir 2 juta dolar di periode 1998-2003 dan meningkat menjadi hampir 100 juta dolar di periode 2004-2005.

### 2.3 Transfer Senjata Cina ke Sudan Tahun 2006-2008

Pada Agustus 2006, *UN Panel of Experts on Darfur* melaporkan bahwa mereka memiliki informasi terpercaya bahwa Pemerintah Sudan terus mendukung milisi Janjawid melalui pemberian senjata dan kendaraan. Milisi bersenjata ini terlihat telah melakukan peningkatan modus operandinya dari kuda, unta, dan AK-47 menjadi *cruiser*, truk bak terbuka, dan granat berpeluncur roket. Akses mereka terhadap amunisi dan senjata sangat jelas dengan adanya kemampuan mereka untuk berkoordinasi dengan kekuatan bersenjata Sudan dalam melakukan penyerangan terhadap pedesaan dan juga dalam konflik bersenjata dengan kelompok pemberontak.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Human Rights First, "A Three-Step Guide to Strengthening the Darfur Arms Embargo: Targeting the Arms Supply Chain", diakses dari [www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf), pada tanggal 22 November 2010, pukul 20:55 WIB

<sup>95</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", hlm.13, diakses dari <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>, pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 13.15 WIB

<sup>96</sup> Eric Reeves, *Loc. Cit.*

Laporan mengenai transfer senjata dan amunisi oleh Cina di tahun 2006 memperlihatkan bahwa 67 persen aliran senjata dan amunisi tersebut diterima oleh pemerintah Sudan. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah impor senjata dari Cina dapat dihubungkan dengan UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*), di mana Cina mengontribusikan personel polisi dan militer. Akan tetapi, senjata-senjata produksi Cina tersebut juga terlihat digunakan oleh tentara Sudan dan milisi yang didukung oleh angkatan bersenjata Sudan pada akhir 2007 hingga pertengahan 2008. Senjata-senjata tersebut termasuk mortir, senjata mesin, senjata antipesawat, granat berpeluncur roket, senapan serbu dan senapan *sniper*. Senjata dan perlengkapan lain yang dimiliki oleh Janjawid yang terlihat di Darfur pada Februari 2008 termasuk gudang mortir, peluncur roket, dan senjata antipesawat yang kebanyakan berasal dari Cina, yang mereka akui merupakan pasokan dari pemerintah Sudan pada Oktober 2007. Selain itu, kelompok oposisi bersenjata Chad yang berbasis di Darfur dan juga mendapatkan dukungan aktif dari Pemerintah Sudan juga menggunakan persenjataan Cina pada November 2007. Hal ini terbukti ketika pada tahun 2006, anggota dari *United Front for Democratic Change* terlihat membawa peluncur granat otomatis buatan Cina tipe QLZ87 di kota El Geneina, bagian barat Darfur, dekat perbatasan Chad.<sup>97</sup> Selain itu, Mohammed Hamdan, salah satu komandan dari kelompok milisi Janjawid dengan memiliki kontrol terhadap hampir sekitar 20.000 pejuang di kawasan yang luas di Selatan Darfur, mengatakan pada awal 2008 bahwa “senjata, mobil, dan semua yang kalian lihat, kami mendapatkannya dari pemerintah. Ada dua tempat yang jatuh ke tangan pemberontak – Um Sidir dan Kiryari (dekat perbatasan Chad) dan ketika kawasan tersebut jatuh, pemerintah Sudan menghubungi kami. Kami telah melakukan pertemuan dengan Presiden sebanyak dua kali. Pada pertemuan di bulan September 2006, mereka memberi kami mobil dan persenjataan dan kemudian kami bergerak ke bagian Utara.” Lalu ia mengatakan bahwa ia dan 20.000 pejuang tersebut membelot dari pemerintah pada Oktober 2007 dan mulai membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak non-Arab yang telah menjadi

---

<sup>97</sup> Amnesty International, “Blood at The Crossroads”, hlm. 91, *Loc. Cit.*

musuh pemerintah.<sup>98</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transfer senjata Cina ke Sudan yang semula hanya ditujukan bagi Khartoum, ditempatkan oleh Khartoum di Darfur melalui tentara dan milisinya, kemudian tersebar hingga ke perbatasan dengan Chad, dan berujung di tangan musuh. Siklus inilah yang semakin memperparah konflik di Darfur dan oleh karenanya, Cina sebagai pemasok senjata utama bagi Khartoum, merupakan pihak yang bertanggung jawab.

Meski dari sumber-sumber yang ada tidak secara langsung dapat mengetahui pelanggaran embargo yang dilakukan Cina atau Sudan menggunakan persenjataan Cina di Darfur atas sepengetahuan Cina. Namun di sisi yang lain, sulit dipahami jika Cina tidak mengetahui mengenai penggunaan senjata tersebut di Darfur oleh angkatan bersenjata Sudan, terutama sejak *UN Panel of Experts* menyampaikan bukti-bukti peredaran senjata Cina dengan foto pada Maret 2007. Dalam banyak kasus, ada sebuah konsensus di mana para penguasa/pejabat Cina yang juga merupakan para eksporter senjata, yang bertugas untuk mencegah senjata-senjata tersebut digunakan dalam kawasan-kawasan yang telah diembargo. Cina dalam hal ini justru tidak mengambil tindakan tertentu untuk mencegah transfer senjata dan terus menjual senjatanya ke Sudan sejak adanya pembentukan *Panel of Experts* dan *the Chairman of the Security Council Committee*.<sup>99</sup>

Meski peredaran senjata Cina terus berlangsung di Darfur, namun berbeda dari periode sebelumnya yang memperlihatkan peningkatan cukup tajam dalam transfer senjata Cina ke Sudan, tabel di bawah ini memperlihatkan penurunan transfer senjata yang cukup drastis pada tahun 2006-2008.

---

<sup>98</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", *Loc. Cit.*, hlm. 87

<sup>99</sup> \_\_\_\_, "China in Sudan: Having It Both Ways", diakses dari [http://www.savedarfur.org/pages/policy\\_paper/briefing\\_paper\\_china\\_in\\_sudan\\_having\\_it\\_both\\_ways/](http://www.savedarfur.org/pages/policy_paper/briefing_paper_china_in_sudan_having_it_both_ways/), pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 15.30 WIB.

Tabel 2.5 Transfer Senjata Konvensional Cina ke Sudan Tahun 2006-2008

Tahun	Tipe Senjata	Nilai Perdagangan atau Jumlah Barang
2006	Tank dan kendaraan lapis baja bersenjata lainnya	\$188
	Teleskop bagi senjata atau perlengkapan lainnya, periskop	\$45.885
	Senjata militer, selain senjata tangan, pedang, dan lain-lain	\$9.106.323
	Senapan dan pistol	\$437.911
	Senjata (senjata gas atau udara, pegas, tongkat polisi, dan lain-lain)	\$1.080.280
	Suku cadang dan aksesoris senjata	\$2.007
	Peluru senjata udara, suku cadang peluru senapan	\$915.329
	Pedang, pedang pendek, bayonet, lembing, sarung pedang, dan lain-lain	\$1.092
2007	Misil FN-6	
<b>Total</b>		<b>\$11.590.107</b>

Sumber: COMTRADE – Sudan

Tabel 2.6 Jumlah Senjata yang diterima Sudan dari Cina

Tahun	Jumlah Ekspor Senjata Konvensional
2006	\$9.546.241
2007	\$5.976.229

2008	\$102.902
<b>Total</b>	<b>\$15.625.372</b>

Sumber: COMTRADE

Penurunan jumlah transfer senjata Cina ke Sudan pada periode 2006-2008 setelah mencapai titik kulminasinya di periode 2004-2005 membawa pertanyaan tersendiri, mengapa transfer senjata Cina ke Sudan pada periode tertentu dapat begitu tinggi dan menjadi turun drastis pada periode setelahnya. Oleh karenanya, penjelasan lanjut mengenai hal ini diperlukan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan.



**BAB III**  
**UNCERTAIN RATIONALES FOR ARMS SALES DALAM MENJELASKAN**  
**TRANSFER SENJATA CINA KE SUDAN**  
**PADA TAHUN 2004-2005 DAN 2006-2008**

**3.1 Sejarah Transfer Senjata Cina**

Republik Rakyat Cina terbentuk pada 1 Oktober 1949 di saat perekonomian sedang lemah karena inflasi dan pecahnya perang. Namun pada perkembangannya, di tahun 1952 Cina mampu membentuk *Ministry of Machine Building* (MMB) yang fokus pada alat-alat dan perlengkapan militer hingga membuat kapabilitas produksi senjata dalam negeri Cina mulai berkembang. Adanya bantuan keuangan dan teknis dari Uni Soviet memungkinkan Cina untuk membangun fasilitas produksi bagi pesawat, kapal, perlengkapan elektronik dan persenjataan darat. Kebangkitan Cina dari kemunduran industri disebabkan oleh adanya *Great Leap Forward* yang dicetuskan oleh Mao Zedong (1958-1960) dan mundurnya Uni Soviet sebagai penasehat dan pemberi bantuan di tahun 1960 yang membuat industri pembangunan mesin direorganisasi. Di tahun 1965, enam MMB telah dibentuk untuk mengawasi produksi pertahanan seperti senjata nuklir, pesawat dan *air-to-air missiles (AAMs)*, elektronik, artileri, pembuatan kapal, dan rudal balistik. Industri militer Cina telah mampu untuk memproduksi pesawat tempur, tank, APCs, artileri, kapal kecil, yang kebanyakan meniru model persenjataan Soviet di pertengahan 1950an. Sejak detik itu, di samping adanya turbulensi ekonomi yang dialami saat *Great Proletarian Cultural Revolution* (1966-1976), Cina semakin terikat di dalam perdagangan dan transfer senjata.<sup>100</sup> Meski demikian, dalam periode awal ini, transfer senjata Cina belum begitu terlihat dikarenakan oleh skalanya yang masih kecil dan hanya memiliki sedikit dampak bagi perdagangan senjata dunia.<sup>101</sup> Pada periode ini, Cina belum bersikap pragmatis sehingga sebagian besar ekspor senjata diberikan sebagai bantuan

<sup>100</sup> Karl W. Eikenbery, *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*, (Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 1995), hlm.5

<sup>101</sup> Eric Hyer, "China's Arms Merchants: Profit in Command", dalam *The China Quarterly*, no.132 (Desember, 1992), hlm.1101

militer cuma-cuma kepada pemerintah dan kelompok revolusioner yang dianggap sejalan dengan kepentingan Cina.<sup>102</sup>

Pada akhir 1970an, perubahan fundamental dalam domestik dan lingkungan strategis Cina mempengaruhi lingkup dan tujuan dari transfer senjata tersebut. Revolusi Budaya berakhir dan Deng Xiaoping pun muncul dengan kebijakan “empat modernisasi” yang menggembar-gemborkan peningkatan ketergantungan terhadap reformasi yang berorientasi pasar untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Sasaran dari hal ini bagi industri senjata termasuk penurunan jumlah produksi, perbaikan teknologi, produksi dan penggunaan sumber yang lebih efisien, serta integrasi antara industri sipil dan militer.<sup>103</sup> Berbeda dengan Mao yang berupaya untuk memajukan industri militer, modernisasi Deng justru berdampak pada kemunduran industri tersebut. Akibatnya, PLA amat merasakan dampak dari reformasi ekonomi Deng, dengan pertahanan berada dalam prioritas terendah setelah pertanian, industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program empat modernisasi. Sejak 1979 hingga 1989, alokasi untuk pertahanan dalam pengeluaran nasional turun dari 17,5% menjadi 7,4%. Atas dasar itu, militer Cina melihat adanya kesempatan untuk menjual perangkat beratnya demi mendapatkan keuntungan moneter.<sup>104</sup> *Poly Technologies* merupakan perusahaan terpenting jika dikaitkan dengan volume penjualan dan profit. *PT* berisikan orang-orang yang memiliki koneksi politik dan mampu menyediakan pengiriman cepat. Perusahaan tersebut bergerak secara agresif di tahun 1980an untuk bersaing dengan klien Negara Dunia Ketiga. Hasilnya, devisa yang dihasilkan PLA dari ekspor senjata membuktikan sumber pendanaan ekstra yang signifikan untuk mendanai penelitian dan pengembangan serta pembelian perlengkapan militer.<sup>105</sup>

Oleh karenanya, Cina mulai melihat penjualan senjata sebagai cara untuk mendapatkan *hard currency* dan akses ke dalam teknologi asing yang khususnya didorong oleh kebutuhan modernisasi dan memperbaharui PLA. PLA sendiri ingin

---

<sup>102</sup> \_\_\_\_, “China and Conventional Weapons Nonproliferation”, diakses dari [www.nti.org/db/china/conpos.htm](http://www.nti.org/db/china/conpos.htm), pada tanggal 6 September 2009, pukul 08.15 WIB.

<sup>103</sup> Karl W. Eikenbery, *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>104</sup> Bates Gill and Evan S. Medeiros, “Foreign and Domestic Influences on China's Arms Control and Nonproliferation Policies”, dalam *The China Quarterly*, No. 161 (Mar., 2000), hlm. 92

<sup>105</sup> Karl W. Eikenbery, *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*, *Op.Cit.*, hlm.7.

mengarahkan hal ini pada dua arah, yakni keinginan untuk menjamin status Cina sebagai *military power* kelas dunia serta berkembangnya celah teknologi militer terhadap negara maju. Pengamat strategi Cina melihat bahwa modernisasi *power* militer merupakan hal yang penting bagi kredibilitas Cina sebagai *world power* di masa yang akan datang. Penjualan senjata menjadi cara yang penting untuk mendanai modernisasi tersebut.<sup>106</sup> Cina telah berhasil menempatkan dirinya di dalam pasar senjata dengan keunggulan perlengkapan militer yang murah. Pada tahun 2002, Cina merupakan negara terbesar keempat dalam pengeksportan senjata di bawah AS, Rusia, dan Inggris. Dan di tahun 2020 industri pertahanan Cina diperkirakan dapat mencapai teknologi yang dapat digunakan bagi pertahanan AS dalam beberapa bidang.<sup>107</sup>

Selain untuk kepentingan komersil, sejak pertengahan 1960an di mana hubungan Sino-Soviet mulai retak, penjualan senjata semakin menjadi arahan yang luas di dalam tujuan kebijakan luar negeri Cina terutama untuk menjual senjatanya kepada musuh-musuh Moskow. Transfer senjata telah membantu Cina dalam membangun hubungan politik yang lebih baik dengan negara-negara yang sebelumnya curiga terhadap Cina karena sentimen anti-komunis (e.g., Iran dan Arab Saudi) atau karena dukungan Cina sebelumnya terhadap pemberontakan domestik (Myanmar dan Thailand).<sup>108</sup> Dalam banyak kasus, Cina juga menggunakan transfer senjata untuk memperkuat negara yang memiliki pertentangan dengan musuh Beijing. Misalnya saja transfer senjata Cina ke Thailand, Myanmar, dan Pakistan untuk memperkuat mereka dalam melawan Uni Soviet, Vietnam, dan India. Cina juga mentransfer senjata untuk memperkuat hubungannya dengan negara atau kawasan tertentu. Hubungan yang kuat dengan Iran dan Pakistan misalnya, dapat memfasilitasi hubungan Cina dengan negara-negara di Timur Tengah dan memberikan pengaruh bagi kawasan yang vital ini. Transfer senjata Cina ke Thailand juga diarahkan untuk menambah pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan pula bahwa transfer senjata Cina ke Sudan merupakan upaya Cina

---

<sup>106</sup> Richard A. Bitzinger, "Arms to Go: Chinese Arms Sales to the Third World", *Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>107</sup> B.S. Sachar, "Military Diplomacy through Arms Transfers: A Case Study of China", dalam *Strategic Analysis*, 28:2, April-Juni 2004, hlm. 292

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 297

untuk menambah pengaruhnya di kawasan Afrika secara keseluruhan.<sup>109</sup> Selain itu, dengan semakin meningkatnya ketergantungan Cina pada impor minyak, para analis di Cina telah menekankan pentingnya memelihara hubungan yang baik dengan negara pengekspor minyak. Beijing berharap bahwa negara-negara tersebut dapat menjual minyaknya ke Cina dengan jangka waktu yang lama.<sup>110</sup> Maka tak jarang, pemerintah Cina menggunakan transfer senjata sebagai instrumen untuk mendekatkan dirinya dengan negara-negara yang kaya sumber daya energi. Cina bahkan memberikan *friendship prices* kepada negara-negara yang memiliki cadangan energi tersebut.<sup>111</sup> Sudan, sebagai negara yang kaya akan minyak merupakan salah satunya.

Namun jauh sebelum sumber minyak di Sudan menjadi begitu vital bagi Cina, Cina telah memiliki hubungan yang panjang dan harmonis dengan Sudan. Dimulai pada tahun 1959 di mana Sudan menjadi negara keempat di Afrika yang mengakui berdirinya RRC. Dukungan Beijing atas penindasan yang dilakukan Perdana Menteri Gaafar Nimeiri atas usaha kudeta pada tahun 1971 menjadikan dasar bagi periode hubungan yang baik di tahun 1970an. Berbeda dengan Uni Soviet yang sikapnya tidak pasti dalam menanggapi usaha kudeta tersebut, Cina justru menawarkan bantuan untuk melatih pasukan bersenjata Sudan dan menyediakan peralatan militer, seperti 8 MIG-17 pesawat tempur dan 10 tank modern di tahun 1972. Sudan mendapatkan keuntungan pada periode tersebut dari hibah ekonomi, pinjaman bebas bunga dan ringan, serta bantuan teknis dari Cina. Cina juga memberikan berbagai proyek bantuan menyusul adanya perjanjian damai Addis Ababa di tahun 1972 yang mengakhiri perang sipil pertama Sudan. Hubungan Cina-Sudan sempat dingin untuk sementara waktu karena adanya kudeta *National Islamic Front* (NIF) yang dikutuk secara luas dan isolasi internasional terhadap Cina atas penindasan yang dilakukan Cina kepada para pelajar yang melakukan demonstrasi di tahun yang sama. Beijing pun hanya bisa mentransfer senjata secara terbatas.<sup>112</sup> Pada perkembangannya, Cina

---

<sup>109</sup> Daniel Byman dan Roger Cliff, *Op.Cit.*, hlm. 27

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>111</sup> Tim Luard, "Buyers Line Up for China's Arms", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5086416.stm>, pada tanggal 6 September 2009, pukul 14.17 WIB.

<sup>112</sup> Small Arms Survey, "Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan", diakses dari [www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-7-Arms.pdf](http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-7-Arms.pdf), pada tanggal 20

telah menjadi pemasok senjata terbesar bagi Sudan sejak akhir 1990an dan terus meningkatkan kerjasama dalam bidang militer meski terjadi kekejaman di Darfur. Laporan *BBC* mengindikasikan bahwa China menyuplai truk militer, mengirimkan senjata ringan dan kecil, serta memberikan pelatihan pada pilot Angkatan Udara Sudan untuk menerbangkan pesawat tempur yang digunakan di Darfur.<sup>113</sup> Meski Cina bukan satu-satunya negara yang menjual senjatanya ke Khartoum, namun Cina memainkan peranan yang kritis dan amat merusak.

### 3.2 Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

Dalam teori *Uncertain Rationales for Arms Sales*, Andrew J. Pierre menyebutkan bahwa faktor pertama yang mendasari suatu negara untuk melakukan penjualan senjata adalah pengaruh dan kemampuan mempengaruhi atas tindakan atau kebijakan negara lain. Dalam studi kasus Cina-Sudan ini, penulis akan melihat pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina melalui kebijakan luar negeri, keamanan, dan keamanan energinya terhadap Sudan, yang terutama diperlihatkan oleh Cina dalam posisinya sebagai anggota tetap DK PBB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan senjata oleh Cina amat kompleks dan tidak hanya didorong oleh kesadaran komersil semata. Dalam banyak kasus, kepentingan politik atau strategis dapat dihubungkan dengan penjualan senjata Cina ke beberapa negara kliennya karena pada faktanya, banyak penjualan senjata yang disubsidi oleh pemerintah Cina. Sebaliknya, beberapa kasus penjualan senjata juga dapat dibatasi oleh kesadaran politik itu sendiri.<sup>114</sup> Dengan kata lain, kepentingan politik merupakan bagian yang penting dari transfer senjata Cina.

Penjualan senjata dan transfer teknologi militer merupakan sikap yang sering Beijing lakukan dalam menjalin hubungan militer dengan negara lain hingga saat ini meski sebenarnya penjualan senjata Cina telah menurun sejak tahun 1980-an ketika

---

Juni 2010, pukul 02:40 WIB

<sup>113</sup> \_\_\_\_, "Stopping the Flow of Arms to Sudan: China's Arms Transfers and the Need to Expand the Arms Embargo", *Loc. Cit.*

<sup>114</sup> Daniel Byman dan Roger Cliff, *Op.Cit.*, hlm. 26

penjualan senjata dan teknologi ditekankan untuk membantu pendanaan PLA. Oleh karenanya penjualan senjata yang dilakukan Cina saat ini lebih diarahkan kepada tujuan strategis untuk menambah pengaruh politik terhadap negara-negara yang Cina anggap penting bagi kepentingan nasionalnya.<sup>115</sup> Hal inilah yang begitu terlihat dalam penjualan senjata Cina ke negara-negara Afrika, khususnya Sudan.

Hubungan yang terjalin antara Cina dengan benua Afrika sebenarnya telah membawa kontroversi tersendiri. Di saat kapitalis Barat dan Uni Soviet saling berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh di Afrika saat Perang Dingin berlangsung, Cina justru memainkan peran kecil namun tetap strategis dalam membangun pondasinya yang kuat di benua tersebut –menghadirkan dirinya sama-sama sebagai korban imperialisme. Meski demikian, pada pasca-Perang Dingin, hal tersebut mulai berubah ketika Cina secara permanen meluaskan pengaruhnya semakin dalam di benua tersebut. Cina memandang Afrika sebagai tempat untuk mendapatkan sumber daya, menambah akses pada pasar yang besar dan kesempatan untuk meningkatkan pengaruh diplomasinya.<sup>116</sup> Saat ini Cina telah mampu mengadaptasikan kebijakan luar negerinya sesuai dengan strategi pembangunan domestiknya ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya yakni dengan mendorong perusahaan yang dikontrol oleh negara untuk mencari eksplorasi dan kontrak penyuplai dengan negara-negara yang menghasilkan minyak, gas, dan sumber lainnya. Di saat yang sama, Beijing secara agresif menggandeng negara-negara tersebut dengan diplomasi, perjanjian dagang, penghapusan kredit, dan paket bantuan. Strategi ini dapat dikatakan berjalan sebagaimana Cina telah mendapatkan akses terhadap sumber daya penting di seluruh dunia, dari emas di Bolivia, batu bara di Filipina, tembaga di Chili, gas alam di Australia, dan tentu saja minyak dari Afrika (Sudan).<sup>117</sup>

Jika Cina menggunakan transfer senjata sebagai alat politik, Cina berusaha

<sup>115</sup> Kristen Gunness, "China's Military Diplomacy in an Era of Change", diakses dari <http://www.ndu.edu/inss/symposia/pacific2006/gunnesspaper.pdf>, pada tanggal 5 September 2010, pukul 11.48 WIB.

<sup>116</sup> Steve Paterno, "China interference and influence in Sudan", diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article30707>, pada tanggal 1 September 2010, pukul 2.15

<sup>117</sup> David Zweig dan Bi Jianhai, "China's Global Hunt for Energy", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 84, No.5 (Sept-Okt., 2005), hlm. 25-26

memenuhi tujuan rasionalnya dan berusaha menaburkan benih represif. Sebagai contoh, Cina menggunakan senjata sebagai kemampuan mempengaruhinya untuk mendapatkan sumber daya alam, dengan demikian, tujuannya bukanlah untuk memperkuat rezim diktator tetapi untuk memenuhi permintaan domestik dan sumber daya.<sup>118</sup> Karena sumber daya alam biasanya ditemukan di *pariah states*, Beijing telah mencapai kesepakatan dalam bidang energi dengan pemerintahan yang kurang menghormati rezim internasional. Strategi ini telah menciptakan masalah yang cukup rumit. Permasalahan ini memang tidak secara langsung menempatkan Cina dan AS di dalam kompetisi terhadap sumber daya alam yang sama. Namun dengan mengucilkan negara-negara tersebut, Washington telah memutuskan pula aliran sumber daya yang berasal dari mereka. Oleh karenanya, hal ini justru menghancurkan tujuan AS, seperti mengisolasi pemerintahan *rogue states* atau memberikan sanksi kepada mereka karena telah gagal mempromosikan demokrasi, mematuhi hukum internasional, membatasi proliferasi nuklir, atau menghargai HAM. Karena pencarian sumber daya yang dilakukan oleh Cina telah mendorongnya untuk menjalin hubungan yang erat dengan *rogue states* seperti Iran, Myanmar, dan Sudan, Cina maka sebenarnya sedang menantang hegemoni moral AS.<sup>119</sup> Pada tahun 1997, ketika para pemimpin pemerintahan Sudan yang mayoritas Muslim terlibat perang dengan pemberontak Kristen di bagian selatan, Washington berusaha untuk menghentikan hubungan bisnis perusahaan minyak AS dengan rezim Khartoum yang pada akhirnya justru membukakan pintu bagi Cina untuk memperluas operasinya di negara tersebut.<sup>120</sup> Kepentingan minyak Cina terhadap Sudan ini pada akhirnya semakin mempererat hubungan militer dan transfer senjata di antara keduanya. Besarnya kepentingan minyak Cina di Sudan ini akan lebih banyak dibahas pada sub bab keuntungan ekonomi.

Masuknya Cina dalam sektor minyak di Sudan tidak dapat dipungkiri semakin meningkatkan aliran senjata Cina kepada Khartoum yang kemudian digunakan dalam

---

<sup>118</sup> Meredith Lauren Blank, "Hugging with Tactical Arms: What Motivates China to Export Weapons?", *loc.cit.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>120</sup> Princeton Lyman, *Loc.Cit.*, hlm.2

memperparah konflik di Darfur. Konflik ini telah menginternasionalisasikan hubungan Cina dengan Sudan ke tahapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Internasionalisasi ini pada perkembangannya memberikan konsekuensi bagi posisi Beijing terhadap Darfur yang semula memainkan peran yang acuh menjadi lebih aktif terlibat. Diplomasi pemerintah Cina terhadap Darfur secara historis telah memperlihatkan dukungannya atas kedaulatan Sudan, lebih memilih proses mediasi dan menentang adanya sanksi, terutama sanksi minyak. Beijing berusaha melindungi investasinya di Sudan dan waspada terhadap intensi AS di Sudan. Meski Cina belum pernah menggunakan hak vetonya untuk memblok DK PBB dalam memberikan sanksi terhadap Khartoum atas konflik Darfur, namun sejak tahun 2001, Cina telah abstain sebanyak delapan kali dari 22 resolusi DK PBB yang berkaitan dengan Sudan dan Darfur.<sup>121</sup>

Perlindungan politik Beijing terhadap Khartoum pada periode 2004-2005, seiring dengan peningkatan transfer senjata Cina ke Sudan, semakin jelas terlihat dengan usaha Cina untuk memblok atau abstain dalam pengambilan suara resolusi PBB yang berusaha menetapkan sanksi dalam melawan pemerintah Sudan. Di awal 2004 ketika situasi di Darfur semakin memburuk, DK PBB mulai memikirkan cara untuk dapat mengatasi krisis tersebut. Langkah serius pertama yang diambil pada akhirnya menghasilkan resolusi 1556, yang pada awalnya mengancam Khartoum dengan sanksi ekonomi jika mereka tidak mulai melucuti senjata milisi Janjawid dan mengadakan pihak-pihak yang terlibat di Darfur.<sup>122</sup> Cina pun berusaha menghentikan usaha tersebut dengan mengancam akan memveto resolusi 1556 kecuali kata-kata mengenai sanksi dihapuskan. Atas adanya tekanan dari Cina, kalimat dalam resolusi itu pada akhirnya menyatakan akan ‘mempertimbangkan langkah/pendekatan

---

<sup>121</sup> Small Arms Survey, “Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan”, *loc.cit.*, hlm.7

<sup>122</sup> Mikhail Zygar, “Behind the U.N. Security Council Resolution: Chinese, Russian and Indian Oil interests in the Sudan,” diakses dari <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=612>, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 16:30 WIB

tambahan' dan bukan secara langsung memberikan sanksi pada Sudan.<sup>123</sup> Selain bersikeras menghapus kalimat yang berisi ancaman langsung mengenai pembebanan sanksi, Cina juga berusaha mencegah DK PBB dalam membentuk komite yang berfungsi mengawasi kepatuhan Sudan terhadap resolusi tersebut.<sup>124</sup> Namun pada akhirnya Cina tetap abstain dalam pengambilan keputusan karena menganggap resolusi yang telah diperbaharui itu tetap terlalu berat bagi Khartoum. Dalam menjelaskan posisi pemerintah Cina tersebut, Zhang Yisha, wakil permanen Cina bagi PBB, menjelaskan bahwa ancaman untuk menggunakan langkah koersif terhadap pemerintah Sudan tidak akan memperbaiki situasi yang ada dan hanya akan semakin memperburuk isu tersebut.<sup>125</sup>

Perlindungan Cina terhadap Sudan kembali diperlihatkan pada September 2004, ketika pengambilan suara resolusi 1564 dalam DK PBB. Cina kembali abstain meski sebelumnya telah memaksa untuk menghapuskan ancaman eksplisit mengenai pembebanan sanksi terhadap sektor minyak jika Sudan gagal untuk mematuhi resolusi DK PBB.<sup>126</sup> Sanksi minyak merupakan hal yang sensitif bagi Cina karena Cina memiliki kepemilikan yang sangat besar pada sektor minyak di Sudan. Oleh karenanya, Cina terus menghalangi usaha DK PBB dalam menetapkan sanksi terhadap Khartoum. Kemudian pada akhir 2004, proses perdamaian antara Utara-Selatan di Sudan sudah berada di tahap akhir dan DK PBB telah merancang resolusi 1584 yang secara khusus fokus pada perjanjian damai Utara-Selatan. Namun beberapa anggota di DK PBB, karena mendapat tekanan dari *NGOs (Non-Governmental Organizations)*, ingin menggunakan momentum tersebut untuk mengalamatkan situasi di Darfur. Cina menolak pergerakan ini dengan alasan bahwa aksi yang keras terhadap Darfur hanya akan mengganggu proses perdamaian Utara-

---

<sup>123</sup> \_\_\_\_, "China-Sudan Briefing Paper", diakses dari [www.darfuraustralia.org/files/China\\_briefing\\_paper.pdf](http://www.darfuraustralia.org/files/China_briefing_paper.pdf), pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 17.30 WIB.

<sup>124</sup> Lee Feinstein, "China and Sudan", diakses dari [http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/2007/04/24/china\\_and\\_sudan/](http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/2007/04/24/china_and_sudan/), pada tanggal 22 November 2010, pukul 17:15 WIB

<sup>125</sup> \_\_\_\_, "Chinese U.N. Envoy says Sudan Sanctions 'Complicate' Situation," *Xinhua News Agency*, 30 Juli 2004.

<sup>126</sup> United Press International, "US says Darfur Violence as Genocide", diakses dari [www.highbeam.com/doc/1P1-98844354.html](http://www.highbeam.com/doc/1P1-98844354.html), pada tanggal 22 November 2010, pukul 17:30 WIB.

Selatan.<sup>127</sup> Dengan demikian, Cina semakin memperlihatkan perlingungannya terhadap Sudan di dalam DK PBB. Di antara tahun 2004 dan Oktober 2007, DK PBB telah mendiskusikan 14 resolusi mengenai Darfur dan Cina telah menggunakan *power*-nya untuk memperlemah sembilan di antaranya dengan menghapuskan kalimat yang dapat memberatkan Khartoum, termasuk sanksi ekonomi, serta lima kali abstain dalam pengambilan keputusan.<sup>128</sup> Usaha Cina yang terus menghambat kinerja DK PBB dalam mengalamatkan isu di Darfur ini berdampak pada tidak efektifnya langkah yang diambil oleh DK PBB.

Selama Februari dan Maret 2005, perdebatan politis mengenai Sudan terus terjadi dalam DK PBB. Beberapa negara termasuk AS terus menekan adanya sanksi komprehensif terhadap pemerintah Sudan. Rancangan asli resolusi 1591 berisi ancaman eksplisit mengenai embargo minyak terhadap Khartoum jika mereka tidak memenuhi tuntutan DK PBB. Cina lagi-lagi mengancam akan menggunakan vetonya jika bahasa dari rancangan resolusi tersebut tidak diubah. Oleh karenanya, kalimat tersebut pun diubah menjadi “DK PBB akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah tambahan”. Dan setelah bersikeras untuk menghapus kata-kata yang dapat mengancam Sudan, Cina abstain dalam pengambilan keputusan.<sup>129</sup> Di antara langkah lain, resolusi 1591 juga menyerukan adanya komite yang berisikan negara anggota DK PBB dan empat anggota *Panel of Experts* untuk mengawasi situasi di Sudan dan membuat rekomendasi kepada komite. Namun pada akhirnya pengaktifan panel tersebut harus tertunda selama 3 bulan dengan adanya penolakan Cina terhadap kandidat yang ada karena menurutnya terlalu kritis terhadap Sudan.<sup>130</sup>

Dengan semakin tingginya kritik internasional terhadap peran Cina di Darfur, bantuan militer Cina pada periode tersebut justru semakin vital dan meningkat tajam.

<sup>127</sup> Maggie Farley, “Security Council Votes to Provide Aid after End to Sudan Civil War,” diakses dari [http://www.publicinternationallaw.org/docs/PNW4/PNW.22Nov\\_04.html#Sudan](http://www.publicinternationallaw.org/docs/PNW4/PNW.22Nov_04.html#Sudan), pada tanggal 24 Juni 2010, pukul 16:40 WIB

<sup>128</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, diakses dari <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>, pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 13.15 WIB, hlm.iii

<sup>129</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>130</sup> Reuters, “U.N. delays Sudan sanctions by three months,” diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article10526>, pada tanggal 27 Juni 2010, pukul 16:50 WIB

Hal ini juga ditandai dengan adanya kunjungan 19 pejabat militer Cina pada Oktober 2005, Menteri Pertahanan Cina, Letnan Jendral Eng Abd-al-Rahim Muhammad Husayn, saat itu mengusulkan agar Sudan dan Cina mendiskusikan rencana pengembangan dan perbaikan kekuatan bersenjata Sudan sesuai dengan permintaan di dalam perjanjian perdamaian.<sup>131</sup> Di samping adanya peningkatan hubungan militer tersebut, Beijing menyanggah tuduhan bahwa mereka menyokong rezim Khartoum dalam pelanggaran HAM berat di Darfur. Menurut Kenneth Roth, *Executive Director of Human Rights Watch*, “ketika berurusan dengan HAM, kebijakan luar negeri Cina menjadi sangat agnostik”. Keacuhan sikap Cina ini berakar dari kebijakan non-interfensi Cina terhadap urusan dalam negeri negara yang berdaulat. Non-interfensi telah menjadi hal yang fundamental bagi kebijakan luar negeri Cina sejak Zhou Enlai mengartikulasikan *the Five Principles of Peaceful Coexistence*. Hal ini dibentuk untuk merefleksikan solidaritas dengan negara-negara yang baru merdeka dan mengindikasikan rasa hormat atas kedaulatan teritorial. Meski prinsip tersebut pada akhirnya dilanggar dengan adanya dukungan Cina terhadap pergerakan revolusi di Afrika dan Asia pada tahun 1960an dan 1970an, namun prinsip tersebut kembali menjadi posisi yang sentral di bawah *independent foreign policy* pada periode pasca-1978. Sensitivitas Cina atas interfensi eksternal khususnya terkait dengan konteks Taiwan dan Tibet sehingga Cina memahami kedaulatan dalam istilah tradisional Westphalia.<sup>132</sup> Bagi Cina, HAM adalah hal yang relatif dan setiap negara harus memiliki kebebasan dalam mendefinisikan pemahamannya terhadap HAM. Terhadap krisis yang terjadi di Sudan, Deputi Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa, “Bisnis adalah bisnis. Kami berusaha memisahkan antara politik dan bisnis. Selain itu, menurut kami situasi internal di Sudan merupakan masalah dalam negeri Sudan dan kami tidak berada dalam posisi untuk menekan mereka”.<sup>133</sup> Atas alasan non-interfensi dan posisinya sebagai anggota permanen DK PBB, Cina telah menjadi wakil suara

---

<sup>131</sup> Small Arms Survey, “Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan”, *loc.cit.*, hlm.6.

<sup>132</sup> Tom Rafferty, “China’s Doctrine of Non-Interference Challenged by Sudan’s Referendum”, diakses dari <http://www.pittsreport.com/2010/12/chinas-doctrine-of-non-interference-challenged-by-sudans-referendum/>, pada tanggal 3 Januari 2011, pukul 15:50 WIB.

<sup>133</sup> David Zweig dan Bi Jianhai, *Op.Cit.*, hlm. 32

Khartoum dalam PBB.<sup>134</sup> Perlindungan politik yang Cina berikan kepada Khartoum juga tidak terlepas dari besarnya persenjataan Cina yang digunakan pada pelanggaran HAM di Darfur pada periode ini.

Meski Cina menganggap posisinya tidak berusaha untuk melindungi Khartoum, namun para analis mengkritik bahwa kebijakan non-interfensi Cina bukanlah hal yang netral. Sebagaimana yang disampaikan oleh Roth, “ketika pemerintah Barat berusaha untuk menggunakan tekanan ekonomi dalam mengamankan HAM, *no-strings rule* yang dijalankan Cina justru memberikan pembenaran bagi diktator untuk melawannya.”<sup>135</sup> Karena dengan adanya “jaminan” dari Cina untuk melindungi Khartoum dari sanksi yang mungkin dijatuhkan, Khartoum merasa tidak ada yang perlu ditakutkan dari DK PBB. Sikap Khartoum yang begitu keras dikarenakan oleh sikap Cina yang acuh terhadap hukum kemanusiaan internasional dan juga resolusi DK PBB. Cina tidak pernah sekalipun menyebut Khartoum dalam pelanggaran hukum internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Selain itu, sikap Cina yang terus mengancam akan memveto resolusi DK PBB atas krisis Darfur membuat Beijing merasa tidak memiliki kewajiban untuk mendorong Khartoum agar mematuhi tuntutan yang ada di dalam resolusi tersebut. Oleh karenanya, meski *UN Panel of Experts on Darfur* telah berkali-kali menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Khartoum terhadap resolusi DK PBB, laporan Panel tersebut tidak mempengaruhi pernyataan atau tindakan Cina. Buruknya HAM serta organisasi HAM di Cina sudah diketahui secara umum dan hal ini merupakan kesamaan yang dimiliki Cina dengan junta Khartoum. Akan tetapi hal ini cukup mengganggu otoritas PBB atas badan resmi seperti *Panel of Experts* untuk diacuhkan begitu saja oleh Beijing dan berdampak pada sikap Khartoum yang membangkang dari *international will*.<sup>136</sup>

Atas pendiriannya tersebut, Cina kembali abstain dalam resolusi 1593 yang

<sup>134</sup> Steve Paterno, “China interference and influence in Sudan”, *loc.cit.*

<sup>135</sup> Dr. Uche Ofodile, “Trade, Aid and Human Rights: China’s Africa Policy in Perspective”, diakses dari [www.jielt.com/index.php/jielt/article/download/73/72](http://www.jielt.com/index.php/jielt/article/download/73/72), pada tanggal 15 Juni 2010, pukul 19.50 WIB.

<sup>136</sup> Eric Reeves, “China’s Propaganda Campaign Can’t Obscure Complicity in Darfur Genocide”, dalam *Sudan Tribune*, 6 Maret 2008

berisi tentang pengajuan situasi di Darfur ke *ICC (International Criminal Court)*. Menurut Duta Besar Cina untuk PBB, Wang Guangya, keputusan Cina tersebut berdasarkan penghormatan pada kedaulatan hukum suatu negara dan Cina lebih memilih agar tersangka yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di Darfur diadili dalam sistem hukum Sudan. Sementara itu, baik Harun dan Ali Abd-Al Rahman masih dapat bebas untuk bepergian di dalam Sudan dan oleh karenanya, peran mereka dalam kekerasan di Darfur tidak akan pernah diinvestigasi oleh sistem peradilan di Sudan.<sup>137</sup> Cina memang bukan merupakan bagian dari Statuta Roma yang pada akhirnya menginspirasi pembentukan *ICC*. Saat bernegosiasi di dalam Statuta Roma, Cina menentang yurisdiksi *ICC* terhadap kejadian perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan saat konflik internal. Meski demikian, sebagai anggota permanen dari DK PBB, Cina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mengikat yang dibuat oleh DK PBB dihargai, meski telah abstain dalam pengambilan keputusan.<sup>138</sup>

Dalam periode 2004-2005, saat transfer senjata Cina-Sudan mencapai puncaknya, dapat terlihat manuver politik Cina yang begitu kuat dalam forum internasional khususnya DK PBB untuk melindungi pemerintah Sudan dari kemungkinan dijatuhkannya embargo ekonomi dan minyak. Usaha-usaha Cina sebagian besar dapat dikatakan berhasil karena mampu mengubah isi akhir resolusi yang tentu saja menguntungkan pemerintah Sudan. Selain berusaha melindungi dari penjatuhan sanksi, Cina juga berusaha membantu Sudan dalam menutupi permasalahan HAM di Darfur agar tidak berurusan dengan *ICC*. Perlindungan politik yang ada pun mengakibatkan pembangkangan Sudan dari resolusi yang ada.

Saat transfer senjata Cina ke Sudan mulai menurun pada periode 2006-2008, pengaruh serta kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan melalui perlindungannya dalam forum internasional seperti DK PBB, pada awalnya masih

---

<sup>137</sup> Human Rights First, "Letter to Ambassador Guangya", diakses dari [www.humanrightsfirst.org/pdf/071205-ij-hrf-ltr-china.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/pdf/071205-ij-hrf-ltr-china.pdf), pada tanggal 23 November 2010, pukul 22:00 WIB

<sup>138</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*, hlm.19

begitu kuat. Seperti yang terlihat pada 25 April 2006, Cina kembali abstain pada pengambilan suara dalam Resolusi 1672 meski sebelumnya telah berusaha untuk mengurangi jumlah orang yang menjadi target sanksi, yang semula 17 orang, termasuk dari kalangan pemerintah Sudan dan angkatan bersenjata, menjadi hanya empat orang dan hanya satu orang di antaranya yang merupakan anggota angkatan bersenjata Sudan.<sup>139</sup> Meski masih bersikap protektif terhadap Khartoum, semakin kuatnya tekanan internasional terhadap Cina agar menggunakan kemampuan mempengaruhinya untuk menekan Sudan agar bersikap kooperatif, telah mendorong Cina untuk lebih memainkan peran yang aktif terhadap Sudan. Hal ini terlihat ketika Cina memberikan dukungannya bagi resolusi 1679. Meski Cina saat itu gagal dalam usahanya untuk menghapus ancaman sanksi, menunjukkan penentangannya terhadap penggunaan Bab VII Piagam PBB mengenai pengambilan tindakan koersif di saat adanya ancaman terhadap perdamaian dan agresi, serta menekankan agar penempatan pasukan PBB hanya dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari pemerintah Sudan.<sup>140</sup> Resolusi 1679 berisi tentang transfer kontrol dari pasukan Uni Afrika ke pasukan yang lebih besar, yakni pasukan PBB di Darfur dan mengancam adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar *Darfur Peace Agreement*<sup>141</sup> -DPA merupakan perjanjian antara pemerintah Sudan dan *Sudan Liberation Army (SLA)* yang ditandatangani pada 5 Mei 2006. Namun sebagian kelompok dari *SLA* dan *Justice Equality Movement (JEM)* menolak perjanjian tersebut.<sup>142</sup> Tujuan dari resolusi tersebut adalah rencana penempatan pasukan perdamaian PBB sebanyak 20.000 tentara di Darfur. Pasukan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil dan membantu mereka kembali ke daerahnya dengan selamat. Namun demikian, rencana

---

<sup>139</sup> Lee Feinstein, "China and Sudan", *loc.cit.*

<sup>140</sup> Maggie Farley, "U.N. Aims to Hasten Dispatch Troops to Darfur", diakses dari <http://articles.latimes.com/2006/may/17/world/fg-darfur17>, pada tanggal 27 November 2010, pukul 11:11 WIB

<sup>141</sup> United Nations Security Council, "Security Council Endorses African Union Decision on Need for Concrete Steps in Transition to United Nations Operation in Darfur", diakses dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8721.doc.htm>, pada tanggal 23 November 2010, pukul 23:30 WIB.

<sup>142</sup> \_\_\_\_, "Darfur Peace Agreement, 2006", diakses dari [http://www.cfr.org/publication/11020/darfur\\_peace\\_agreement\\_2006.html](http://www.cfr.org/publication/11020/darfur_peace_agreement_2006.html), pada tanggal 25 November 2010, pukul 23:20 WIB

tersebut mendapat tentangan keras dari pemerintah Sudan.<sup>143</sup>

Sebelum tahun 2006, Beijing lebih memilih penyelesaian lokal atau regional bagi krisis Darfur. Pada tahun 2006, ketidakmampuan Al-Bashir dan tidak efisiennya misi Uni Afrika untuk menghentikan kekerasan di Darfur semakin jelas terlihat dan membuat Cina menyetujui adanya aksi internasional. Hal ini semakin didukung dengan pernyataan Perdana Menteri Cina Wen Jiabao, "Cina sungguh khawatir dengan stabilitas Darfur dan Cina mendukung keputusan masyarakat internasional untuk mengirimkan pasukan perdamaian".<sup>144</sup> Dan sejak saat itu, Cina terus berusaha untuk meyakinkan pemerintah Sudan dalam menyetujui pengiriman tentara PBB ke Darfur. Hal ini terkarakterisasi dengan sikap Cina yang amat berhati-hati di antara usaha permanen yang dilakukan untuk tetap menguatkan kerjasama di satu sisi dan menguatkan misi perdamaian di sisi lain. Periode di antara Uni Afrika meminta untuk menggantikan tentaranya di Darfur pada Januari 2006 dan Juli, perusahaan minyak, pejabat urusan luar negeri, dan pejabat militer Cina berusaha untuk semakin mendekati Sudan dalam arah yang tumpang tindih. Militer berusaha menjalankan caranya sendiri tanpa berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Oleh karenanya, hal ini merefleksikan bagaimana Beijing cukup sulit untuk mengoordinasikan komunikasi yang baik dan pada akhirnya menjadikan pendekatannya terhadap Khartoum untuk penempatan tentara PBB menjadi rendah. Meski demikian, Cina tetap menyetujui resolusi 1663 dan 1679 yang keduanya berisi tentang 'rencana persiapan untuk transisi *AMIS (African Union Mission in Sudan)* ke operasi PBB' dan menempatkan 'misi bersama Uni Afrika dan PBB' dalam satu minggu setelah diadopsikannya resolusi 1679.<sup>145</sup> Namun demikian, pada tanggal 19 Agustus 2006, Khartoum menolak untuk menggantikan tentara Uni Afrika dengan tentara PBB. Pemerintah Sudan juga menolak untuk menghadiri pertemuan khusus dengan DK PBB. AS dan beberapa negara-negara Eropa dan Afrika berusaha untuk

<sup>143</sup> Maggie Farley, "U.N. Aims to Hasten Dispatch Troops to Darfur", *loc.cit.*

<sup>144</sup> Emma van der Meulen dan Frans-Paul van der Putten, "Great Powers and International Conflict Management: European and Chinese Involvement in the Darfur and Iran Crises", hlm. 16, diakses dari [http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090225\\_cscp\\_sec\\_paper\\_great\\_powers.pdf](http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090225_cscp_sec_paper_great_powers.pdf), pada tanggal 27 November 2010, pukul 18:50 WIB

<sup>145</sup> Jonathan Holslag, "China's Diplomatic Victory in Sudan's Darfur", *op.cit.*

meningkatkan tekanan seperti penambahan sanksi baru. Dengan adanya batas waktu pemutusan resolusi 1706 untuk mengirim pasukan PBB semakin dekat, para tokoh politik Cina semakin menunjukkan sikapnya untuk meyakinkan Khartoum agar menerima pasukan PBB.<sup>146</sup>

Meski Cina telah berupaya untuk mempengaruhi Khartoum menerima pasukan perdamaian PBB, namun pada 31 Agustus 2006, Cina kembali abstain dalam pengambilan suara Resolusi 1706. Resolusi tersebut berisi tentang perluasan mandat *UN Mission in Sudan (UNMIS)* yang mengikutsertakan Darfur sebagai daerah operasinya.<sup>147</sup> Cina saat itu berusaha untuk menunda pengambilan suara agar dapat memastikan kalimat mengenai 'persetujuan Sudan terhadap penempatan pasukan' dimasukkan dan berusaha untuk mencegah pasukan tersebut diberikan mandat Bab VII Piagam PBB. Cina kemudian abstain dalam pengambilan suara sebagai aksi protes karena kalimat mengenai 'persetujuan Sudan untuk menempatkan pasukan' tidak dimasukkan dalam resolusi tersebut.<sup>148</sup>

Duta Besar Cina Zhang Yishan menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan Uni Afrika, Cina bersedia untuk mendukung resolusi DK PBB dalam membentuk pasukan perdamaian PBB. Meski demikian, Zhang memaparkan penentangan Cina terhadap Bab VII yang berisi tentang penggunaan kekerasan (memerintahkan pasukan untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan) dan berusaha untuk menghapus ancaman sanksi tersebut saat negosiasi. Meski demikian usaha Cina tersebut terhalang oleh AS dan Inggris dan resolusi pun keluar pada Agustus akhir dan menyertakan Bab VII yang berisi mandat untuk menggunakan kekerasan. Sudan tetap pada pendiriannya untuk menolak kehadiran PBB di Darfur. Dalam kunjungannya ke Beijing setelah resolusi 1706 dikeluarkan, Presiden Sudan, Bashir, mengatakan bahwa negaranya tidak akan menerima pasukan PBB dan berterima kasih pada Cina atas dukungan yang mereka berikan pada Sudan di DK PBB.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup> Jonathan Holslag, "China's diplomatic victory in Sudan's Darfur", *op.cit.*

<sup>147</sup> Dr. Uche Ofodile, "Trade, Aid and Human Rights: China's Africa Policy in Perspective", *loc.cit.*

<sup>148</sup> Africa Action, "The UN Security Council and the Darfur Crisis: A Country-by-Country Analysis", diakses dari [www.africaaction.org/resources/docs/SCAnalysis0610.pdf](http://www.africaaction.org/resources/docs/SCAnalysis0610.pdf), pada tanggal 24 November 2010, pukul 12:25 WIB.

<sup>149</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*

Meski perlindungan terhadap Khartoum tetap ada, namun banyak pihak yang mengatakan bahwa pendekatan Beijing terhadap Darfur pada periode ini telah berubah ke arah yang lebih pragmatis. Perubahan itu terlihat saat perdebatan mengenai Resolusi DK PBB 1706 yang mengajukan perluasan mandat *UNMIS* hingga ke Darfur. Untuk pertama kalinya, Cina secara publik berusaha mendorong Khartoum untuk mengizinkan pasukan perdamaian PBB masuk ke Darfur dan menyerukan bagi adanya '*comprehensive political solution*' terhadap krisis tersebut. Cina berusaha memainkan peran yang konstruktif di Darfur. Cina juga menunjukkan dukungannya terhadap *Darfur Peace Agreement* pada Mei 2006.<sup>150</sup> Namun demikian, pada pertengahan 2006, resiko bagi kepentingan Cina di lapangan semakin membesar dengan kesepakatan damai pada bulan Mei yang belum juga terurai, pertempuran di Darfur yang semakin meningkat dan meluas hingga ke perbatasan dengan Chad, di mana Beijing telah berjanji untuk berinvestasi. Di tengah-tengah tuntutan publik yang meningkat untuk menghentikan genosida di Darfur serta pembicaraan negara-negara Barat mengenai intervensi militer di Darfur semakin meningkatkan kekhawatiran Cina terhadap ketidakstabilan di sana. Oleh karenanya, pada bulan September 2006, Cina semakin mendesak pemerintah Sudan agar menerima rencana Sekretaris Jendral PBB saat itu, Kofi Annan, mengenai penempatan pasukan perdamaian *hybrid* dari Uni Afrika dan PBB sebanyak 20.000 pasukan di Darfur. Sebagai contoh, September 2006, Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao menyatakan perhatiannya atas stabilitas di Darfur dan dukungannya untuk mengirim pasukan perdamaian. Wakil Presiden Cina, Zeng Qinghong juga menjelaskan bahwa misi PBB di Darfur tidak akan melemahkan posisi pemerintah Sudan dan karena dalam misi tersebut juga direkomendasikan untuk memulai negosiasi yang konstruktif.<sup>151</sup>

Cina mulai berada pada tekanan publik dan diplomatik yang besar untuk memainkan peran yang aktif dalam meyakinkan Sudan untuk menerima pasukan sesuai dengan resolusi 1706. Oleh karenanya, pada 15 September 2006, Duta Besar

---

hlm.20

<sup>150</sup> Small Arms Survey, "Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan", *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>151</sup> Jonathan Holslag, "China's diplomatic victory in Sudan's Darfur", *op.cit.*

Wang Guangya menyatakan bahwa pemerintah Cina telah berusaha untuk menekan Sudan, namun tetap tidak akan memaksakan kehendak Sudan. Saat adanya pertemuan *High Level Consultation* di markas Uni Afrika (Addis Ababa) pada 16 November 2006 untuk membahas situasi di Darfur, Wang melakukan intervensi penting dalam meyakinkan Sudan bahwa rencana PBB tersebut tidak memiliki agenda tersembunyi. Usaha persuasi Wang tersebut menghasilkan persetujuan Sudan atas *Annan Plan*, rencana 3 fase bagi penempatan sebanyak 22.000 pasukan *hybrid* Uni Afrika dan pasukan perdamaian PBB di Darfur.<sup>152</sup> Hu Jintao juga menyampaikan pesan yang kuat agar *Annan Plan* dapat dihormati. Hu kemudian membicarakan isu tersebut dengan Presiden Sudan, Omar al-Bashir saat *Chinese-African Summit* di bulan yang sama dan saat kunjungannya ke Khartoum pada awal 2007. Menjelaskan kunjungannya tersebut, Wang menyampaikan bahwa, “Tidak biasanya Cina menyampaikan pesan tersendiri kepada Khartoum, akan tetapi saat ini Cina melakukannya.”<sup>153</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi Cina telah berubah dari yang semula hanya untuk meneruskan pesan dari DK PBB menjadi persuasi yang aktif.

Sikap Cina yang mendukung penempatan pasukan Uni Afrika dan PBB di Darfur memperlihatkan bagaimana sikap Cina yang berusaha untuk mendorong Sudan agar bisa lebih diterima oleh komunitas internasional. Dengan adanya Kongres Partai ke-17 pada bulan Oktober 2006, Olimpiade Beijing 2008, dan pemilihan Presiden pada tahun 2007 telah membuat pejabat Cina khawatir dengan citra internasionalnya. Disebutkan pula bahwa ketakutan Cina akan retaknya hubungan ekonomi dan strategis dengan AS dan Eropa juga telah mendorong Beijing untuk lebih memperlihatkan dirinya sebagai *responsible power*. Di Beijing pun perdebatan yang ada telah berubah dari yang semula bagaimana mempertahankan prinsip non-interferensi menjadi dalam kondisi apakah intervensi itu dapat dibenarkan. Meski demikian, kepentingan ekonomi Cina tetap besar dan Beijing tetap tidak memiliki

---

<sup>152</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *Loc.Cit.*, hlm.20

<sup>153</sup> Stephanie Kleine-Ahlbrandt dan Andrew Small, “China’s New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting with Pariahs?”, *Foreign Affairs*, Januari/Februari 2008. hlm.3

pandangan yang sama dengan Washington terkait HAM dan demokrasi.<sup>154</sup> Posisi Cina terhadap pasukan perdamaian PBB pun telah berubah dari menentang dan non-partisipasi di tahun 1970an, menjadi mendukung dan non-partisipasi di tahun 1980an, kemudian menjadi mendukung dan berpartisipasi di tahun 1990an. 'Meski Beijing memiliki interpretasi yang statis terhadap kedaulatan dan memiliki prinsip untuk menentang intervensi,' Allen Carlson menyimpulkan bahwa 'pemimpin Cina juga turut aktif dalam usaha multilateral yang semakin mengubah pendirian Cina mengenai intervensi dan peran kedaulatan dalam politik internasional.' Cina semakin menyadari kegunaan DK PBB sebagai kendaraan untuk melindungi dan memproyeksikan kepentingan nasional. Sejak tahun 1970an, Cina mulai melihat kerjasama konstruktif di dalam kerangka PBB sebagai modus yang penting dalam koeksistensi dengan Barat dan AS pada khususnya.<sup>155</sup>

Meski Cina semakin aktif dalam menekan Sudan untuk menerima pasukan PBB, namun jika menyinggung persoalan HAM, kebijakan resmi Cina terus berusaha untuk melindungi kedaulatan Sudan. Pada akhir 2006, Dewan HAM PBB menyampaikan keputusan terkait dengan Darfur atas pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan di sana dan meminta para pihak yang terlibat untuk menghentikan penyiksaan tersebut. Meski Cina memberikan suaranya dalam keputusan tersebut, namun Cina melawan bahasa yang menyinggung masalah tanggung jawab Sudan untuk melindungi rakyatnya dari kekerasan serta pentingnya membawa pelaku kejahatan ke meja pengadilan. Cina terus melindungi pejabat Sudan dari kemungkinan untuk terlibat dalam kejahatan di Darfur.<sup>156</sup> Di tahun 2007, Cina juga terus membela sikap pemerintah Sudan. Pada bulan Maret, Cina bersama Rusia dan beberapa negara Arab dan Muslim menentang kesimpulan dan meminta Dewan HAM PBB untuk mengabaikan laporan dari misi Darfur yang menyalahkan Sudan dalam perang melawan sipil. Media di Cina serta para pejabat Cina terus berupaya untuk

<sup>154</sup> Stephanie Kleine-Ahlbrandt dan Andrew Small, "China's New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting with Pariahs?", *op.cit*, hlm.1.

<sup>155</sup> Jonathan Holslag, "China's diplomatic victory in Sudan's Darfur", *Sudan Tribune*, 2 Agustus 2007

<sup>156</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*, hlm.19

mempertahankan bahwa akar permasalahan dari konflik Darfur adalah kemiskinan serta kurangnya pembangunan dan tidak membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Janjawid terhadap sipil sejak tahun 2003.<sup>157</sup>

Di tahun 2007, Cina semakin berusaha untuk meredakan kritik internasional atas perannya di dalam konflik Sudan dengan memainkan peran yang lebih aktif terhadap *peacekeeping* di Sudan. Kunjungan kenegaraan Presiden Hu pada Februari 2007 ke Sudan juga menunjukkan komitmen Cina terhadap resolusi konflik Darfur. Setelah bertemu dengan Presiden Bashir, pemerintah Cina membuat pernyataan publik yang meminta adanya '*comprehensive ceasefire*', akselerasi dari proses negosiasi politik yang melibatkan pemberontak yang tidak terlibat di dalam perjanjian damai sebelumnya dan menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar 5 juta dolar AS untuk membantu masyarakat yang ada di Darfur memperbaiki kondisi kehidupannya.<sup>158</sup>

Selain menggunakan jalan diplomasi, pada Maret 2007, *China's National Development and Reform Commission* menghapus Sudan dari daftar negara dengan *preferred trade status* dan menghapus subsidi negara bagi investasi Cina di Sudan. AS dan para pengamat lain menganggap pergerakan tersebut sebagai indikasi dari kehendak Cina untuk menggunakan cara ekonomi koersif untuk mempengaruhi Khartoum. Peran Cina diterima secara baik oleh komunitas internasional, termasuk AS. Dalam responnya atas pertanyaan terkait dengan peran Cina dalam mencoba untuk memecahkan krisis Sudan, Deputi Kementerian Luar Negeri AS, John Negroponte, menyebut peran Cina sangat konstruktif jika melihat hubungan Cina dengan Sudan yang multifaset.<sup>159</sup>

Peran aktif pejabat tinggi Cina untuk mempengaruhi pemerintah Sudan semakin terlihat ketika Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Zhai Jun, mengunjungi Sudan di saat banyaknya organisasi non-pemerintah yang melancarkan kampanye

---

<sup>157</sup> \_\_\_\_, "China in Sudan: Having it Both Ways", *Op.Cit.*, hlm.2

<sup>158</sup> Small Arms Survey, "Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan", *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>159</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*, hlm.21

untuk memboikot apa yang mereka sebut sebagai *Genocide Olympics* di Beijing pada awal April. Setelahnya, Zhai mengunjungi tenda-tenda pengungsi di Darfur dan juga kunjungan simbolik ke al-Fasher dan Nyala. Zhai Jun terus meminta adanya fleksibilitas dari pemerintah Sudan dalam menerima rencana penempatan pasukan perdamaian PBB bagi Darfur meski Cina tetap menolak adanya sanksi yang dibebankan kepada Sudan. Cina menekankan pentingnya mencapai resolusi perdamaian melalui proses negosiasi politik dan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Darfur sedini mungkin.<sup>160</sup> Dalam waktu satu minggu, Khartoum setuju atas penempatan lebih dari 3.000 tentara PBB, di antaranya termasuk 275 insinyur militer Cina, ke Darfur. Dengan tekanan yang masih sangat besar, pada bulan Mei 2007, Cina menunjuk Liu Guijin, mantan Duta Besar Cina untuk Afrika Selatan dan Zimbabwe, sebagai utusan khusus bagi Darfur. Dan pada 31 Juli 2007, hari terakhir kepemimpinannya dalam DK PBB, Cina mendukung pembentukan pasukan Uni Afrika-PBB sebanyak 20.000 pasukan. Usul yang ada berupaya untuk menghentikan serangan udara yang dilakukan oleh pemerintah Sudan serta mandat untuk melindungi sukarelawan dan sipil. Beijing secara pribadi juga meminta kepada pemerintah Sudan agar mengimplementasikan resolusi tersebut. Setelahnya, Khartoum mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bersedia untuk menjalankannya. Peran Cina dalam menggunakan kemampuan mempengaruhinya terhadap Sudan ini mendapatkan pujian dari negara-negara lain, khususnya AS, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Negroponte, bahwa “Cina telah memainkan peranan yang penting dalam kesepakatan tersebut”.<sup>161</sup>

Tekanan dan kritik internasional terhadap peran Cina di Darfur semakin meningkat terutama saat Olimpiade Beijing akan berlangsung. Oleh karenanya, Cina sejak itu berusaha untuk memberikan tekanan pada pemerintah Sudan.<sup>162</sup> Sebelum

<sup>160</sup> Small Arms Survey, “Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan”, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>161</sup> Stephanie Kleine-Ahlbrandt dan Andrew Small, “China’s New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting with Pariahs?”, *op.cit.* hlm.4

<sup>162</sup> \_\_\_\_, “China-Sudan Briefing Paper”, *loc.cit*

akhirnya menyetujui resolusi 1769, Cina bersikeras untuk mengubah isi resolusi yang secara signifikan melemahkan hasil akhirnya. Cina berhasil menghapus isi kalimat resolusi yang dapat memberikan mandat pada DK PBB untuk menetapkan sanksi jika Sudan gagal untuk bekerjasama dalam mengimplementasikan resolusi tersebut. Selain itu, mandat kepada pasukan PBB dan Uni Afrika untuk “merampas dan membuang” senjata yang ditemukan di Darfur karena merupakan pelanggaran terhadap embargo senjata (Resolusi DK PBB 1556/2004) dilemahkan dalam resolusi akhir dan pasukan tersebut hanya diperbolehkan untuk “memonitor”.<sup>163</sup> Cina pada akhirnya menyetujui resolusi 1769 pada 31 Juli 2007, yang berisi mandat pembentukan pasukan “*hybrid*” antara PBB dan Uni Afrika untuk mengganti resolusi 1706 pada 31 Juli 2007.<sup>164</sup> Ini menandakan perubahan besar sikap Cina terhadap Darfur karena sebelumnya Cina menganggap konflik tersebut adalah permasalahan dalam negeri Sudan yang tidak membutuhkan intervensi asing dan merefleksikan kebutuhan Beijing untuk mencapai keseimbangan baru dalam pendekatannya terhadap isu Darfur.<sup>165</sup> Dalam periode ini Cina semakin keluar dari zona nyaman berdiplomasinya dan menekan pemerintah Sudan untuk merubah kebijakannya. Cina terus berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Sudan pada akhir 2007 agar memperbolehkan penempatan 26.000 tentara Uni Afrika dan PBB, termasuk tentara-tentara Cina untuk memasuki Sudan dalam misi *UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur)*.

Usaha Cina untuk mempengaruhi Khartoum tidak hanya dilakukan dengan cara politis tetapi juga dengan menyediakan dukungan finansial bagi pemerintah Sudan. Pada tahun 2007 Presiden Hu mengumumkan pinjaman bebas bunga sebesar 12,9 juta dolar bagi pembangunan istana presiden yang baru, 40 juta bantuan pinjaman, 77,4 juta dolar bagi proyek infrastruktur, dan penghapusan hutang Sudan

<sup>163</sup> \_\_\_\_, “China in Sudan: Having it Both Ways”, diakses dari [http://www.savedarfur.org/pages/policy\\_paper/briefing\\_paper\\_china\\_in\\_sudan\\_having\\_it\\_both\\_ways/](http://www.savedarfur.org/pages/policy_paper/briefing_paper_china_in_sudan_having_it_both_ways/), pada tanggal 10 Juni 2010, pukul 14.25 WIB, hlm.2

<sup>164</sup> Dr. Uche Ofodile, “Trade, Aid and Human Rights: China’s Africa Policy in Perspective”, *loc.cit.*

<sup>165</sup> Emma van der Meulen dan Frans-Paul van der Putten, “Great Powers and International Conflict Management: European and Chinese Involvement in the Darfur and Iran Crises”, *loc.cit.*, hlm.17.

sebesar 70 juta dolar.<sup>166</sup> Pada September 2007, duta besar Cina untuk Sudan terlihat sedang bersama Ahmad Harun (Menteri HAM Sudan) dalam pertemuan di Khartoum yang menandakan pengiriman bantuan materi Cina untuk Darfur. Saat itu, Harun berterimakasih pada pemerintah Cina atas dukungannya yang menurutnya menandakan dalam dan solidnya hubungan antara Sudan dan Cina.<sup>167</sup>

Berbeda dengan penempatan pasukan perdamaian di mana Cina terus berupaya mempengaruhi Khartoum agar menerima pasukan tersebut, dalam perlindungannya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Khartoum, Cina terus berusaha untuk melindungi Sudan dari tekanan internasional. Pada Desember 2007, pendakwa ICC melapor pada DK PBB bahwa Sudan tidak kooperatif dalam investigasi sehingga mayoritas dari negara anggota DK PBB berusaha untuk membuat kalimat yang kuat dalam mendorong Sudan untuk menyerahkan orang-orang yang dicurigai melakukan pelanggaran HAM di Darfur. Menurut diplomat dari negara-negara lain, Cina bersikeras untuk mengubah pernyataan dengan berusaha memperlemahnya.<sup>168</sup>

Namun demikian, hubungan Cina dan Sudan sempat diuji ketika Presiden Bashir membalikkan diri dan menarik dukungannya atas pasukan *hybrid*. Cina pun cukup kecewa atas tindakan tersebut dan Duta Besar PBB Cina, Wang, menyatakan secara umum bahwa respon tersebut bukan yang Cina harapkan dari Sudan.<sup>169</sup> Meski Cina berupaya untuk menekan Sudan, namun Cina tetap melindungi pemerintahan Khartoum dan menyatakan bahwa terhambatnya penempatan pasukan *UNAMID* disebabkan oleh permasalahan teknis. Utusan khusus Cina untuk Sudan, Liu Guijin berpendapat bahwa mereka tidak dapat mempolitisasi permasalahan teknis tersebut. Pada kenyataannya, tidak ada masalah teknis dalam penolakan Khartoum terhadap pasukan, insinyur, dan polisi sipil PBB karena semuanya menyangkut pada

---

<sup>166</sup> Ted Dagne, "Sudan: The Crisis in Darfur and Status of the North-South Peace Agreement", Congressional Research Service Report, 28 Mei 2010, diakses dari [www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf), pada tanggal 14 Juni 2010, pukul 11.35 WIB

<sup>167</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*, hlm.20

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>169</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *Loc.Cit.*, hlm.21

permasalahan politis. Penolakan Khartoum untuk menerima kiriman insinyur dari Swedia dan Norwegia, unit pasukan khusus dari Nepal serta batalyon lengkap dari Thailand merefleksikan penolakan politis Khartoum terhadap pasukan *UNAMID* yang ditempatkan untuk misi yang efektif di Darfur.<sup>170</sup> Khartoum menyatakan bahwa tentara non-Afrika, kecuali dari Cina dan Pakistan, tidak boleh berpartisipasi dalam pasukan perdamaian. Pada Februari 2008, Khartoum belum menyetujui akses pelabuhan, hak pendaratan, batasan penerbangan, pengawasan/pelaporan dan status legal dari pasukan tersebut.<sup>171</sup>

Namun dengan semakin besarnya sorotan dunia internasional terhadap peran Cina di Darfur, khususnya melalui kampanye *Genocide Olympics*, pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, Beijing kembali menekan Khartoum untuk menyelesaikan visa dan masalah pabean pasukan perdamaian yang tertunda demi kelancaran penempatan pasukan. Pejabat senior Cina juga menyampaikan kritik terbuka terhadap Khartoum. Hal tersebut kembali memperlihatkan sikap Cina yang telah keluar dari kebijakan tradisionalnya mengenai prinsip non-interfensi terhadap masalah dalam negeri negara lain. Ketika Khartoum mulai menghambat rencana penempatan *UNAMID* pada akhir 2007, Beijing menyatakan bahwa mereka akan lepas tangan jika DK PBB memberlakukan sanksi bagi pejabat tinggi Sudan. Menyusul kunjungannya ke Khartoum dan Ndjamena pada akhir Februari dan awal Maret 2008, Liu mulai merubah haluannya dari konsiliasi menjadi konfrontasi yang keras dengan para pihak yang terlibat di Darfur.<sup>172</sup> Sebelumnya secara terang-terangan Cina menolak penerapan sanksi untuk mengatasi situasi di Darfur. Namun pada Januari 2008, Utusan Khusus Cina untuk Sudan, Zhai Jun melaporkan bahwa Cina telah memperingati Menteri Luar Negeri Sudan, Deng Alor, bahwa “dunia telah kehilangan kesabaran atas apa yang terjadi di Darfur” dan memberitahu Sudan agar “tidak

<sup>170</sup> Eric Reeves, “China’s Propaganda Campaign Can’t Obscure Complicity in Darfur Genocide”,  
*Op.Cit*

<sup>171</sup> \_\_\_\_, “UNAMID”, diakses dari  
[http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84&Itemid=105](http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=105),  
pada tanggal 27 November 2010, pukul 23:20 WIB

<sup>172</sup> J. Stephen Morrison, “Will Darfur Steal the Olympic Spotlight?”, dalam *The Washington Quarterly*, Summer 2008, hlm. 187

melakukan hal yang dapat mendorong komunitas internasional untuk memberlakukan sanksi terhadap mereka”. Hal tersebut memperlihatkan kesediaan Cina untuk menggunakan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap rezim yang sebelumnya Cina anggap sebagai masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat.<sup>173</sup>

Sikap Cina yang semakin kooperatif di dalam PBB dan penggunaan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap Khartoum akhirnya membuahkan hasil dengan penerimaan Khartoum atas pasukan perdamaian tersebut. Pasukan perdamaian UA-PBB untuk Darfur, *UNAMID*, mulai ditempatkan di Darfur pada Januari 2008 meski dalam penempatan awalnya pasukan tersebut masih kekurangan sekitar 26.000 pasukan sesuai dengan yang direncanakan.<sup>174</sup> Di tahun 2008, diplomasi aktif Cina terhadap Sudan terus berjalan. Presiden Hu Jintao menerima kunjungan Wakil Presiden Sudan, Ali Osman Mohammed Taha di Beijing dalam rangka perayaan 15 tahun hubungan Cina-Sudan pada 11 Juni 2008. Hu menyatakan bahwa solusi politik merupakan kunci bagi konflik Darfur dan oleh karenanya, operasi pasukan perdamaian dan proses politik harus terus dilakukan untuk mencapainya. Hu juga menyampaikan bahwa kondisi kemanusiaan dan keamanan di Darfur harus diperbaiki dan Cina akan terus memainkan peran yang konstruktif dalam krisis Darfur. Selain memberikan bantuan kemanusiaan, Cina juga mengirimkan 322 tentaranya untuk *UNAMID*. Sehingga pada intinya, pemerintah Cina telah semakin terlibat dalam isu Darfur meski Cina berusaha tetap *low profile* selama kepentingannya di Darfur cukup terlindungi dan Beijing berusaha menghindari konflik langsung di dalam DK PBB dengan negara-negara Barat.<sup>175</sup>

Dua jam sebelum mandat *UNAMID* berakhir, DK PBB mengeluarkan resolusi 1828 pada 31 Juli 2008 yang berisi tentang perpanjangan mandatnya selama 12 bulan

<sup>173</sup> Sarah Teitt, “China and Responsibility to Protect”, diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/172-asia-pacific/2053-the-asiapacific-centre-for-the-responsibility-to-protectchina-and-the-responsibility-to-protect>, pada tanggal 22 November 2010, pukul 17:35 WIB

<sup>174</sup> —, “China Defends Arms Sales to Sudan”, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7258059.stm>, pada tanggal 27 November 2010, pukul 16:40 WIB

<sup>175</sup> Emma van der Meulen dan Frans-Paul van der Putten, “Great Powers and International Conflict Management: European and Chinese Involvement in the Darfur and Iran Crises”, *loc.cit.*, hlm.18

hingga 31 Juli 2009 serta penambahan kapabilitas perlengkapan militer dan mempercepat penambahan jumlah pasukan perdamaian sesuai dengan yang direncanakan. Cina menekankan pentingnya resolusi ini dengan mengatakan bahwa pengadopsian resolusi menyediakan jaminan dasar bagi keberhasilan penempatan pasukan perdamaian terbesar dalam sejarah PBB.<sup>176</sup> Cina juga mendukung permintaan Uni Afrika dan anggota DK lainnya untuk menunda dakwaan terhadap Presiden Omar al-Bashir atas tuduhan genosida di Darfur oleh ICC. Cina mengatakan bahwa kemajuan tidak akan terjadi di Darfur tanpa kerjasama penuh dari Pemerintah Sudan. Dakwaan tersebut merupakan 'keputusan yang tidak tepat di saat yang tidak tepat pula' dan hanya akan melemahkan kepercayaan antara Sudan dan PBB serta membahayakan situasi keamanan di Darfur. Cina menyatakan bahwa tindakan ICC harus mengutamakan bagi stabilitas di Darfur, bukan sebaliknya.<sup>177</sup>

Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa pada periode 2006-2008 Cina tengah mengubah kebijakannya dalam memblokir resolusi DK PBB dalam penempatan pasukan perdamaian di Darfur dan memberlakukan tekanan pada Khartoum untuk mengizinkan penempatan pasukan perdamaian PBB. "Penanganan masalah yang dilakukan oleh Beijing pada situasi yang terjadi di Sudan memperlihatkan bahwa mereka tengah mempelajari keterbatasan dari noninterfensi" sebagaimana yang ditulis oleh Stephanie Kleine-Ahlbrandt dan Andrew Small di dalam *Foreign Affairs*.<sup>178</sup> Peran Cina di Sudan telah memperlihatkan terbatasnya prinsip non-interfensi meski prinsip tersebut tetap menjadi bagian dalam retorika resmi. Konsep tersebut akan berguna ketika Cina cenderung lemah dan berusaha untuk melindungi dirinya dari interfensi asing. Namun Cina telah menyadari bahwa non-interfensi semakin tidak membantu ketika ada resiko dalam mempercayakan kepentingan

<sup>176</sup> United Nations Security Council, "Resolution 1828 (2008)", diakses dari [www.eed.de/fix/files/doc/08-07-31\\_unsc-res-1828-2008-or.pdf](http://www.eed.de/fix/files/doc/08-07-31_unsc-res-1828-2008-or.pdf), pada tanggal 30 November 2010, pukul 11:30 WIB

<sup>177</sup> United Nations Security Council, "Security Council Decides to Extend Mandate of African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur", diakses dari <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-7H4KDA?OpenDocument>, pada tanggal 27 November 2010, pukul 10:40 WIB

<sup>178</sup> Stephanie Hanson, "China, Africa, and Oil", diakses dari [http://www.cfr.org/publication/9557/china\\_africa\\_and\\_oil.html](http://www.cfr.org/publication/9557/china_africa_and_oil.html), pada tanggal 27 Maret 2010, pukul 12:30 WIB

bisnisnya dengan pemerintahan yang represif. Dukungan Beijing terhadap operasi *peacekeeping* PBB juga merupakan contoh lain dari perubahan sikap yang semula non-interfensi sejati menjadi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis. Pengiriman pasukan perdamaian tersebut dianggap berguna bagi strategi diplomasi publik secara keseluruhan dan memungkinkan Cina untuk memonitor dan menstabilkan negara serta kawasan di mana Cina memiliki kepentingan ekonomi seperti Darfur.<sup>179</sup> Karenanya, pembicaraan mengenai '*quiet revolution*' terhadap sikap Cina yang menjunjung non-intervensi semakin marak. Penerimaan Cina terhadap perannya sebagai *world power* dan pembangunan dalam bidang ekonomi dan diplomatik telah menyebabkan perubahan itu.<sup>180</sup> Banyaknya sorotan media dan dunia advokasi terhadap catatan HAM dan kurangnya keterlibatan positif Cina di Darfur juga semakin mendorong adanya perubahan tersebut. Hal ini juga menyangkut Olimpiade 2008 yang akan diselenggarakan saat itu. Karena Cina semakin berusaha untuk terlihat sebagai '*responsible stakeholder*' dalam tatanan dunia, maka mereka melihat Darfur sebagai sebuah beban yang membutuhkan tindakan yang lebih proaktif.<sup>181</sup>

### 3.3 Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

Perang sipil di Darfur memiliki akar yang kompleks dan panjang. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghubungkan sejarah penderitaan di masa lalu untuk membenarkan partisipasi mereka dalam konflik yang tengah terjadi. Kekerasan bukan hal yang baru di Darfur. Konflik tingkat rendah yang kemudian didukung dan ditambah dengan lemahnya hukum di kawasan tersebut, berkembang menjadi pertentangan etnis skala besar antara penggembala yang nomaden dan petani yang menetap.<sup>182</sup> Darfur secara historis merupakan tempat tinggal bagi suku Arab

<sup>179</sup> Stephanie Kleine-Ahlbrandt dan Andrew Small, "China's New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting with Pariahs?", *op.cit.* hlm.4

<sup>180</sup> Small Arms Survey, "Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan", *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm.8

<sup>182</sup> United Nations Security Council, "S/2006/65", diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/files/UN%20Panel%20of%20experts%20jan%2030.06.pdf>,

nomaden yang tinggal di kawasan utara yang kering dan para petani dan peternak suku Afrika –Fur, Zagawa, dan Masalit- yang menetap di kawasan selatan. Ketika kekeringan terjadi di tahun 1980an dan air serta padang rumput menjadi langka, suku nomaden di bagian utara mulai menghabiskan lebih banyak waktunya di bagian selatan yang lebih hijau. Hal inilah yang kemudian menciptakan konflik lahan dan air di antara keduanya. Awalnya konflik tersebut dapat dipecahkan melalui negosiasi dengan para pemimpin suku, namun keputusan Khartoum untuk mempersenjatai kelompok suku Arab semakin memperparah kekerasan di Darfur.<sup>183</sup> Meski konflik Darfur terjadi di antara suku Arab dan Afrika, namun konflik ini lebih dipicu oleh tekanan ekonomi dan kompetisi antara penggembala dan petani saat kekeringan panjang terjadi.<sup>184</sup>

Di tahun 2003, sementara proses perdamaian Utara-Selatan mulai mendapatkan momentumnya, situasi di Darfur semakin memburuk dengan kelompok pemberontak mengangkat senjatanya untuk melawan pemerintah Darfur. Sikap kelompok pemberontak tersebut didorong oleh sikap tak acuh Khartoum atas menurunnya ekonomi di kawasan Darfur dan tindakan Khartoum dalam memberikan jabatan senior di pemerintah regional pada suku Arab. Kelompok yang menetap di Darfur merasa bahwa Darfur merupakan kawasan yang termarginalisasi –seperti layaknya kawasan lain di Sudan Utara. Pemberontak Darfur, yang bukan merupakan bagian dari pembicaraan damai antara Utara-Selatan menganggap bahwa hanya dengan tindakan militerlah mereka bisa mendapatkan bagian di dalam tata politik dan ekonomi yang baru.<sup>185</sup>

Di Darfur, *SLA* dan *JEM* merupakan dua kelompok bersenjata terbesar yang melawan pemerintah Sudan dan milisi Janjawid. *SLA* dan *JEM* mengklaim dirinya berusaha untuk melindungi populasi *black African* di Darfur dalam melawan bangsa

---

pada tanggal 29 Oktober 2010, pukul 15.30 WIB, hlm.13.

<sup>183</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *loc.cit.*, hlm.33.

<sup>184</sup> Amnesty International, “Sudan Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur”, *loc.cit.*, hlm.7

<sup>185</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *loc.cit.*, hlm. 33.

Arab yang memimpin pemerintahan di Khartoum dan milisi Janjawid.<sup>186</sup> *SLA* terbentuk pada Februari 2003 dan *JEM*, yang diduga berhubungan dengan kelompok oposisi di Sudan, Hassan al-Turabi, terbentuk setelahnya. Negosiasi dengan pemerintah Sudan yang bertujuan dapat mencapai rekonsiliasi berujung nihil sehingga pemerintah Sudan pada akhir Maret 2003 menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan kekerasan. Meningkatnya kekerasan di Darfur ditandai dengan adanya serangan pemberontak terhadap Bandar udara al-Fasher (ibu kota Darfur Utara) pada 25 April 2003 yang menghancurkan lima pesawat militer dan menewaskan setidaknya 70 anggota militer Sudan.<sup>187</sup> Hal ini semakin memancing pemerintah Sudan untuk melakukan perlawanan dan kekerasan terhadap pemberontak di Darfur. Pemerintah Sudan yang sedang kewalahan dengan konflik di bagian Selatan menganggap mobilisasi tentara dari Selatan untuk melawan para pemberontak akan menelan biaya yang sangat besar. Selain itu, adanya kecurigaan pemerintah Sudan atas loyalitas angkatan bersenjata Sudan yang kebanyakan direkrut dari Darfur kemudian meresponnya dengan mempersenjatai milisi dari suku yang beraliansi dengan pemerintah.<sup>188</sup> Pemerintah Sudan langsung meminta bantuan kepada milisi Arab di Darfur dan mengizinkan mereka untuk melakukan apapun terhadap kelompok petani yang menetap. Kekerasan pun semakin meningkat dengan penyerangan terhadap perkampungan-perkampungan di Darfur.<sup>189</sup> Sejak tahun 2003 dan seterusnya, Janjawid mengubah fokus penyerangan mereka dari melawan pemberontak menjadi menyerang rakyat sipil. Dengan menyerang dan memindahkan secara paksa kelompok etnis yang mana pemberontak bergantung dukungan dari mereka, Janjawid dan pemerintah Sudan berharap mereka dapat mencapai tujuan kontra-pemberontakan.<sup>190</sup>

Meski minyak bukan alasan bagi pemindahan paksa penduduk secara besar-

<sup>186</sup> \_\_\_\_, "Eritrea, Chad Accused of Aiding Sudan Rebels", diakses dari

<http://www.afrol.com/articles/13898>, pada tanggal 1 Desember 2010, pukul 13:05 WIB

<sup>187</sup> Amnesty International, "Sudan Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur", *loc.cit.*, hlm.8.

<sup>188</sup> United Nations Security Council, "S/2006/65", *loc.cit.*, hlm.13.

<sup>189</sup> Amnesty International, "Sudan Arming the Perpetrators of Grave Abuses in Darfur", *loc.cit.*, hlm.8.

<sup>190</sup> Julie Flint dan Alex de Waal, *Darfur: A Short History of a Long War*, (New York: Zed Books, 2005), hlm.104

besaran, perusakan kampung-kampung, pembunuhan dan pemerkosaan rakyat sipil yang terjadi di Darfur, namun pemerintah Sudan menggunakan metode yang sama dengan konflik di Selatan seperti menggunakan pesawat dan helikopter tempur yang didapatkan dari Cina untuk membombardir perkampungan-perkampungan di Darfur yang dianggap menjadi sarang perlindungan bagi pemberontak dan mempersenjatai milisi suku Arab nomaden yang ingin mendapatkan kawasan Darfur. Milisi tersebut didanai oleh pemerintah serta disokong oleh tentara Sudan untuk memindahkan warga sipil secara paksa. Dari kawasan Darfur yang begitu luas, khususnya Darfur Barat, milisi Janjawid merupakan aktor utama dalam pemindahan paksa dan pelaku kekerasan.<sup>191</sup> Janjawid sendiri dalam bahasa Arab berarti *'devil-horsemen'*. Milisi tersebut diperbolehkan untuk menyimpan apa saja yang mereka rampas seperti binatang ternak, perabotan rumah tangga, hingga wanita dan anak-anak.<sup>192</sup> Dalam laporan *the International Commission of Inquiry on Darfur* pada tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah Sudan dan Janjawid merupakan aktor yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di Darfur yang merupakan kejahatan atas hukum internasional. Atas perannya yang krusial dalam konflik Darfur, pelucutan senjata Janjawid juga merupakan salah satu poin yang tercantum di dalam *Darfur Peace Agreement*.<sup>193</sup> Peran Janjawid di Darfur merupakan pendukung bagi militer Sudan. Ketika militer Sudan membombardir perkampungan Darfur dari udara, Janjawid memiliki peranan untuk menyerang perkampungan dengan senjata kecil dan ringan dari darat dengan menunggangi unta atau kuda.<sup>194</sup> Selain perannya sebagai milisi, Janjawid juga dilaporkan tergabung dalam *Popular Defense Force*, memakai seragam seperti tentara, dan menaiki mobil *SUV* milik pemerintah Sudan. Selain

<sup>191</sup> Amnesty International, "Sudan/China: Appeal by Amnesty International to the Chinese government to the occasion of the China-Africa Summit for Development and Cooperation", diakses dari [www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006](http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006), pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 14.45 WIB

<sup>192</sup> Julie Flint, "Beyond 'Janjaweed': Understanding the Militias of Darfur", diakses dari [http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan\\_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf), pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 12:30 WIB, hlm.16

<sup>193</sup> Clea Kahn, "Conflict, Arms, and Militarization: The Dynamics of Darfur's IDP Camps", diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-15-Conflict-Arms-Militarization.pdf>, pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 12:21 WIB.

<sup>194</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.33.

*PDF*, milisi Janjawid juga terintegrasi ke dalam pasukan keamanan pemerintah Sudan yang formal termasuk tentara dan polisi.<sup>195</sup>

Sementara milisi Janjawid mendapatkan dukungan persenjataan dari pemerintah Sudan, kebanyakan persenjataan yang digunakan oleh pemberontak di Darfur didapatkan dari pembajakan konvoy militer Sudan atau hasil rampasan dalam medan pertempuran. Kapabilitas dari kelompok bersenjata di Darfur, terutama *JEM*, cocok dengan persenjataan militer Sudan yang hilang saat pertempuran. Dekatnya korelasi antara pasokan senjata militer Sudan dengan persenjataan dan amunisi *JEM*, dilihat dari tipe senjata, manufaktur, dan kemiripan nomer *batch* mendukung pandangan bahwa persenjataan yang dirampas dari militer Sudan merupakan sumber utama bagi kelompok bersenjata di Darfur.<sup>196</sup> Selain itu, kelompok bersenjata di Darfur juga diuntungkan dengan pasokan senjata dari pemerintah Chad yang sedang menghadapi *proxy war* dengan Sudan. Sebagai contoh, pengiriman senjata kecil kepada militer Chad (termasuk senapan serbu dan amunisi dari Israel dan Serbia antara Juli dan September 2006) muncul dengan cepat di antara *National Redemption Front* dan juga pasukan *JEM* di Darfur pada Maret 2007 dan Juli 2008. Meski dukungan senjata langsung dari militer Chad belum dapat dikonfirmasi, namun *JEM* dan beberapa faksi *SLA* telah beroperasi secara terbuka di Chad timur sejak tahun 2005 dan secara operasional berinteraksi dengan elemen militer dan pasukan keamanan Chad. Laporan yang serupa dari sumber *SLA* dan *JEM* pada tahun 2006 juga menyebutkan senjata-senjata tersebut didapatkan dari kawasan Al Kufrah di bagian tenggara Libya. Di tahun 2007, pesawat yang dikontrol oleh *JEM* dilaporkan mengirimkan senjata termasuk lebih dari 3.000 senjata tipe AK dan senjata anti-pesawat yang berasal dari Eropa Timur kepada pasukan *JEM* di Chad pada awal 2007.<sup>197</sup> Dukungan persenjataan pemerintah Chad terhadap pemberontakan di Darfur Barat juga disebabkan oleh kesamaan latar belakang etnis para pemberontak dengan para pemimpin pemerintahan di Chad. Selain Chad, pemberontak juga mendapatkan dukungan senjata dari Eritrea yang dalam beberapa tahun belakangan hubungannya

<sup>195</sup> Amnesty International, "Sudan Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur", *loc.cit.*, hlm.8.

<sup>196</sup> Small Arms Survey, "Supply and Demand: Arms Flows and Holdings in Sudan", *loc.cit.*, hlm.5

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm.5

dengan Khartoum sedang terganggu.<sup>198</sup> Selain mendapatkan senjatanya dari negara tetangga seperti Chad, Libya, Eritrea dan hasil rampasan senjata dari militer Sudan, para pemberontak juga mendapatkan senjata dari *SPLA (Sudan People's Liberation Army)* yang berbasis di Sudan Selatan.<sup>199</sup> Di bawah ini merupakan gambar peta Sudan dan memperlihatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Sudan. Di antaranya merupakan negara pemasok senjata bagi pemberontak di Darfur, sementara negara lainnya berisiko terkena dampak ketidakamanan dan ketidakstabilan.

**Gambar 3.1 Peta Sudan**



Sumber: LC Hurst, "China's Oil Rush in Africa", diakses dari [www.iags.org/chinainafrika.pdf](http://www.iags.org/chinainafrika.pdf),

Akibat konflik antara militer Sudan-milisi Janjawid dan pemberontak di Darfur, lebih dari 300.000 ribu orang telah menjadi korban jiwa dan lebih dari 2 juta orang harus meninggalkan rumahnya akibat hingga saat ini. Konflik Darfur tidak

<sup>198</sup> \_\_\_\_\_, "Eritrea, Chad Accused of Aiding Sudan Rebels", *loc.cit.*

<sup>199</sup> Small Arms Survey, "The Militarization of Sudan: A Preliminary Review of Arms Flows and Holdings", *loc.cit.*, hlm.8

hanya merupakan tragedi bagi penduduk yang tinggal di sana tetapi juga merupakan bagian dari dinamika ketidakamanan kawasan yang melibatkan Sudan secara keseluruhan, Chad, Uganda, Republik Afrika Tengah, Libya, Eritrea, dan Mesir. Ditambah dengan kepentingan *major power* di Afrika secara umum dan minyak Sudan secara khusus, maka menjadi jelas bahwa Darfur memiliki relevansi bagi stabilitas di Afrika secara keseluruhan dan keamanan global.<sup>200</sup> Oleh karenanya pada 8 April 2004, seiring dengan eskalasi konflik di Darfur, tercapailah *N'Djamena Humanitarian Ceasefire Agreement* yang ditengahi oleh Chad dan ditandatangani oleh *SLA*, *JEM*, dan pemerintah Sudan. Meski demikian, pada akhirnya gencatan senjata ini dilanggar oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>201</sup>

Setelah penandatanganan gencatan senjata, UA lalu mengotorisasikan penempatan *AMIS (African Union Mission in Sudan)* pada 4 Juni 2004 untuk memastikan implementasi gencatan senjata. Luasnya kawasan Darfur, kurangnya logistik, dan lemahnya mandat membuat operasi *AMIS* ini penuh dengan tantangan.<sup>202</sup> *AMIS* awalnya diperkuat dengan perlindungan 300 pasukan dari Nigeria dan Rwanda. Tugas *AMIS* adalah melindungi rakyat sipil dan badan kemanusiaan yang beroperasi di Darfur. Pasukan *AMIS* ditugaskan untuk mencegah pembunuhan dan pemindahan rakyat sipil secara paksa. Meski demikian, karena terbatasnya sumber daya, besarnya tingkat kekerasan dan pemindahan secara paksa yang terus berlangsung, maka misi tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk mendukung proses perdamaian di Darfur. Kurangnya efektivitas *AMIS* dalam menjaga perdamaian juga disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang.<sup>203</sup>

Pada Oktober 2004, Presiden Sudan, Omar al-Bashir melancarkan serangan terhadap badan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut. Menurut al-Bashir, “Organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Darfur merupakan musuh bagi Sudan.”

<sup>200</sup> Arvid Ekengard, “The African Union Mission in Sudan (AMIS): Experiences and Lessons Learned”, diakses dari [www.foi.se/upload/projects/Africa/foir2559.pdf](http://www.foi.se/upload/projects/Africa/foir2559.pdf), pada tanggal 28 November 2010, pukul 02:20 WIB, hlm.7

<sup>201</sup> United Nations Security Council, “S/2006/65”, *loc.cit.*, hlm.14

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm.14

<sup>203</sup> Arvid Ekengard, “The African Union Mission in Sudan (AMIS): Experiences and Lessons Learned”, *loc.cit.*, hlm.4,

Meski mengetahui keburukan pemerintah Sudan, Cina tidak melakukan atau menyatakan apapun atas hal ini.<sup>204</sup> Pada 5 Oktober 2004, Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Sudan, Jan Pronk, melaporkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap gencatan senjata dari kedua belah pihak – serangan dan serangan balasan. Adanya serangan oleh tentara Sudan sering kali melibatkan helikopter bersenjata, namun frekuensinya semakin jarang pada akhir bulan. Lalu pada laporannya tanggal 4 November, ia menyatakan bahwa situasi di Darfur semakin memburuk dan tensi yang ada telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak awal Agustus.<sup>205</sup> Oleh karenanya, periode awal konflik Darfur di tahun 2003-2004 merupakan periode di mana kekerasan paling banyak terjadi dan konflik berada pada titik kulminasinya. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004.

UA kemudian menyadari bahwa *AMIS* tidak didukung dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi tugasnya. Kemudian pada 20 Oktober 2004 mulai ada masukan konkrit bagi perbaikan dan perluasan operasi yang dikenal sebagai *AMIS II*. *AMIS II* melibatkan penambahan kekuatan militer menjadi 2.341 pasukan dan polisi sipil sebanyak 815 orang. Mandat dari pasukan tersebut termasuk mengawasi dan memverifikasi ketentuan keamanan dalam mengembalikan para pengungsi dan keamanan di sekitar kamp pengungsi; mengawasi dan memverifikasi usaha pemerintah Sudan dalam melucuti senjata milisi yang disokong pemerintah; mengamati, mengawasi, dan melaporkan keefektivitasan polisi setempat. Mandat dari *AMIS* ini juga termasuk melindungi warga sipil yang sedang berada di bawah ancaman.<sup>206</sup> Namun karena kendala logistik, penempatan pasukan tersebut harus mundur dari jadwal awal hingga 25 April 2005. Meski demikian, ternyata penambahan pasukan tersebut belum mampu meredakan konflik dan terus berlangsungnya kekerasan dan pelanggaran HAM di Darfur membuat UA bersama-

---

<sup>204</sup> Eric Reeves, "China's Propaganda Campaign Can't Obscure Complicity in Darfur Genocide", dalam *Sudan Tribune*, 6 Maret 2008, diakses dari <http://mx.sudantribune.com/spip.php?article26260>, pada tanggal 15 Juni 2010, pukul 22:50 WIB.

<sup>205</sup> Amnesty International, "Sudan Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur", diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/139/2004>, pada tanggal 22 November 2010, pukul 14:45 WIB, Hlm.4.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm.5.

sama dengan PBB berusaha untuk menambah kekuatan pasukan menjadi 6.171 tentara dan 1.560 personel kepolisian. Namun lagi-lagi kendala logistik seperti bahan bakar pesawat dan konstruksi kamp menghambat penempatan pasukan tersebut.<sup>207</sup>

Pemindahan orang secara paksa terus meningkat ketika *AMIS* pertama kali ditempatkan di Darfur dan terus meningkat hingga April 2005 ketika *AMIS* telah ditempatkan di Darfur selama hampir setahun. Dari pertengahan 2005 hingga akhir tahun 2005, jumlah orang yang mengalami pemindahan secara paksa cenderung menurun. Namun setelah itu, jumlahnya kembali meningkat secara berkelanjutan hingga mencapai 2,44 juta pada April 2008. Pemindahan secara paksa yang terus meningkat selama tahun 2006 dan 2007 dapat diinterpretasikan bahwa *AMIS* gagal dalam melindungi rakyat sipil selama dua tahun operasinya berlangsung.<sup>208</sup>

Perjanjian gencatan senjata yang merupakan bagian dari *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* ditandatangani oleh *SPLA* di bagian Selatan dan pemerintah Sudan pada tahun 2005. Perjanjian tersebut berisi tentang larangan ‘penambahan amunisi, senjata, dan perlengkapan militer ataupun senjata mematikan lainnya’ baik bagi militer Sudan maupun tentara *SPLA* di dalam Zona Gencatan Senjata yang telah disetujui.<sup>209</sup> Setelah 21 tahun berkonflik, *CPA* mulai membawa perdamaian di Selatan pada tahun 2005. Lebih dari 2 juta korban jiwa berjatuhan dalam konflik tersebut karena kekerasan, penyakit, maupun kelaparan akibat dari perang Utara-Selatan. 4 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal mereka dan 600.000 orang menjadi pengungsi di luar Sudan. *CPA* mengatur bahwa Khartoum dan *Government of Southern Sudan (GoSS)* akan mendapatkan porsi yang sama dari hasil ekstraksi minyak. *CPA* juga berisi tentang pemilu nasional yang akan dilakukan pada tahun

<sup>207</sup> Human Rights Watch, “Imperatives for Immediate Change The African Union Mission in Sudan”, diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/37-the-crisis-in-darfur/508-human-rights-watch-sudan-imperatives-for-immediate-change-the-african-union-mission-in-sudan>, pada tanggal 27 November 2010, pukul 03:40 WIB

<sup>208</sup> UNOCHA, “Sudan-Darfur Humanitarian Profile –June 2, 2008”, diakses dari <http://www.unsudanig.org/library/mapcatalogue/darfur/data/dhnp/Map%201226%20Darfur%20Humanitarian%20Profile%20June%203%202008.pdf>, pada tanggal 28 November 2010, pukul 14:50 WIB

<sup>209</sup> Mike Lewis, “Skirting the Law: Sudan’s Post-CPA Arms Flows”, diakses dari [http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan\\_pdf/SWP-18-Sudan-Post-CPA-Arms-Flows.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-18-Sudan-Post-CPA-Arms-Flows.pdf), pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 12:20 WIB, Hlm.19

2009 setelah sensus dan Sudan Selatan akan melakukan referendum di tahun 2011 untuk memutuskan apakah akan terus menjadi bagian dari Sudan atau melepaskan diri dan merdeka. *CPA*, disamping ketidaksempurnaannya, setidaknya secara temporer mampu menghentikan pertempuran antara Khartoum dan *SPLA*. Namun dengan alasan sama yang mendorong Perang Utara-Selatan, yakni marjinalisasi dan kurangnya pembangunan, mendasari kekerasan di Darfur, yang kemudian dapat mengancam *CPA*.<sup>210</sup> Penolakan pemerintah Sudan untuk mengikutsertakan Darfur dalam perjanjian Utara-Selatan mengenai pembagian kekayaan dan kekuasaan ini juga semakin mendorong para pejuang untuk melakukan pemberontakan dan memperparah situasi di Darfur. Oleh karenanya, penandatanganan *CPA* nyatanya tidak membawa keamanan dan stabilitas bagi Sudan karena konflik Darfur justru sedang mencapai puncaknya ketika kesepakatan tersebut ditandatangani.<sup>211</sup>

Tahun 2005, konflik bersenjata terus terjadi di Darfur meskipun jumlahnya lebih rendah dari akhir 2003 dan 2004. Rendahnya tingkat konflik ini di antaranya disebabkan oleh kehadiran pasukan *AMIS*, perpindahan populasi dari kawasan yang rawan konflik ke kamp-kamp pengungsi, tekanan komunitas internasional, dan konsolidasi kontrol area oleh pihak-pihak yang berperang. Beberapa serangan terhadap perkampungan secara signifikan terjadi sejak akhir Agustus 2005. Pada 28 September 2005, kamp pengungsi Aro Sharow dan perkampungan Acho dan Gozmena diserang oleh milisi bersenjata, mengakibatkan jatuhnya 32 korban jiwa. Pada 23 Oktober 2005, milisi menyerang perkampungan suku Fur di Tama (Darfur Selatan) yang membawa korban jiwa sebanyak 12 orang. Pada akhir November, militer pemerintah Sudan menggunakan helikopter untuk melakukan pengintaian dan menyerang para pemberontak di kawasan Jebel Moon di Darfur Barat. Panel Ahli PBB, *AMIS*, dan pengamat internasional lainnya melihat adanya perkembangan serta mobilisasi angkatan bersenjata Sudan di Darfur. Hal ini didukung dengan adanya laporan mengenai peningkatan pengintaian dan pengawasan udara oleh pesawat

---

<sup>210</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.4

<sup>211</sup> Arvid Ekengard, "The African Union Mission in Sudan (AMIS): Experiences and Lessons Learned", *loc.cit.*, hlm.12

pemerintah. Hal ini diperkirakan merupakan langkah Sudan untuk mempersiapkan atau mengantisipasi operasi perdamaian yang meluas di Sudan.<sup>212</sup>

Dalam laporan *UN Panel of Experts on Darfur* disampaikan bahwa, “Di samping adanya pemahaman yang jelas terhadap kewajiban di dalam resolusi DK PBB 1591 (2005), dalam penulisan laporan ini (31 Agustus 2006), pemerintah Sudan belum meminta persetujuan dari komite untuk memindahkan senjata, amunisi atau peralatan militer lainnya ke dalam Darfur. Oleh karenanya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi 1591.”<sup>213</sup> Dengan persenjataan yang terus masuk ke dalam Darfur, Panel juga menemukan bukti meluasnya pelanggaran hukum kemanusiaan internasional di Darfur selama periode 29 Maret hingga 5 Desember 2005. Pihak-pihak yang terlibat dalam *N’Djamena Ceasefire Agreement* dan pemberontak lainnya yang beroperasi di Darfur telah melakukan operasi militer tanpa pandang bulu. Pemerintah Sudan dan kelompok milisi secara terpisah dan juga dalam beberapa kesempatan, secara bersama-sama melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil; secara sengaja menargetkan warga sipil dan objek sipil; gagal untuk mengambil langkah yang dapat membedakan warga sipil dan pejuang serta antara objek sipil dan militer; menghancurkan properti sipil; serta terlibat dalam kekerasan seksual. *SLA* dan *JEM* juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda.<sup>214</sup> Tidak adanya pembatasan antara target militer dan sipil oleh kedua pihak semakin memperparah status keamanan di Darfur.

Dengan tingkat kekerasan yang masih tinggi maka tidak ada tanda bahwa penandatanganan *DPA* nantinya dapat memperbaiki situasi keamanan baik di Darfur maupun Chad bagian timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai laporan terkait kekerasan serius yang berhubungan dengan serangan militer skala besar yang dilakukan oleh Khartoum di kawasan Gereida (Selatan Darfur), beberapa hari sebelum adanya tenggat waktu bagi penyusunan perjanjian. Laporan mengenai kekerasan di perbatasan Chad-Darfur juga semakin serius dan rakyat sipil dalam

---

<sup>212</sup> United Nations Security Council, “S/2006/65”, *loc.cit.*, hlm.15.

<sup>213</sup> Human Right First, “Investing in Tragedy: China’s Money, Arms, and Politics in Sudan”, *loc.cit.*, hlm.14.

<sup>214</sup> United Nations Security Council, “S/2006/65”, *loc.cit.*, hlm.6.

jumlah besar juga telah pindah dari kawasan tersebut.<sup>215</sup> Pada Mei 2006, putaran ketujuh pembicaraan mengenai perdamaian berakhir dengan ditandatanganinya *DPA* oleh Khartoum dan kelompok pemberontak. Penandatanganan tersebut membawa pada pembicaraan di PBB mengenai penempatan 26.000 pasukan perdamaian asing untuk memisahkan antara pemberontak dan milisi yang didukung oleh Khartoum.<sup>216</sup> *DPA* diharapkan dapat menciptakan jendela baru bagi perdamaian dan motivasi untuk menempatkan pasukan perdamaian di lapangan. Meski kelemahan *DPA* langsung terlihat, namun misi perdamaian di Darfur saat itu berkembang dengan adanya rencana penempatan pasukan perdamaian PBB. Ketidakkampuan *AMIS* untuk menghentikan pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, serta pemindahan secara paksa warga sipil mendorong *the African Union Peace and Security Council (PSC)* pada bulan Maret meminta adanya transisi dari pasukan perdamaian *AMIS* ke pasukan PBB di Darfur. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, keefektifan *AMIS* terbatas oleh kurangnya perlengkapan dan pendanaan, masalah internal organisasi, dan keterbatasan tempat beroperasi yang dibatasi oleh pemerintah.<sup>217</sup> Di sisi lain, kehadiran pasukan PBB juga tidak terlepas dari meningkatnya kehendak Cina untuk menggunakan pengaruhnya dalam mendorong Khartoum agar menerima penempatan pasukan perdamaian PBB di Darfur. Perdebatan diplomatis selama dua tahun menyediakan jendela bagi perkembangan kebijakan Cina terhadap Darfur. Sejak awal, Khartoum menunjukkan penentangannya terhadap penempatan pasukan perdamaian PBB di Darfur karena ketakutan akan okupasi neo-imperialis Barat. Oleh karenanya, pada Maret 2006, Uni Afrika dan DK PBB memperpanjang *African Union Mission in Sudan (AMIS)* selama 6 bulan dan mendukung transisi pasukan PBB atas persetujuan pemerintah Sudan.<sup>218</sup>

Meski perjanjian perdamaian telah ditandatangani, namun warga sipil yang

<sup>215</sup> Eric Reeves, "Quantifying Genocide in Darfur: May 13, 2006 (Part 2)", diakses dari [www.sudanreeves.org/Article104.html](http://www.sudanreeves.org/Article104.html), pada tanggal 25 Oktober 2010, pukul 10.20 WIB

<sup>216</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm. vii

<sup>217</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2007", *loc.cit.*

<sup>218</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm. 20.

tergusur dari rumahnya di Darfur dan pengungsi Darfur di Chad tidak bisa kembali ke kampungnya karena masalah keamanan. Beberapa kelompok bersenjata yang menentang *DPA* kemudian membentuk *National Redemption Front (NRF)* di bulan Juni 2006. Setelah membangun pasukannya secara besar-besaran di Darfur pada bulan Agustus 2006, pemerintah melancarkan serangan di Darfur Utara dan Jebel Marra yang juga diikuti dengan penjarahan perkampungan oleh Janjawid. Angkatan Udara Sudan juga terus melakukan serangan udara. Di bulan November, pembunuhan dan pemindahan paksa warga sipil yang dilakukan oleh Janjawid di dekat perkampungan yang dikontrol oleh kelompok oposisi semakin meningkat.<sup>219</sup>

Pada perkembangannya, *DPA* pun terbukti tidak relevan dengan apa yang terjadi di Darfur karena kekerasan justru meningkat setelah tercapainya kesepakatan tersebut. Tak lama setelah ditandatanganinya *DPA*, pada 11 September 2006, angkatan udara Sudan menyerang kawasan Deribat di Darfur bagian barat dan perkampungan di sekitarnya dengan jet tempur Fantan. Serangan udara ini terus terjadi hingga 11 Desember 2006 di mana perkampungan tersebut mengalami 13 kali serangan udara dan total ada sekitar 50 bom dan roket yang diluncurkan di perkampungan sekitarnya. Lalu pada akhir Desember 2006, kekuatan bersenjata Sudan, milisi Arab dan suku Fur melancarkan serangan terkoordinasi ke Katur dan perkampungan lainnya di selatan Deribat. Serangan tersebut didahului dengan serangan udara. Lalu para milisi menjarah dan menembakkan senapan mesin dan senjata lainnya ke rumah-rumah dan sasaran sipil lainnya. Serangan yang serupa juga terjadi di perkampungan lain di kawasan tersebut. Ribuan orang pun harus mengungsi dari kampungnya. Tentara Sudan juga menggunakan truk militer yang didapat dari Cina untuk memfasilitasi serangan ke Darfur selama pelanggaran terhadap HAM di Darfur terjadi. Sebagai contoh, tentara Sudan menggunakan truk Dong Feng dan persenjataan anti-pesawat buatan Cina dalam serangan ke Sirba pada 15 Desember 2007.<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2007", *loc.cit*

<sup>220</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/013/2008/en/8550ba57-7069-11dd-8e5e-43ea85d15a69/act300132008en.pdf>, pada tanggal 19 Maret 2010, pukul 15.45 WIB,

Dari September 2006 hingga Juni 2007, pemerintah Sudan terus melakukan serangan udara di Darfur. 66 area tercatat mengalami serangan itu. *Amnesty International* pada tahun 2007 mengkhawatirkan Angkatan Udara Sudan telah mentransfer pesawat pembom A-5 Fantan ke Darfur tanpa izin dari *UN Sanctions Committee* dan sangat mungkin untuk menggunakan jet tersebut dan pesawat lainnya serta pengadaan ahli untuk menerbangkan pesawat tersebut dari Cina bagi serangan yang tidak pandang bulu di Darfur dan merupakan pelanggaran terhadap embargo senjata dan hukum kemanusiaan internasional. Resolusi DK PBB 1591 (2005) dalam paragraph 6 sebelumnya telah secara eksplisit menuntut Khartoum untuk “segera menghentikan serangan udara militer di dan sekitar kawasan Darfur”. Meski demikian, setelah itu serangan udara terus terjadi.<sup>221</sup>

Konflik di Darfur telah semakin kompleks karena suku Arab juga mulai terlibat pertikaian satu sama lain sejak tahun 2007 dan kelompok pemberontak pun semakin pecah. Kamp-kamp pengungsi juga menjadi sumber ketidakamanan karena beberapa pihak membawa senjata ke kamp tersebut dan merekrut pejuang di antara para pengungsi. Konflik Darfur ini semakin mengganggu stabilitas kawasan, khususnya hubungan antara Chad dan Sudan karena lokasi Darfur yang dekat dengan perbatasan Chad.<sup>222</sup> Selain itu, pemberian senjata pada kelompok yang beraliansi dengan pemerintah di Darfur justru semakin intensif setelah ditandatanganinya *DPA*, meski *DPA* sebenarnya berisi tentang pelucutan senjata milisi Janjawid. Selain Janjawid, kelompok lain seperti *Popular Defense Forces (PDF)*, intelijen perbatasan, dan polisi perbatasan juga menerima persenjataan dari pemerintah Sudan.<sup>223</sup> Meski milisi Janjawid menyerang warga sipil dengan dukungan, termasuk dukungan udara, dari Angkatan Bersenjata Sudan, namun beberapa milisi Janjawid juga dilaporkan

---

hlm.95.

<sup>221</sup> Eric Reeves, “China’s Propaganda Campaign Can’t Obscure Complicity in Darfur Genocide”, *Op.Cit*

<sup>222</sup> International Crisis Group, “Darfur’s New Security Reality”, diakses dari [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/Darfurs%20New%20Security%20Reality.ashx](http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/Darfurs%20New%20Security%20Reality.ashx), pada tanggal 28 November 2010, pukul 03:20 WIB

<sup>223</sup> Amnesty International, “Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party”, *loc.cit.*, hlm.85

melawan pemerintah. Angkatan Udara Sudan membombardir target sipil dan non-militer dengan menggunakan pesawat jet dan helikopter. Beberapa pesawat AU Sudan bahkan dicat dengan warna putih agar menyerupai pesawat PBB. Kelompok bersenjata berusaha menyerang pemerintah dan di antara mereka sendiri. Proliferasi senjata mendorong pertentangan kecil berubah menjadi konflik besar dan beberapa kali terjadi konflik antar kelompok etnis, termasuk antar sesama kelompok Arab yang berbeda dan tergabung dalam pasukan militer pemerintah.<sup>224</sup> Semakin banyaknya pihak-pihak yang bertikai serta aliran senjata Cina yang terus masuk ke Darfur semakin membawa kompleksitas yang mendalam terhadap konflik ini dan tentunya mengganggu keamanan dan stabilitas Sudan serta negara-negara di sekitarnya.

Pada 1 Oktober 2007, kondisi di Darfur belum dapat dikatakan membaik. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, yakni sekitar 4,2 juta jiwa.<sup>225</sup> Di tahun 2007, keamanan di Darfur pun menurun secara mengkhawatirkan. Konflik ini semakin memperparah tensi yang ada tidak hanya di Chad, tetapi juga di Republik Afrika Tengah, dan mengancam kestabilan seluruh kawasan. Pasukan perdamaian *AMIS* menjadi tidak berfungsi karena tidak bisa menjalankan tugasnya dan tidak hanya dilihat sebagai musuh oleh pihak yang bertikai, tetapi juga sebagai sumber untuk perampasan. Empat juta orang atau lebih dari setengah populasi Darfur, amat bergantung pada bantuan untuk kelangsungan hidupnya, namun hampir 400 relawan dari sekitar 13.000 relawan yang ada harus dievakuasi dalam satu bulan (Desember 2006) karena adanya serangan terhadap pusat bantuan dan keamanan yang semakin mengganggu menyusul adanya penolakan terhadap *DPA*.<sup>226</sup> Meski perjanjian telah disepakati, namun konflik, pemindahan warga sipil, dan pembunuhan terus bertambah. Kebanyakan dari warga sipil yang tergusur dari rumahnya juga menentang perjanjian tersebut karena

---

<sup>224</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2008", diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2008](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2008), pada tanggal 29 Oktober 2010, pukul 14.55 WIB

<sup>225</sup> Eric Reeves, "China's Propaganda Campaign Can't Obscure Complicity in Darfur Genocide", *Op.Cit.*

<sup>226</sup> Julie Flint, "Rhetoric and Reality: The Failure to Resolve the Darfur Conflict", diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-19-The-Failure-to-Resolve-the%20Darfur-Conflict.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 17.50 WIB, hlm.21

dirasakan kurang menjamin keamanan mereka untuk kembali ke rumahnya. Selain itu, pemerintah gagal untuk melucuti senjata milisi Janjawid yang terus menyerang warga sipil di Darfur dan melakukan serangan lintas batas hingga ke Chad. Janjawid juga terus bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan dan dalam unit militer serta terus menerima dana dan bantuan materi dari pemerintah.<sup>227</sup> Pergerakan senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya ke Darfur amat besar dan terus berlangsung. Pada bulan Februari 2008 dilaporkan bahwa ada sekitar 59 kargo truk yang berisi senjata dan amunisi bergerak dari el-Fasher dan Nyala ke el-Geneina di bagian Darfur Barat dan juga ke kawasan Kerenek di mana kelompok pemberontak Chad berusaha untuk mendapatkan kekuasaan di N'Djamena dipersenjatai oleh Khartoum.<sup>228</sup>

Pemisahan faksi *SLA* dan *JEM* membawa pada proses fragmentasi. Oleh karenanya, pada awal 2008 jumlah kelompok bersenjata yang beroperasi di Darfur semakin banyak dan beragam. Karena terus berlangsungnya serangan pada warga sipil dan pelanggaran berat terhadap HAM yang khususnya dilakukan oleh pemerintah dan kelompok paramiliter, sekitar 280.000 orang harus mengungsi selama tahun 2007 dan menjadikan jumlah pengungsi Darfur lebih dari 2.387.000 pada awal 2008. Jumlah korban jiwa di Darfur diperkirakan lebih dari 300.000 orang sejak konflik dimulai pada tahun 2003.<sup>229</sup>

Pada Januari 2008, hanya delapan hari setelah *UNAMID* secara resmi mengambil alih pasukan perdamaian dari *AMIS* yang misinya berakhir pada 31 Desember 2007, kekuatan bersenjata Sudan menyerang pasukan *UNAMID* di Darfur. Lalu seminggu setelahnya, pesawat militer Sudan membombardir dua perkampungan di dekat Geneina yang merupakan pelanggaran terhadap larangan PBB untuk penyerangan udara di dan sekitar Darfur, yang sesuai dengan Resolusi 1591 PBB pada Maret 2005. Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan tentara Sudan itu

---

<sup>227</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2007", diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2007](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2007), pada tanggal 29 Oktober 2010, pukul 14.55 WIB

<sup>228</sup> Eric Reeves, "China's Propaganda Campaign Can't Obscure Complicity in Darfur Genocide", *Op.Cit*

<sup>229</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", *loc.cit.*, hlm. 85.

membawa banyak korban jiwa karena dilakukan secara merata dan tidak pandang bulu.<sup>230</sup> Pada Februari 2008, pasukan bersenjata Sudan dan milisi Janjawid melakukan serangan terhadap area yang diduduki oleh *JEM* di Darfur. Serangan terjadi di Abu Suruj, Sirba, dan Sileia di Darfur Barat pada 8 Februari dan di Jebel Moon pada 18,19, dan 22 Februari. Angkatan bersenjata Sudan menggunakan taktik tradisionalnya dengan melakukan serangan dengan menggunakan pesawat tempur dan helikopter bersenjata sebelum akhirnya melakukan serangan darat oleh milisi Janjawid dan juga tentara yang berbuntut pada penjarahan dan pemerkosaan di Sirba dan menyerang warga sipil. 115 menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut yang kebanyakan merupakan warga sipil dan sebanyak 30.000 orang harus mengungsi.<sup>231</sup>

Pada 10 Mei 2008, kelompok oposisi bersenjata yang berbasis di Darfur, *JEM*, membawa konflik Darfur ke Khartoum dengan melancarkan serangan ke kota Omdurman. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh tentara Sudan. Serangan terhadap perkampungan meningkat di tahun 2008, dengan perkiraan ada sekitar 270.000-300.000 orang terpaksa mengungsi pada tahun tersebut. Kekerasan terhadap HAM juga terus terjadi meski telah ada penempatan *UNAMID*. Pasukan *UNAMID* sendiri terbatas dengan jumlah pasukan yang tidak cukup dan peralatan militer yang kurang memadai. Dengan hanya 11.415 personel berseragam yang didukung oleh 721 personil sipil internasional, 1.393 staf sipil lokal dan 246 sukarelawan PBB dan hingga 31 Oktober 2008, *UNAMID* belum secara efektif mampu untuk melaksanakan mandatnya di Darfur. Kurangnya helikopter dan transportasi darat menjadi penghalang bagi *UNAMID* untuk melindungi warga sipil dan pasukannya sendiri. Pada tahun tersebut, ada 17 pasukan *UNAMID* yang terbunuh dalam berbagai serangan. *UNAMID* dalam beberapa kasus juga tidak mampu mengintervensi di mana warga sipil Darfur sedang diserang.<sup>232</sup> Dengan kata lain, penempatan *UNAMID* belum secara sepenuhnya mampu mengatasi kondisi keamanan di Darfur.

---

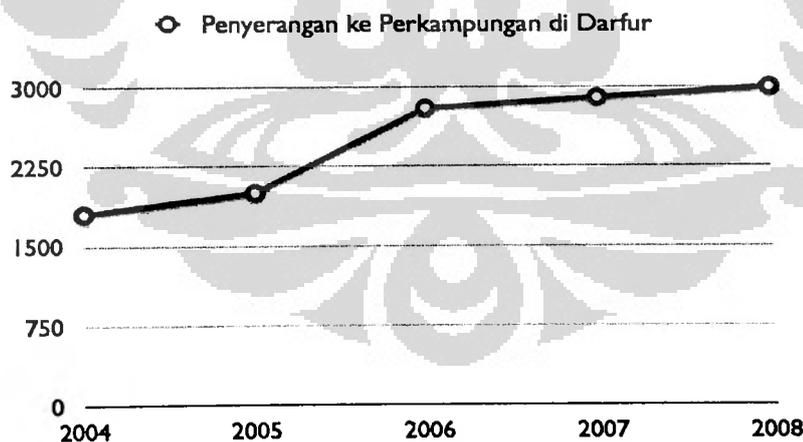
<sup>230</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", *loc.cit.*, hlm.87.

<sup>231</sup> Amnesty International, "Blood at the Crossroads: Making the Case for A Global Arms Trade Party", *loc.cit.*, hlm.87.

<sup>232</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2009", diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2009](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2009), pada tanggal 29 Oktober 2010, pukul 14.55 WIB

Selain menyerang perkampungan dan warga sipil, serangan terhadap iring-iringan bantuan kemanusiaan juga meningkat di tahun 2008. Baik pemerintah Sudan dan pemberontak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hal ini berdampak pada berkurangnya bantuan dari *World Food Programme* ke Darfur. Sebelas sukarelawan terbunuh antara bulan Januari dan Oktober 2008. Meningkatnya serangan terhadap pekerja kemanusiaan, termasuk membajak kendaraan dan penculikan, semakin membatasi aktivitas badan bantuan dan *NGOs* serta akses mereka terhadap komunitas yang paling menderita di Darfur.<sup>233</sup> Meski penyerangan terhadap perkampungan dari tahun 2004-2008 terus meningkat di Darfur (Grafik 3.2), namun jumlah korban yang meninggal di Darfur dilaporkan semakin berkurang –dari ribuan per bulan pada puncak terjadinya konflik di tahun 2003-2004 hingga diperkirakan menjadi 130-150 per bulan dari Januari 2008-Maret 2009.<sup>234</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya rakyat sipil yang mengungsi sehingga korban jiwa menjadi berkurang.

**Gambar 3.2 Jumlah Penyerangan ke Perkampungan di Darfur Tahun 2004-2008**

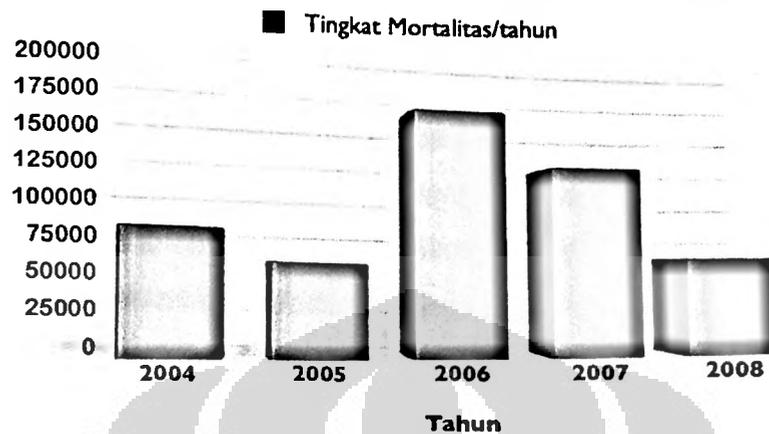


Sumber: \_\_, "Key facts and figures for Sudan with a focus on Darfur", diakses dari [www.unsudanig.org/docs/darfur\\_fact\\_sheet\\_v22\\_5.pdf](http://www.unsudanig.org/docs/darfur_fact_sheet_v22_5.pdf)

<sup>233</sup> Amnesty International, "Sudan – Amnesty International Report 2009", *loc.cit.*

<sup>234</sup> Julie Flint, "Beyond 'Janjaweed': Understanding the Militias of Darfur", *loc.cit.*, hlm.17

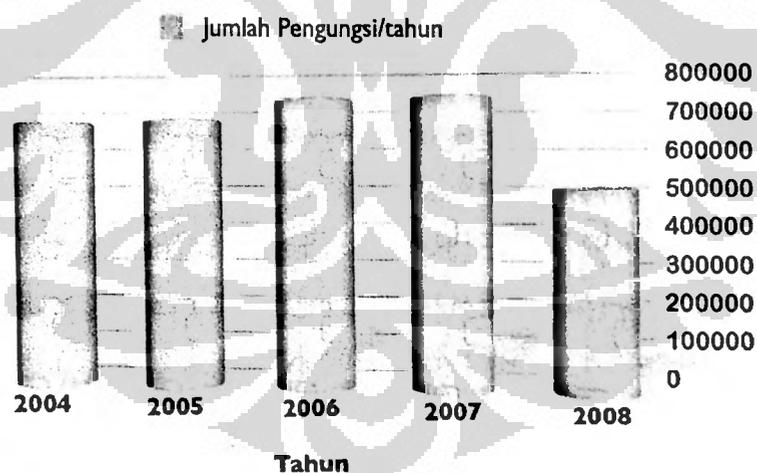
**Gambar 3.3 Jumlah Korban Jiwa di Darfur Tahun 2004-2008**



Tahun	2004	2005	2006	2007	2008
Tingkat Mortalitas	80.000	60.000	160.000	125.000	65.000

Sumber: \_\_, "The Invisible War", diakses dari <http://backspace.com/notes/2009/02/congo-vs-darfur.php>

**Gambar 3.4 Jumlah Pengungsi Darfur Tahun 2004-2008**



Tahun	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Pengungsi	663.119	667.703	719.273	723.794	499.162

Sumber: Awadalla M. Saeed dan Amira Y. Badri, "Policy Analysis Report:Sudan's Internal Population Displacement and Migration – Magnitude and Policy Issues in the New Millennium, diakses dari [www.immis.org/wp-content/uploads/.../Policy-Analysis-Report-Sudan1.pdf](http://www.immis.org/wp-content/uploads/.../Policy-Analysis-Report-Sudan1.pdf)

Dari ketiga grafik di atas, dapat terlihat bahwa penyerangan terhadap perkampungan di Darfur terus meningkat dari tahun 2004 hingga mencapai titik puncaknya di tahun 2008. Penyerangan tersebut terus meningkat meski pada periode 2006-2008 pasokan senjata Cina ke Sudan mengalami penurunan yang drastis. Atas meningkatnya jumlah kekerasan tersebut, perlu diketahui jumlah kepemilikan senjata pemerintah Sudan dan kelompok bersenjata di Darfur hingga tahun 2007 (Tabel 3.1) yang memperlihatkan dominasinya jika dibandingkan dengan kelompok pemberontak. Sementara itu, jumlah korban jiwa di Darfur justru mencapai puncaknya di tahun 2006 dan menurun di tahun 2007 dan 2008. Akibat penyerangan dan kekerasan yang terus terjadi, jumlah pengungsi Darfur pun terus bertambah dan tahun 2006-2007 merupakan tahun di mana pengungsi paling banyak meninggalkan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi keamanan dan stabilitas di Darfur terus memburuk hingga tahun 2008 dengan semakin banyaknya penyerangan yang terjadi. Meski demikian, faktor keamanan tersebut tidak berpengaruh pada jumlah korban jiwa dan jumlah pengungsi karena ketika penyerangan dan kekerasan terus meningkat di tahun 2008, jumlah korban jiwa dan pengungsi di tahun 2008 justru menurun. Hal ini di antaranya juga disebabkan oleh jumlah aliran pengungsi yang telah mencapai puncaknya di tahun 2006 dan 2007. Dengan besarnya jumlah pengungsi yang meninggalkan kawasan rawan konflik di Darfur, maka hal ini juga semakin meminimalisir korban jiwa yang berjatuh.

**Tabel 3.1 Kepemilikan Senjata di Sudan (April 2007)**

Kategori		Jumlah Orang	Tingkat Kepemilikan Senjata	Perkiraan Jumlah Senjata	Persentasi dari Seluruh Senjata yang Ada di Sudan
<b>Sipil</b>		35.000.000			
	Pemilik			6.724	0,3

	senjata yang berlisensi				
	Pemilik senjata yang tidak berlisensi		5/100 orang	1.750.000	67
<b>Pemerintah Sudan</b>					
	<i>Sudan Armed Forces (SAF)</i>	104.000	2,5/personel	260.000	10
	<i>Popular Defense Force (PDF)</i>	80.000	1,2/personel	100.000	4
	<i>People's Popular Police</i>	30.000	1,2/perwira	40.000	1,5
	<i>Sudan Police Force</i>	30.000	1,2/perwira	40.000	1,5
	<i>Intelligence and Security Services</i>	35.000	1,6/perwira	60.000	2,5
	'Polisi minyak'	3.000	1,2/perwira	4.000	0,2
	Polisi Penjara	7.500	1,2/perwira	9.000	0,5
<b>Kelompok Bersenjata Lainnya</b>					
	Kelompok yang beraliansi dengan <i>SPLA</i>	42.000	1,6/pejuang	67.000	2,5
	Janjawid yang beraliansi dengan <i>SAF</i>	10.000	1,6/pejuang	16.000	0,5
	Kelompok pemberontak Darfur	12.000	0,8/pejuang	10.000	0,5

Sumber: Small Arms Survey, "The Militarization of Sudan: A Preliminary Review of Arms Flows and Holdings", *loc.cit.*, hlm.9

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Sudan di tahun 2007 memiliki kapabilitas persenjataan jauh di atas kelompok pemberontak. Kelompok bersenjata di Sudan hanya memiliki setidaknya 4 persen dari seluruh persenjataan yang ada di Sudan, sementara pemerintah Sudan mengontrol 20 persen senjata.<sup>235</sup> Hal ini juga dapat diartikan bahwa kekerasan yang terjadi di Darfur lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Sudan dan milisinya. Tingginya kapabilitas persenjataan pemerintah Sudan juga dapat menjelaskan mengapa kekerasan terus terjadi.

Kondisi keamanan di Darfur yang semakin mengkhawatirkan merupakan akumulasi dari kekecewaan kelompok marjinal dan diperparah dengan sikap represif Khartoum yang didukung oleh persenjataan yang kebanyakan didapatkan dari Cina. Meski telah ada embargo senjata yang ditetapkan oleh DK PBB pada tahun 2004, transfer senjata Cina ke Sudan justru mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2005. Cina membenarkan sikapnya karena menganggap transfer senjata ditujukan bagi pemerintah Sudan dan bukan untuk Darfur. Namun akibat sikap Khartoum yang menolak untuk mematuhi embargo senjata, persenjataan Cina akhirnya digunakan untuk memperparah situasi di Darfur. Oleh dunia internasional dan para pengamat, Cina dianggap menutup mata dengan apa yang terjadi di Darfur karena Cina tidak mungkin tidak mengetahui tentang penggunaan senjatanya di Darfur. Transfer senjata Cina ke Sudan ini sebenarnya bertentangan dengan hukum ekspor senjata Cina yang menekankan bahwa ekspor harus sesuai dengan beberapa prinsip, di antaranya adalah tidak mengganggu perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan. Dari hal tersebut, transfer senjata Cina ke Sudan telah melanggar hukum domestiknya sendiri. Namun demikian, hukum ekspor senjata Cina tidak menjadikan HAM atau hukum kemanusiaan sebagai persyaratan untuk transfer senjata ke negara lain.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm.8

<sup>236</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.14.

### 3.4 Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

Penjualan senjata Cina merefleksikan kepentingan komersil yang begitu murni dan sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Cina. Dalam tatanan dasar, kepentingan tersebut berawal dari program reformasi ekonomi Cina dan keputusannya pada akhir 1970an untuk mengurangi sumber daya yang berhubungan dengan industri militer dan pertahanan. Untuk mengompensasi berkurangnya pendapatan tersebut, para pemimpin Cina mendorong industri pertahanan agar mengubah produksi pertahanan tersebut menjadi barang sipil dan mengekspornya sebagai produk sipil maupun militer. Sebagai sumber pendapatan baru bagi industri militer dan pertahanan Cina, penjualan senjata telah menyediakan keuntungan ekonomi bagi Cina.<sup>237</sup> Selain itu, militer Cina juga memiliki alasan lain untuk mendorong atau mengizinkan ekspor senjata. Karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sistem persenjataan dalam tahap *research and development*, semakin banyak sistem yang diproduksi, maka biaya per unitnya akan semakin rendah. Dengan kata lain, dengan mengekspor senjata yang juga digunakan untuk mengembangkan penggunaan domestik, Cina secara efektif menggunakan dana yang datang dari luar untuk mengembangkan usaha penelitian dan pengembangan domestik.<sup>238</sup>

Selama tahun 1980an, penjualan senjata merupakan sumber signifikan bagi pendapatan luar negeri Cina. Dari tahun 1984 hingga 1987, ketika penjualan senjata Cina mencapai puncaknya, penjualan senjata Cina telah menghasilkan setidaknya 8,2 milyar dolar AS atau setara dengan 7 persen dari total ekspor Cina pada tahun tersebut. Namun demikian hal ini tidak berlangsung lama karena kontribusi penjualan senjata bagi sumber pendapatan Cina semakin berkurang sejak berakhirnya perang Iran-Irak, di mana penjualan senjata di dunia semakin menurun. Karenanya, jumlah penjualan senjata Cina pada tahun 1996 hanya sebesar 1 persen dari total ekspor Cina

---

<sup>237</sup> Daniel Byman dan Roger Cliff, *Op.Cit.*, hlm. 28

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm. 30

di tahun yang sama.<sup>239</sup>

Persenjataan Cina yang murah dan terjangkau merupakan daya tarik tersendiri bagi Negara Dunia Ketiga dan rezim represif yang melakukan pelanggaran HAM seperti Sudan. Beberapa sumber mengatakan bahwa sebenarnya pendapatan yang didapatkan Cina dari penjualan senjata ke Sudan tidak sebanding dengan yang didapatkan Cina dari ekspor barang konsumen dan jasa. Dan meski penjualan senjata tersebut penting bagi beberapa perusahaan dalam *military-industrial complex*, dampak ekonomi secara keseluruhan dalam perekonomian Cina sebenarnya minim. Meski demikian, nilai dari hubungan ekonomi Cina dengan Sudan merupakan hal lain. Cina menukarkan dukungan militer dan politiknya bagi rezim Sudan untuk mendapatkan akses ke sumber minyak Sudan, di mana perusahaan minyak milik pemerintah Cina, *China National Petroleum Company (CNPC)*, merupakan pemegang saham terbesar di dalam dalam *Greater Nile Petroleum Company (GNPOC)*.<sup>240</sup>

Besarnya kebutuhan Cina akan minyak untuk menunjang pertumbuhan ekonominya telah menggantikan posisi Jepang sebagai importir minyak kedua terbesar di dunia setelah AS.<sup>241</sup> Hampir setengah dari kebutuhan minyak Cina diimpor dengan proyeksi bahwa Cina akan mengimpor 60 persen kebutuhan minyaknya di tahun 2020. Oleh karenanya, saat ini Cina berusaha untuk mendapatkan sumber minyak dari berbagai sumber yang ada, tanpa memandang permasalahan HAM di negara tersebut. Sudan merupakan negara pengekspor minyak terbesar ketiga di kawasan Sub-Sahara Afrika setelah Nigeria dan Angola. Menurut *Human Right First*, Cina mengontrol hampir seluruh potensi minyak yang ada di Sudan. Cina memiliki 19 blok minyak, meski hanya sembilan yang memiliki cadangan yang signifikan dan Cina memiliki hak mayoritas untuk mengeksplorasi delapan di antaranya.<sup>242</sup> Sudan sendiri merupakan negara pengekspor minyak terbesar keenam bagi Cina. Sudan merupakan sumber minyak lepas pantai utama bagi Cina tanpa

---

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>240</sup> William D. Hartung, "Deadly Traffic: China's Arms Trade With The Sudan", *loc.cit.*

<sup>241</sup> Esther Pan, "China, Africa, and Oil", *loc.cit.*

<sup>242</sup> William D. Hartung, "Deadly Traffic: China's Arms Trade With The Sudan", *loc.cit.*

adanya saingan yang kuat di dalamnya. Produksi minyak lepas pantai membantu untuk mengisolasi ekonomi Cina dari kemungkinan naiknya harga minyak mentah. Selain itu, perusahaan minyak yang dimiliki oleh pemerintah Cina telah memberikan kepemilikan langsung bagi minyak mentah Sudan dan memungkin Cina untuk menerabas pasar minyak internasional dan dapat menegosiasikan harga langsung dengan Khartoum. Impor minyak Cina diperkirakan 2/3 dari total ekspor minyak Sudan. Pendapatan dari penjualan minyak tersebut digunakan untuk pembelian senjata yang digunakan dalam genosida di beberapa daerah di Sudan, khususnya Darfur.<sup>243</sup> Di sisi lain, penjualan senjata Cina ke Sudan juga dapat membantu mengembalikan sebagian dana yang digunakan dalam pembelian minyak yang begitu besar.<sup>244</sup>

Hubungan Cina-Sudan telah dimulai sejak tahun 1959 dan meski hubungan transfer senjata telah terjalin jauh sebelum minyak menjadi hal yang penting bagi hubungan Cina-Sudan, namun pada perkembangannya persenjataan yang Cina berikan ke Sudan merupakan penstimulus bagi kepentingan utama Cina di Sudan, yakni minyak.<sup>245</sup> Alasan mengapa Cina terus mempersenjatai Khartoum salah satu adalah agar Khartoum terus memberikan akses minyaknya pada Cina.<sup>246</sup> Transfer senjata tersebut digunakan untuk memuluskan jalan Cina agar mendapatkan kesepakatan dalam hal ekstraksi minyak. Penjualan senjata ke negara-negara Afrika khususnya dalam hal ini Sudan telah meningkatkan hubungan Cina dengan para pemimpin mereka dan mengganti kerugian dari biaya pembelian minyak. Cina tidak memiliki perhatian terhadap HAM sebesar AS dan negara-negara Eropa, sehingga Cina cenderung untuk menjual peralatan militer dan senjata kepada siapa saja. Selain itu, Cina juga melihat Sudan dan Afrika sebagai pasar perlengkapan militer yang

---

<sup>243</sup> Eric Reeves, "China, Darfur, and the Olympics: Tarnishing the Torch?", diakses dari <http://www.dreamfordarfur.org/Portals/0/Uploads/Documents/TarnishingTheTorchFINAL.pdf>, pada tanggal 26 Mei 2010, pukul 17.40 WIB

<sup>244</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.4

<sup>245</sup> Ismail S.H. Ziada, "Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations", *loc.cit.*, hlm.12

<sup>246</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.15

berkembang. Eksplorasi sumber minyak yang aktif oleh Cina juga membutuhkan keamanan di sekitarnya. Hal inilah yang mendorong Beijing untuk mengirim para pelatih militer Cina dalam membantu Sudan.<sup>247</sup>

*CNPC*, yang merupakan senjata Cina untuk mengamankan pasokan minyak di negara lain, mulai mendapatkan konsesi pertamanya di blok 6 pada tahun 1995, namun baru mulai beroperasi di Sudan sejak 1997 sebagai salah satu anggota dari *GNPOC*. Sejak itu, *CNPC* mulai memperluas operasinya dan mendapatkan konsesi yang lebih banyak di Sudan. Cina memiliki 40 persen kepemilikan di *GNPOC* dan memiliki hak untuk mengeksplorasi Blok 1 dan 2; dan konsesi atas ladang minyak yang paling produktif, Blok 4. Pada Juli 2006, Cina mulai mendapatkan hasil dari Blok 3 dan 7 yang diperkirakan mampu memproduksi 200.820 barel per harinya. Cina memegang konsesi Blok 6, yang terbentang dari Kordofan Barat hingga Selatan dan Darfur Utara. Cina telah meningkatkan produksi dari Blok 6, dari 10.000 barel di tahun 2005, menjadi 40.000 barel per hari di Juli 2006.<sup>248</sup> Cina memiliki jasa yang begitu besar bagi pengembangan produksi minyak Sudan karena perusahaan Cina memberikan investasi untuk membangun saluran pipa minyak bagi industri minyak Sudan dan mengubah Sudan menjadi negara pengeksport minyak untuk pertama kalinya di tahun 1999. Di antara negara-negara lain di mana *CNPC* beroperasi, Sudan merupakan yang terpenting karena meski impor minyak Cina dari Sudan pada tahun 2004 hanya sebesar 4,7 persen dari total keseluruhan impor minyak Cina, namun pentingnya Sudan berada pada total impor minyak yang dimiliki secara baik oleh *CNPC*.<sup>249</sup>

Produksi dan ekspor minyak mentah Sudan telah meningkat begitu pesat dalam beberapa tahun belakangan, Kementerian Energi Sudan melaporkan produksi minyak telah mencapai 500.000 barel per hari di tahun 2005 meski ada ketegangan

---

<sup>247</sup> Esther Pan, "China, Africa, and Oil", diakses dari [http://www.nytimes.com/cfr/international/slot2\\_011806.html](http://www.nytimes.com/cfr/international/slot2_011806.html), pada tanggal 20 Juni 2010, pukul 12:15 WIB

<sup>248</sup> Amnesty International, "Sudan/China: Appeal by Amnesty International to the Chinese government to the occasion of the China-Africa Summit for Development and Cooperation", diakses dari [www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006](http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006), pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 14.45 WIB

<sup>249</sup> Ismail S.H. Ziada, "Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations", *loc.cit.*

internal, termasuk di bagian utara Darfur. Sudan telah terbukti memiliki cadangan minyak sebesar 563 juta barel, dan memiliki potensi lebih banyak minyak lagi di kawasan lainnya yang tidak dapat diakses karena konflik. Cina telah membeli lebih dari 50 persen ekspor minyak Sudan di tahun 2005.<sup>250</sup> Pada tahun 2005, Sudan mengespor 6,62 juta ton minyak mentah ke Cina atau setara dengan 5,2 persen dari total impor minyak Cina pada tahun tersebut.<sup>251</sup> Ekspor minyak ini mengalami peningkatan 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Antara tahun 1999 dan 2006, ekspor minyak Sudan ke Cina telah meningkat dari 266.126 ton menjadi lebih dari 6,6 juta ton. Selain mengimpor minyak, *CNPC* juga menginvestasikan lebih dari 4 milyar dolar AS ke dalam pasar Sudan. Setelah sebelumnya di tahun 1998, *CNPC* telah membangun pipa minyak sepanjang 1.500 km serta kilang minyak dan pelabuhan di Laut Merah, di tahun 2004 pemerintah Sudan memberikan kontrak pada *CNPC* untuk membangun pipa minyak sejauh 740 km dari pertambangan minyak Fula di bagian barat Kordofan ke tempat penyulingan minyak di Khartoum.<sup>252</sup> Dengan bantuan Cina untuk mengembangkan produksi minyak Sudan, pendapatan pemerintah Sudan dari ekspor minyak mentah telah meningkat empat kali lipat dalam enam tahun, dari sekitar 1,2 milyar dolar di tahun 2000 menjadi 4,7 milyar dolar di tahun 2006. Di saat yang sama, ekspor minyak Sudan ke Cina meningkat dari 69 persen menjadi 83 persen dari total ekspor.<sup>253</sup> Ekspor minyak ini terus mengalami peningkatan. Seperti pada akhir Mei 2007, *Bloomberg* melaporkan bahwa impor minyak mentah Cina dari Sudan per bulannya telah meningkat 600 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi 222.000 barel per harinya.<sup>254</sup>

Referendum Sudan Selatan yang akan dilaksanakan pada 9 Januari 2011 akan merumitkan aset *CNPC* jika berujung pada pemisahan diri Sudan Selatan. Beberapa

<sup>250</sup> Esther Pan, "China, Africa, and Oil", *loc.cit.*

<sup>251</sup> Andrei Chang, "China Sells Arms to Sudan", *loc.cit.*

<sup>252</sup> Jonathan Holslag, "China's Diplomatic Victory in Sudan's Darfur", *op.cit.*

<sup>253</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.4

<sup>254</sup> Eric Reeves, "China, Darfur, and the Olympics: Tarnishing the Torch?", diakses dari <http://www.dreamfordarfur.org/Portals/0/Uploads/Documents/TarnishingTheTorchFINAL.pdf>, pada tanggal 26 Mei 2010, pukul 17.40 WIB

kontrak konsesi minyak yang ditandatangani dengan Khartoum harus dinegosiasikan kembali karena minyak tersebut akan dikontrol oleh pemerintahan Sudan Selatan yang berpusat di Juba. Hal ini akan bergantung pada *SPLM* –sebagai Pemerintah Sudan Selatan di dalam *CPA*- yang menganggap Cina sebagai penjamin dan pelindung bagi rezim Khartoum. Meski Cina tidak menyetujui adanya kemerdekaan bagi Sudan Selatan, namun Cina mulai menyadari pentingnya untuk menjangkau dan mendekati diri dengan Pemerintah Sudan Selatan untuk menyelamatkan implikasi dari pemisahan diri yang dapat merugikan Pemerintah Cina. Cina berusaha untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pejabat pemerintahan di Utara maupun Selatan.<sup>255</sup> Hal ini membutuhkan pendekatan pragmatis terhadap prinsip non-interferensi karena Pemerintah Sudan Selatan belum menjadi entitas berdaulat secara formal. Oleh karenanya hubungan yang terbentuk ada di antara Departemen Hubungan Internasional dari Partai Komunis Cina dan *SPLM*. Pemimpin *SPLM*, Salva Kiir, telah mengunjungi Beijing sebanyak dua kali dan Konsulat Cina telah didirikan di bagian selatan Juba pada September 2008. *CNPC* juga sedang dalam proses untuk mendirikan kantor cabang di kota tersebut. Mengingat besarnya ketergantungan Cina akan minyak, Pemerintah Sudan Selatan menyadari pentingnya kerjasama dengan Cina dan tidak melihat bantuan dari Barat sebagai hal yang cukup untuk menggantikan pinjaman, investasi infrastruktur dan jasa konstruksi dengan biaya rendah yang Cina tawarkan.<sup>256</sup>

Grafik 3.5 di bawah ini memperlihatkan bagaimana Cina mendominasi total ekspor minyak Sudan. Jumlah tersebut pun terus meningkat di tahun 2007 dan 2008 seiring dengan peningkatan produksi minyak Sudan. Dalam periode sebelumnya, sebesar 90 persen dari total ekspor minyak yang dikirim Sudan di tahun 2006 ditujukan untuk Cina dan menghasilkan ekspor senilai 4,7 milyar dolar.<sup>257</sup> Setelah mengalami peningkatan pengiriman minyak sebesar 69 persen dari tahun 2003 ke

<sup>255</sup> Maggie Fick, "Control of Sudan's Oil Moves South after January Referendum Vote, but Pipelines Run in North", diakses dari <http://www.startribune.com/business/112370624.html>, pada tanggal 3 Januari 2011, pukul 11:50 WIB.

<sup>256</sup> Tom Rafferty, "China's Doctrine of Non-Interference Challenged by Sudan's Referendum", *loc.cit.*

<sup>257</sup> Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*, hlm.45

2006, ekspor minyak dari Sudan ke Cina semakin mengalami peningkatan sekitar 113% di tahun 2007. Pada tahun 2007, Cina membeli 40% dari total minyak produksi Sudan sebesar 25 juta ton atau sekitar 6% dari seluruh impor minyak Cina.<sup>258</sup> Di tahun 2008, Sudan mengekspor sekitar 60 persen minyaknya ke Cina. Produksi Sudan itu sebesar 7 persen dari konsumsi tahunan Cina.<sup>259</sup> Peningkatan produksi dan ekspor minyak Sudan ke Cina dari tahun ke tahun semakin menambah signifikansi Sudan bagi Cina dan begitu pula sebaliknya. Meski mengalami peningkatan, namun bagian yang Cina dapatkan dari total ekspor Sudan di tahun 2007 dan 2008 sebenarnya berkurang.

**Gambar 3.5 Total Ekspor Minyak Sudan ke Seluruh Dunia dan Ekspor Minyak Sudan ke Cina Tahun 2000-2006**

### **Ekspor Minyak Sudan ke Cina**



Data diolah kembali dari sumber: <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>, <http://www.eia.doe.gov/cabs/Sudan/Oil.html>, [http://www.indexmundi.com/sudan/economy\\_profile.html](http://www.indexmundi.com/sudan/economy_profile.html)

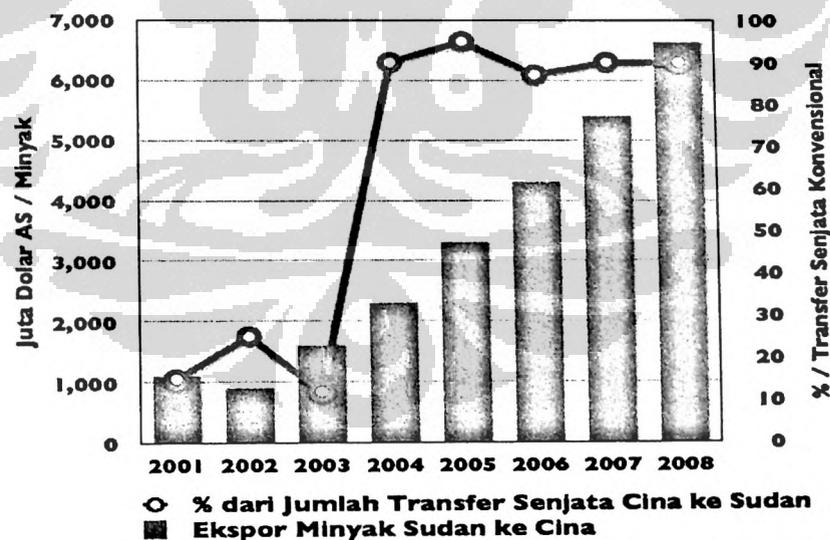
<sup>258</sup> Moira Herbst, "Oil for China, Guns for Darfur", diakses dari [http://www.businessweek.com/globalbiz/content/mar2008/gb20080314\\_430126.htm](http://www.businessweek.com/globalbiz/content/mar2008/gb20080314_430126.htm), pada tanggal 3 Maret 2010, pukul 13.40 WIB

<sup>259</sup> \_\_\_\_, "Sudan: Chinese Companies Among Bidders for Juba-Lamu Oil Pipeline", diakses dari <http://allafrica.com/stories/201010220924.html>, pada tanggal 29 November 2010, pukul 18:25 WIB.

Semakin meningkatnya produksi minyak Sudan ini kemudian dimanfaatkan oleh Cina melalui divisi konstruksi *CNPC, the China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC)*, untuk membangun pipa minyak sepanjang 1.600 kilometer dan selebar 70 centimeter dari Heglig, ladang minyak terbesar di Sudan yang berada di Darfur, ke terminal Marsa al-Bashair dekat Port Sudan. Dari pipa minyak ini diperkirakan mengalir setidaknya 500.000 barel minyak per harinya untuk diekspor. Selain itu, kilang minyak di dekat Khartoum yang telah direnovasi oleh Cina juga dapat menampung tambahan 100.000 barel per harinya. Kapasitas produksi yang meningkat ini secara langsung menguntungkan Cina yang telah menjadi net importir minyak sejak 1993.<sup>260</sup>

**Gambar 3.6 Jumlah Transfer Senjata Cina ke Sudan dan Ekspor Minyak ke Sudan Tahun 2001-2008**

### Minyak Sudan bagi Persenjataan Cina



Sumber: Human Right First, "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan", *loc.cit.*

<sup>260</sup> J. Peter Pham, Ph.D., "Khartoum's Partners in Beijing", diakses dari [www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml](http://www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml), pada tanggal 16 November 2010, pukul 08:35 WIB

Gambar 3.6 memperlihatkan hubungan antara besarnya presentasi transfer senjata Cina ke Sudan dari total seluruh impor senjata Sudan dengan total ekspor minyak Sudan ke Cina. Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa Cina mulai menjadi pemasok senjata utama bagi Sudan ketika konflik Darfur mulai semakin memanas di periode awal terjadinya konflik. Cina memasok setidaknya 90 persen dari keseluruhan senjata yang beredar di Sudan sejak 2004 hingga 2008. Tingginya pasokan senjata Cina ke Sudan pada periode tersebut di antaranya disebabkan oleh embargo senjata terhadap Sudan oleh PBB sehingga meminimalisir transfer senjata dari negara-negara lain. Meski masih mendominasi jumlah transfer senjata ke Sudan, namun nyatanya pada periode 2006 hingga 2008 transfer senjata Cina ke Sudan telah menurun tajam dari periode sebelumnya.

### 3.5 Analisa Variabel Independen

Dari pemaparan data di atas dapat terlihat beberapa perbedaan terkait pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan, keamanan dan stabilitas domestik Sudan, serta keuntungan ekonomi Cina dalam transfer senjata ke Sudan pada periode 2004-2005 dengan periode 2006-2008. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel rangkuman di bawah ini:

**Tabel 3.2 Hasil Temuan Penelitian**

	Data Temuan	
	Tahun 2004-2005	Tahun 2006-2008
Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan	Cina abstain dan berusaha melemahkan isi resolusi DK PBB yang berkaitan dengan penetapan embargo senjata, minyak, dan ekonomi terhadap Sudan di antaranya melalui resolusi 1556 dan 1591.	Cina semakin memainkan peranan yang aktif dan pragmatis terhadap isu Darfur; Cina mendukung resolusi 1663 dan 1679 mengenai penempatan pasukan perdamaian PBB meski Cina tetap tidak mendukung penetapan sanksi terhadap Sudan; disepakatinya <i>Annan</i>

		<i>Plan</i> dengan pemerintah Sudan; pengiriman insinyur militer Cina dan utusan khusus bagi Darfur; pemberian bantuan insentif dari pemerintah Cina ke Sudan.
	Cina menganggap konflik Darfur sebagai isu domestik Sudan dan masih kentalnya prinsip non-interfensi Cina.	Cina terus berusaha menekan Khartoum hingga akhirnya Khartoum bersedia menerima pasukan perdamaian PBB; perubahan sikap Cina terhadap Darfur yang tidak lagi dianggap sebagai isu domestik Sudan dan merubah prinsip non-interfensi Cina menjadi lebih dinamis; Cina sempat mengancam tidak akan memberikan perlindungan terhadap Khartoum ketika mereka sempat berupaya untuk menghambat penempatan pasukan perdamaian PBB.
	Cina menolak pengajuan situasi di Darfur ke <i>ICC</i> .	Cina tetap melindungi pemerintah Sudan dari tuduhan pelanggaran HAM di Darfur.
Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan	Penandatanganan <i>CPA</i> antara pemerintah Sudan dan pemberontak di bagian Selatan tidak mampu membawa keamanan dan stabilitas bagi Sudan karena jutsru semakin mendorong aksi pemberontak di Darfur yang tidak diikutsertakan dalam perjanjian tersebut.	Perjanjian damai <i>DPA</i> yang berkembang pada pembicaraan penempatan pasukan PBB tidak mampu menurunkan intensitas konflik. Konflik justru meningkat karena banyak pihak yang menentang kesepakatan tersebut; jumlah faksi pemberontak dilaporkan bertambah; pemerintah Sudan semakin meningkatkan

		kekuatan militernya di Darfur
	Para pemberontak, khususnya <i>SPLA</i> dan <i>JEM</i> banyak mendapatkan persenjataan dari negara-negara tetangga seperti Chad, Libya, dan Eritrea, dari pemberontak lain ( <i>SPLA</i> ), dan hasil rampasan dari pemerintah serta pasukan perdamaian.	Pengiriman senjata kepada pemberontak terus terjadi namun kapabilitas militer Sudan masih jauh di atas kelompok pemberontak. Militer Sudan dan pemberontak masing-masing memiliki 20 persen dan 4 persen dari seluruh persenjataan yang ada di Sudan.
	Periode awal terjadinya konflik; gencatan senjata tidak berhasil; kehadiran <i>AMIS</i> sempat mampu menekan jumlah kekerasan meski pada akhirnya jumlah penyerangan, mortalitas, dan rakyat sipil yang dipindahkan secara paksa oleh militer Sudan dan milisi Janjawid tetap tinggi; penyerangan terhadap <i>AMIS</i> dan badan kemanusiaan lainnya juga banyak terjadi.	<i>UNAMID</i> akhirnya berhasil ditempatkan di Darfur pada awal 2008. Namun pada periode ini jumlah penyerangan terhadap perkampungan, mortalitas, dan pengungsi lebih tinggi dari periode sebelumnya; serangan terhadap iring-iringan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan juga semakin meningkat.
Keuntungan Ekonomi Cina terhadap Sudan	Perusahaan minyak milik pemerintah Cina, <i>CNPC</i> , menguasai perusahaan minyak Sudan, <i>GNPOC</i> , dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Cina mendapatkan hampir 5 persen	Jumlah impor minyak Cina dari Sudan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi minyak Sudan. Cina mendapatkan 6-9 persen kebutuhan minyaknya dari Sudan. Meski demikian, secara

	kebutuhan minyaknya dari Sudan atau lebih dari 50 persen total ekspor minyak Sudan.	presentasi jumlah minyak yang diekspor ke Cina dari keseluruhan ekspor minyak Sudan cenderung menurun.
--	---	--

### 3.5.1 Analisa Pengaruh dan Kemampuan Mempengaruhi Cina terhadap Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

Sesuai dengan teori *Uncertain Rationales for Arms Sales* dari Andrew J. Pierre, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi dapat dikatakan berhasil ketika Cina mampu mengubah sikap dan tindakan Sudan sesuai dengan yang Cina inginkan. Dari pemaparan data di atas dapat terlihat perbedaan sikap Cina terhadap Sudan dalam dua periode yang berbeda yang memperlihatkan besar-kecil serta intensitas pengaruh dan kemampuan mempengaruhi tersebut. Pada periode 2004-2005, seiring dengan meningkatnya transfer senjata Cina ke Sudan, perlindungan yang diberikan Cina terhadap Sudan, khususnya dalam DK PBB terlihat begitu jelas. Cina berusaha melemahkan resolusi 1556 dan 1591 yang berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pemerintah Sudan. Usaha Cina untuk melemahkan hasil akhir resolusi tersebut sebagian besar berhasil, terlihat dari penghapusan atau perubahan kalimat yang berkaitan dengan sanksi ekonomi ataupun sanksi minyak bagi Sudan. Perlindungan yang Cina berikan bagi Sudan ini tidak terlepas dari kepentingan minyak Cina yang begitu besar di Sudan.

Seiring dengan transfer senjata dan perlindungan politik yang begitu besar bagi Khartoum pada periode 2004-2005, maka pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan juga semakin besar, meski pengaruh dan kemampuan mempengaruhi tersebut belum dimanfaatkan oleh Cina secara politik untuk menekan Khartoum agar mematuhi resolusi DK PBB. Hal ini sejalan dengan sikap Cina saat itu yang terus abstain dan mengancam akan memveto resolusi yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi Sudan. Cina beralih bahwa sikapnya didasari atas prinsip non-interferensi karena menganggap apa yang terjadi di Darfur merupakan permasalahan dalam negeri Sudan yang tidak membutuhkan intervensi

asing. Cina pun berusaha melindungi pemimpin pemerintahan Sudan atas tuduhan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Darfur dan mempersulit kemungkinan isu tersebut diajukan ke *ICC*. Atas perlindungan yang didapat dari Beijing, Khartoum pun merasa aman dan semakin membangkang dari resolusi yang berisi tentang larangan proliferasi senjata bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah Sudan, di dalam Darfur. Penolakan Khartoum untuk mematuhi resolusi DK PBB berdampak pada tingkat kekerasan di Darfur yang terus meningkat. Pembangkangan Khartoum serta ancaman veto Cina mengakibatkan kinerja PBB terhambat dalam menyelesaikan konflik Darfur.

Meski belum menggunakan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap Khartoum agar menuruti resolusi DK PBB, pada periode ini, sebagaimana yang terlihat dari data-data yang dipaparkan di atas, ekspor minyak Sudan ke Cina dilaporkan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa transfer senjata yang begitu tinggi serta perlindungan yang Cina berikan bagi Sudan ditujukan agar mendapatkan pengaruhnya di dalam sektor minyak Sudan di mana Cina merupakan pemilik terbesar di dalam perusahaan minyak Sudan. Oleh karenanya, menurut peneliti, pada periode ini Cina menggunakan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap Sudan secara positif dalam hubungan yang saling menguntungkan, di mana Sudan mendapatkan perlindungan dari tekanan internasional, peningkatan pemenuhan kebutuhan senjata, dan investasi pengembangan sektor minyak dari Cina, sementara Cina mendapatkan pengaruhnya di dalam peningkatan ekspor minyak Sudan. Cina memang merupakan negara yang memiliki kepemilikan terbesar namun bukan merupakan satu-satunya negaranya yang beroperasi dalam sektor minyak Sudan. Besarnya pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina tentunya dibutuhkan untuk menjamin pasokan minyak yang didapatkan dari Sudan.

Sikap Cina yang mulai berubah terhadap Sudan pada periode 2006-2008 ditunjukkan dengan dukungannya atas resolusi 1663 dan 1679 mengenai penempatan pasukan perdamaian PBB di Darfur. Tekanan internasional, khususnya menjelang Olimpiade Beijing dan pertimbangan hubungan ekonominya dengan AS dan Eropa

serta pencitraan dirinya sebagai *responsible power*, telah mendorong Cina untuk bersikap lebih aktif dalam isu Darfur. Sikap Cina yang lebih pragmatis juga ditunjukkan oleh pejabat publiknya, mulai dari intervensi penting yang dilakukan Wang Guangya, Wakil Permanen Tetap Cina di PBB, melalui *Annan Plan* yang akhirnya disetujui pemerintah Sudan, penunjukan utusan khusus Cina bagi Darfur, hingga desakan langsung yang disampaikan oleh Hu Jintao dan Wen Jiabao kepada para pemimpin Sudan. Meski terus berusaha untuk memberikan tekanan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan ekonomi Cina di Sudan begitu kuat. Cina menyadari bahwa hubungan pertemanan yang terganggu akan menghilangkan pengaruhnya di Sudan dan kesempatan bagi kelanjutan stabilisasi Darfur. Selain itu, Cina juga menyadari bahwa hubungan yang stagnan ini dapat mendorong Khartoum untuk beralih ke negara lain seperti India, Malaysia, dan Rusia yang juga memiliki kepemilikan di dalam *GNPOC*.<sup>261</sup> Oleh karenanya, selain memberikan tekanan secara politik, Cina juga memberikan insentif bantuan dana dan penghapusan hutang agar pemerintah Sudan mau menerima pasukan perdamaian PBB. Pada akhirnya, Sudan bersedia menerima penempatan pasukan PBB meski sikap Sudan dianggap kurang kooperatif sehingga menyebabkan penempatan pasukan harus mengalami keterlambatan. Atas sikap Sudan yang dianggap menghambat kinerja pasukan PBB ini, Cina berusaha mengancam Sudan dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan perlindungan politik terhadap Sudan. Sikap Cina tersebut semakin menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap pemerintah Sudan.

Sikap Cina yang cenderung menekan Sudan pada periode ini menurut peneliti merupakan penggunaan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan secara seutuhnya karena Cina berhasil mengubah sikap Khartoum yang semula menentang penempatan pasukan PBB, terutama yang berasal dari negara luar Afrika, menjadi bersedia menerima kehadiran pasukan ini. Menurut peneliti, penurunan transfer senjata Cina ke Sudan secara drastis dan bertepatan dengan tekanan yang

---

<sup>261</sup> Ismail S.H. Ziada, "Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations", diakses dari [www.kanaanonline.org/articles/01042.pdf](http://www.kanaanonline.org/articles/01042.pdf), pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 09:25 WIB, hlm.7.

dilakukan Cina terhadap Sudan dapat dikatakan merupakan bagian dari usaha pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina agar Sudan mengikuti keinginan Cina untuk menerima pasukan perdamaian PBB.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara politik, potensi pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina amat besar pada periode 2004-2005, namun pada periode tersebut Cina tidak menggunakan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya untuk menekan Sudan secara politik, tetapi menggunakannya untuk mengamankan kepentingan minyak. Karena jika Cina tidak menghalangi usaha di dalam DK PBB dalam memberikan sanksi ekonomi dan minyak ke Sudan, maka kepentingan minyak Cina di Sudan pun akan terganggu. Sementara itu, pada periode 2006-2008, ketika pasokan minyak Cina dari Sudan cenderung stabil dan naik, Cina mulai menggunakan kemampuan pengaruh dan mempengaruhinya terhadap Sudan secara politik melalui tekanan-tekanan yang dilakukan para pejabat tinggi Cina terhadap pemerintah Sudan. Cina mulai menyadari bahwa kondisi keamanan dan stabilitas di Darfur tidak semakin membaik dan mungkin dapat menyebar ke kawasan lain dan mengganggu kepentingan minyaknya. Oleh karenanya, Cina mulai merasa perlu adanya intervensi asing di Darfur dan Cina berusaha menekan Sudan untuk menerima pasukan PBB melalui pengaruh dan kemampuan mempengaruhi yang sebelumnya telah terbentuk. Ketika Khartoum berusaha untuk menolak dan menghambat kehadiran pasukan perdamaian PBB, transfer senjata Cina ke Sudan pun semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa Cina menggunakan transfer senjata untuk mempengaruhi Khartoum dalam arah yang berlawanan. Dalam artian, Cina justru menurunkan transfer senjatanya ke Sudan agar dapat mempengaruhi sikap pemerintah Sudan. Pada akhirnya, Sudan bersedia menerima kehadiran pasukan *hybrid UNAMID* di Darfur.

Namun dalam menjelaskan sikap Cina terkait dengan penggunaan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya di tahun 2006-2008, harus dilihat pula kapabilitas militer Sudan untuk melawan pemberontak di Darfur. Dari data yang dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa kapabilitas militer Sudan pada tahun 2006-2008 berada jauh di atas kelompok pemberontak. Oleh karenanya, sikap protektif Cina terhadap

Sudan pada periode sebelumnya dimaksudkan agar Cina dapat terus menguatkan kapabilitas militer Sudan. Ketika kapabilitas militer Sudan dirasa cukup untuk melawan pemberontak, maka Cina menurunkan transfer senjatanya dan mulai menggunakan pengaruh dan kemampuan mempengaruhinya terhadap Sudan.

### 3.5.2 Analisa Keamanan dan Stabilitas Domestik Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008

Pemaparan data di atas telah memperlihatkan bahwa kondisi keamanan dan stabilitas di Sudan umumnya, dan Darfur khususnya, terus terganggu pada tahun 2004-2005 dan semakin memburuk pada tahun 2006-2008. Hal ini dilihat dari semakin tingginya tingkat penyerangan ke kawasan-kawasan di Darfur oleh milisi Janjawid, militer Sudan, dan pemberontak pada tahun 2006-2008. Tahun 2004-2005 terhitung merupakan periode awal terjadinya konflik di mana militer Sudan yang dibantu oleh milisi Janjawid berusaha melawan pemberontak di Darfur, terutama *SLA* dan *JEM*, dengan melakukan penyerangan ke perkampungan-perkampungan yang didominasi oleh suku Afrika. Serangan yang sebelumnya ditujukan bagi para pemberontak kemudian berkembang menjadi serangan terhadap rakyat sipil secara merata tanpa pandang bulu karena rakyat sipil yang ada di Darfur dianggap memberikan perlindungan dan dukungan bagi pemberontak. Akibatnya, puluhan hingga ratusan ribu orang menjadi korban jiwa dan harus meninggalkan tempat tinggalnya secara terpaksa. Selain itu, dukungan persenjataan dari negara-negara tetangga seperti Chad, Libya, dan Eritrea kepada kelompok pemberontak menjadikan konflik di Darfur meluas hingga daerah perbatasan, khususnya perbatasan dengan Chad di mana pemerintah Chad mengizinkan kelompok pemberontak Sudan, khususnya *JEM* dan *SLA*, untuk secara bebas keluar-masuk daerah perbatasannya.<sup>262</sup> Oleh karenanya, konflik ini tidak saja mengganggu keamanan dan stabilitas di Sudan, tetapi juga keamanan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Kehadiran pasukan perdamaian *AMIS*, belum mampu menurunkan tingkat konflik secara signifikan dan

<sup>262</sup> Human Rights First, "Written Submission to the United Nations Security Council", diakses dari <http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/081212-HRF-final-sanc-comm-briefing.pdf>, pada tanggal 1 Desember 2010, pukul 12:40 WIB

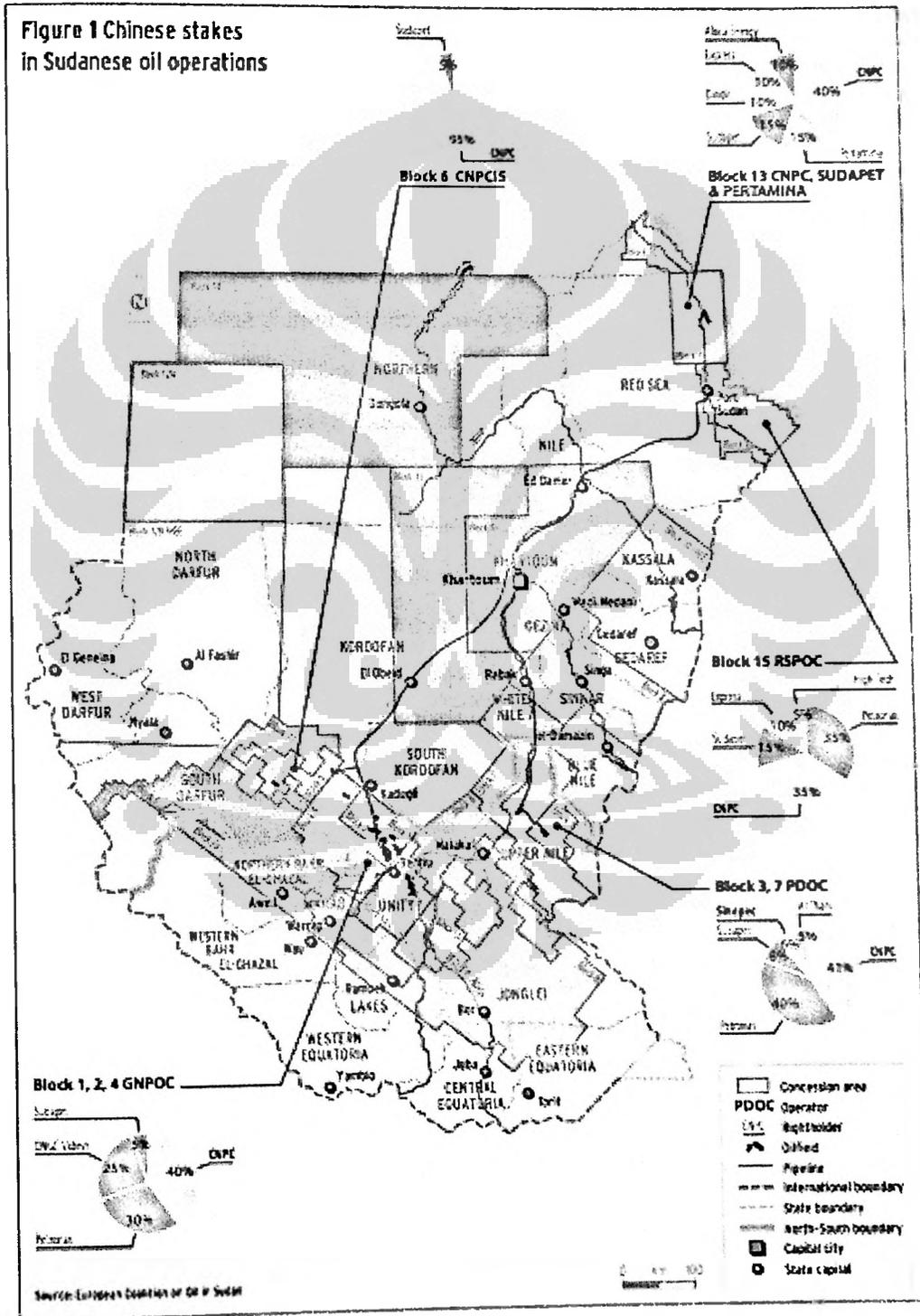
membawa keamanan dan stabilitas bagi Darfur karena *AMIS* juga dijadikan target baik oleh pemerintah, milisi, dan pemberontak untuk kemudian dirampas persenjataannya.

Aliran senjata Cina ke Sudan yang begitu tinggi tidak terjadi di saat Sudan dalam kondisi yang aman dan stabil tetapi justru terjadi ketika konflik baru berkembang menuju eskalasi di tahun 2004-2005. Transfer senjata Cina yang begitu tinggi juga tidak membuat kondisi di Sudan menjadi aman dan stabil karena penggunaannya oleh pemerintah Sudan yang tidak ditujukan bagi pemeliharaan keamanan dan kestabilan, tetapi justru untuk memperparah kondisi keamanan dan kestabilan di Sudan. Meningkatnya transfer senjata Cina ke Sudan pada periode ini juga tidak terlepas dari kebutuhan persenjataan Sudan yang meningkat setelah sebelumnya pemerintah Sudan harus menghadapi konflik dengan Sudan Selatan selama lebih dari 20 tahun.

Meski demikian, keamanan dan stabilitas di Darfur pada tahun 2004-2005 dapat dikatakan lebih aman dan stabil jika dibandingkan dengan tahun 2006-2008, di saat transfer senjata Cina ke Sudan mulai menurun. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penyerangan, mortalitas, dan pengungsi. Dari data yang dipaparkan sebelumnya (Gambar 3.2-3.4) memperlihatkan bahwa jumlah penyerangan, mortalitas, dan pengungsi mencapai puncaknya di tahun 2006. Menurut peneliti, tingginya tingkat kekerasan pada tahun tersebut disebabkan oleh besarnya transfer senjata yang dilakukan pada periode sebelumnya. Senjata-senjata tersebut diperkirakan baru dipergunakan secara maksimal pada periode 2006-2008 di mana pada tahun 2006 militer Sudan dilaporkan mengembangkan militer dan persenjataannya secara besar-besaran di Darfur. Hal ini juga menyusul penolakan beberapa faksi pemberontak atas *DPA* dan semakin banyaknya pecahan dari kelompok-kelompok pemberontak yang muncul. Tingkat kekerasan juga meningkat karena kehadiran pasukan *UNAMID* yang tidak disetujui oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah Sudan yang sebenarnya enggan menerima pasukan perdamaian di luar negara-negara Afrika. Pasukan *UNAMID* seringkali dijadikan sasaran penyerangan oleh militer Sudan, Janjawid, hingga pemberontak untuk kemudian dirampas persenjataan dan logistiknya. Hal ini

menjadikan fungsi *UNAMID* untuk melindungi rakyat sipil dan bantuan kemanusiaan menjadi tumpul karena tidak didukung oleh perlengkapan dan logistik yang memadai.

**Gambar 3.7** Peta Eksplorasi Minyak, Konflik Darfur, dan Pusat Pemerintahan di Sudan



Sumber: Small Arms Survey, "Arms, Oil, and Darfur", *loc.cit.*, hlm.3

Dengan besarnya aliran senjata ke Sudan pada tahun 2004-2005, maka penurunan transfer senjata Cina pada periode 2006-2008 di saat konflik tengah meningkat juga dapat disebabkan oleh pasar senjata Sudan yang mulai jenuh karena telah mencapai titik tertingginya di tahun 2005. Selain itu, tingginya kapabilitas persenjataan Sudan yang telah berada jauh di atas kapabilitas pemberontak pada periode 2006-2008 menjadikan kebutuhan persenjataan militer Sudan dan milisi Janjawid menjadi berkurang. Oleh karenanya, penurunan transfer senjata ini tidak berdampak pada perbaikan keamanan dan stabilitas Sudan.

Jika dikaitkan dengan stabilitas rezim Khartoum, maka transfer senjata Cina ke Sudan pada periode 2004-2005 yang begitu tinggi telah mampu mempertahankan pemerintahan yang ada. Persenjataan yang Cina kirimkan untuk Sudan pada periode ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah Sudan dalam melawan pemberontak di Darfur. Hal ini tentunya juga ditujukan untuk menjaga keamanan pasokan minyak di Sudan yang dikuasai oleh rezim Khartoum. Pada periode selanjutnya di mana transfer senjata menurun, stabilitas rezim Khartoum tetap terjaga dengan semakin meningkatnya penyerangan-penyerangan terhadap perkampungan dan meningkatnya kapabilitas persenjataan yang dimiliki pemerintah Sudan.

Gambar di atas (Gambar 3.7) memperlihatkan pemetaan kawasan eksplorasi minyak Sudan yang didominasi oleh Cina, kawasan konflik di Darfur (Sudan bagian barat), dan pusat pemerintahan Sudan yang berada di Khartoum. Dekatnya jarak kepentingan minyak Cina di Sudan Selatan dengan daerah konflik Darfur –Cina memiliki ladang minyak yang besar di antara kawasan Kordofan dan Darfur<sup>263</sup> menjadikan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut merupakan hal yang penting bagi Cina agar pasokan minyaknya tidak terganggu. Oleh karenanya, transfer senjata Cina kepada Sudan yang begitu tinggi di tahun 2004-2005 seiring dengan munculnya kelompok pemberontak di Darfur, dimaksudkan agar pemerintah Cina

<sup>263</sup> \_\_\_\_\_, "Sudan Now Africa's Third Largest Oil Producer", diakses dari <http://www.afrol.com/articles/21889>, pada tanggal 2 Desember 2010, pukul 17:30 WIB.

mampu melawan aksi pemberontakan yang kebanyakan terjadi di dekat perbatasan dengan Chad (Darfur Barat) dan tidak meluas hingga ke Sudan bagian selatan. Namun seiring dengan kemampuan persenjataan Sudan yang telah jauh melampaui pemberontak serta penggunaan persenjataan yang lebih banyak diarahkan kepada rakyat sipil di seluruh penjuru Darfur, maka Cina mulai menurunkan pasokan senjatanya dan mendukung penempatan pasukan PBB dari mulai perencanaannya di tahun 2006. Keamanan dan stabilitas merupakan hal yang penting bagi Cina untuk terus melanjutkan eksplorasi minyaknya di Sudan. Oleh karenanya, Cina berusaha memainkan peran yang penting dalam mencapai perjanjian perdamaian dan membuat rezim Sudan untuk menuruti resolusi DK PBB.

### **3.5.3 Analisa Keuntungan Ekonomi Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan pada Tahun 2004-2005 dan 2006-2008**

Pembelian senjata oleh Negara Dunia Ketiga seperti Sudan dianggap kurang memiliki pengaruh ekonomi yang besar terhadap industri persenjataan di Cina. Namun dengan posisi Sudan sebagai produsen minyak terbesar ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Angola dengan cadangan minyak sebesar 563 juta barel (data tahun 2006)<sup>264</sup>, maka keuntungan ekonomi Cina yang utama dari perdagangan senjata dengan Sudan sudah jelas adalah minyak. Hal ini semakin didukung oleh pertumbuhan ekonomi Cina yang membuat kebutuhannya akan minyak semakin besar di mana Cina merupakan konsumen minyak terbesar kedua setelah AS, sementara produksi minyak dalam negerinya menurun. Oleh karenanya, Cina membutuhkan sumber minyak lain dari luar. Hubungannya dengan Sudan diuntungkan dengan embargo yang dilakukan AS dan negara-negara Eropa Barat sehingga operasi perusahaan minyak Cina di Sudan nyaris tidak mendapatkan kompetisi dari perusahaan Barat.

Kebutuhan akan energi ditunjukkan oleh Cina dengan minatnya yang besar dalam sektor minyak Sudan dengan menjadi investor terbesar di dalam pembangunan produksi minyak Sudan. Dengan jasa Cina yang begitu besar dalam pengembangan

<sup>264</sup> \_\_\_\_, "Sudan Now Africa's Third Largest Oil Producer", *loc.cit.*

sektor minyak di Sudan, terbukti ketika Sudan mulai menjadi eksportir minyak di tahun 1999 dan pertumbuhan produksi minyak yang signifikan, ditambah dengan stimulus senjata oleh Cina, maka menjadi tidak mengherankan jika Cina merupakan negara tujuan ekspor minyak terbesar (sekitar 65 persen) dari Sudan. Kepentingan minyak Cina yang amat besar di Sudan amat jelas terlihat dari dukungan politik Cina terhadap Sudan di PBB dengan mencegah adanya resolusi yang terkait dengan sanksi ekonomi dan minyak.<sup>265</sup> Oleh karenanya, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi transfer senjata Cina ke Sudan, keamanan dan stabilitas domestik Sudan pada intinya diarahkan untuk mendukung kepentingan minyak Cina di Sudan.

Dari pemaparan data sebelumnya diketahui bahwa ekspor minyak Sudan ke Cina terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan jumlah produksi minyak Sudan yang juga semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan transfer senjata Cina ke Sudan pun tidak mempengaruhi jumlah ekspor minyak Sudan ke Cina. Hal ini terlihat dari jumlah ekspor minyak Sudan ke Cina yang presentasinya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2008 meski transfer senjata Cina ke Sudan berada pada puncaknya di tahun 2005 dan kemudian mengalami penurunan pada periode 2006-2008.

Grafik 3.6 memberikan gambaran bahwa meski transfer senjata Cina menurun pada periode 2006-2008, namun hal ini tidak mempengaruhi jumlah ekspor minyak Sudan ke Cina yang tetap tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekspor minyak Sudan ke Cina tidak serta-merta berbanding lurus dengan total transfer senjata Cina ke Sudan. Meski Cina masih harus mengeluarkan investasi yang besar terhadap minyak di Sudan, namun dalam jangka panjang dan dengan kebutuhan Cina akan minyak yang semakin meningkat, Cina diuntungkan dari hubungan ini karena dengan tambahan stimulus senjata dan perlindungan politiknya terhadap Sudan, Cina mampu mencapai kesepakatan kerjasama minyak dengan Sudan di mana Cina merupakan pemilik saham terbesar dalam perusahaan minyak Sudan serta mampu mengatur harga minyak mentahnya sendiri dengan Khartoum.

---

<sup>265</sup> Ismail S.H. Ziada, "Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations", *loc.cit.*

### **3.5.4 Kepentingan Cina dalam Transfer Senjata ke Sudan Tahun 2004-2005 dan 2006-2008**

Dari hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel yang dipaparkan, keuntungan ekonomi Cina di Sudan, yakni minyak, merupakan variabel yang paling dominan dalam kepentingan transfer senjata Cina terhadap Sudan baik pada periode di saat transfer senjata meningkat (2004-2005) maupun di saat transfer senjata mulai menurun drastis (2006-2008). Kedua variabel lainnya, yaitu pengaruh dan kemampuan mempengaruhi serta keamanan dan stabilitas domestik Sudan berusaha diarahkan agar dapat sejalan dan mendukung kepentingan minyak Cina di Sudan. Pada intinya, kepentingan Cina dari awal mula peningkatan transfer senjata terjadi hingga transfer senjata itu mulai menurun tetap sama, namun keadaan lingkungan internasional di sekitar Cina serta situasi dalam negeri Sudan akhirnya mendorong perubahan sikap Cina dalam pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Khartoum pada dua periode tersebut.

Jika dilakukan uji hipotesis, maka kedua hipotesis yang diajukan pada awal penelitian tidak dapat dikatakan terbukti ataupun tidak terbukti sepenuhnya karena cenderung relatif. Dengan demikian, kedua hipotesis yang diajukan cenderung termodifikasi dan tergantung konteks yang ada.

Pada hipotesis pertama disebutkan bahwa tingginya transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004-2005 di antaranya disebabkan oleh kemampuan Cina untuk memberikan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi yang besar kepada Sudan melalui kebijakan-kebijakannya; kondisi domestik Sudan aman dan stabil; keuntungan ekonomi yang ditawarkan amatlah besar. Sementara hipotesis kedua menyebutkan bahwa rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2006-2008 di antaranya disebabkan oleh ketidakmampuan Cina dalam memberikan pengaruh kepada Sudan melalui kebijakan-kebijakannya; kondisi domestik Sudan tidak aman dan tidak stabil; keuntungan ekonomi yang ditawarkan terbilang kecil.

Dari pemaparan data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa selain tingginya transfer senjata Cina ke Sudan, perlindungan yang diberikan Cina ke Sudan dalam PBB pada tahun 2004-2005 telah meningkatkan pengaruh dan kemampuan

mempengaruhi Cina terhadap Sudan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya ekspor minyak Sudan yang ditujukan kepada Cina. Upaya ini merupakan bagian dari usaha Cina untuk mendapatkan sumber minyak yang dapat diandalkan di tengah persaingan internasional untuk mendapatkan minyak.

Pada periode ini, transfer senjata yang tinggi berbanding lurus dengan besarnya pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan. Oleh karenanya, hipotesis ini terbukti meski pengaruh dan kemampuan mempengaruhi ini tidak ditujukan untuk mengubah tindakan Sudan yang tidak sejalan dengan Cina, tetapi justru untuk semakin menunjang kepentingan Cina di Sudan. Dengan demikian, hubungan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi dalam transfer senjata tidak selalu ditujukan bagi suatu negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya, akan tetapi dapat digunakan oleh suatu negara untuk semakin mendapatkan keuntungan dan menjadi mitra yang penting di negara lain.

Pada tahun 2006-2008, di saat transfer senjata Cina ke Sudan cenderung menurun, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan secara politik justru meningkat. Sikap Cina yang semakin aktif dan pragmatis dalam menyikapi Sudan ditunjukkan dengan usaha Cina yang mampu merubah sikap pemerintah Sudan dari yang sebelumnya membangkang dari resolusi DK PBB dan menolak penempatan pasukan PBB, menjadi menuruti resolusi dan menyetujui penempatan pasukan perdamaian. Menurut peneliti, selain usaha diplomatik dan cara lainnya yang dijalankan Beijing untuk menekan Khartoum, penurunan transfer senjata Cina ke Sudan, selain karena Cina merasa kapabilitas militer Sudan sudah lebih dari cukup, juga digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi Khartoum agar menerima intervensi asing di Darfur. Dengan kapabilitas militer Sudan yang dianggap telah mencukupi itu pula, maka Cina menganggap tidak akan menjadi masalah jika mereka menurunkan transfer senjata ke Sudan dan menjadi lebih kooperatif dengan PBB untuk menekan Sudan. Oleh karenanya, hipotesis ini tidak terbukti karena di saat transfer senjata turun, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi justru meningkat. Dalam kasus Cina-Sudan, di mana transfer senjata pada periode sebelumnya sempat begitu tinggi, maka penurunan transfer senjata juga

dapat digunakan untuk menekan negara klien agar bertindak sesuai dengan keinginannya.

Hipotesis mengenai peningkatan transfer senjata disebabkan kondisi yang aman dan stabil tidak terbukti secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004-2005, kondisi keamanan dan stabilitas Sudan, khususnya Darfur, tengah berada pada tingkatan konflik yang semakin memburuk. Karena senjata tidak digunakan untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tetapi justru untuk memperparah konflik internal di Darfur. Cina, dengan pecahnya konflik Darfur pada tahun 2003, tidak ingin kepentingan minyaknya yang berada di kawasan selatan Sudan dan berdekatan dengan Darfur Selatan terganggu. Oleh karenanya, Beijing merasa perlu untuk memperkuat Khartoum dengan melakukan transfer senjata yang begitu besar pada tahun 2004-2005 untuk melawan pemberontak. Meski stabilitas rezim Khartoum tetap terjaga, namun konflik ini mengancam ketidakstabilan kawasan karena telah menyebar hingga Chad dan Republik Afrika Tengah. Oleh karenanya, pasukan perdamaian UA, *AMIS* ditempatkan di Darfur meski tidak membawa pengaruh yang signifikan bagi keamanan dan stabilitas di sana.

Meski pada periode ini kondisi keamanan dan stabilitas di Darfur cenderung memanas, namun jika dilihat dari pemaparan data sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa keamanan dan stabilitas di Sudan pada umumnya lebih baik jika dibandingkan periode 2006-2008 di mana konflik semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis yang dipaparkan sebelumnya tidak sepenuhnya terbukti karena transfer senjata yang meningkat tidak selalu terjadi pada kondisi aman dan stabil. Karena seperti yang ditunjukkan oleh Cina, ketika kepentingan negara dipertaruhkan di dalamnya, maka transfer senjata yang tinggi kepada negara lain sangat dimungkinkan ketika konflik menuju eskalasi.

Sementara di tahun 2006-2008, ketika transfer senjata mulai mengalami penurunan, keamanan dan stabilitas Darfur justru semakin meningkat ke tahapan yang lebih parah dari pada periode sebelumnya. Oleh karenanya, hipotesis mengenai transfer senjata menurun disebabkan oleh kondisi Sudan yang tidak aman dan stabil terbukti meski intensi utama Cina sebenarnya adalah keamanan ladang minyaknya

yang berdekatan dengan Darfur Selatan. Ketidakamanan dan gangguan stabilitas di kawasan sekitar eksplorasi minyak Cina hanya akan mengancam kepentingan minyak Cina di Sudan. Penurunan ini juga tidak terlepas dari tingkat kapabilitas persenjataan pemerintah Sudan yang sudah dianggap melebihi dari cukup dalam melawan pemberontak.

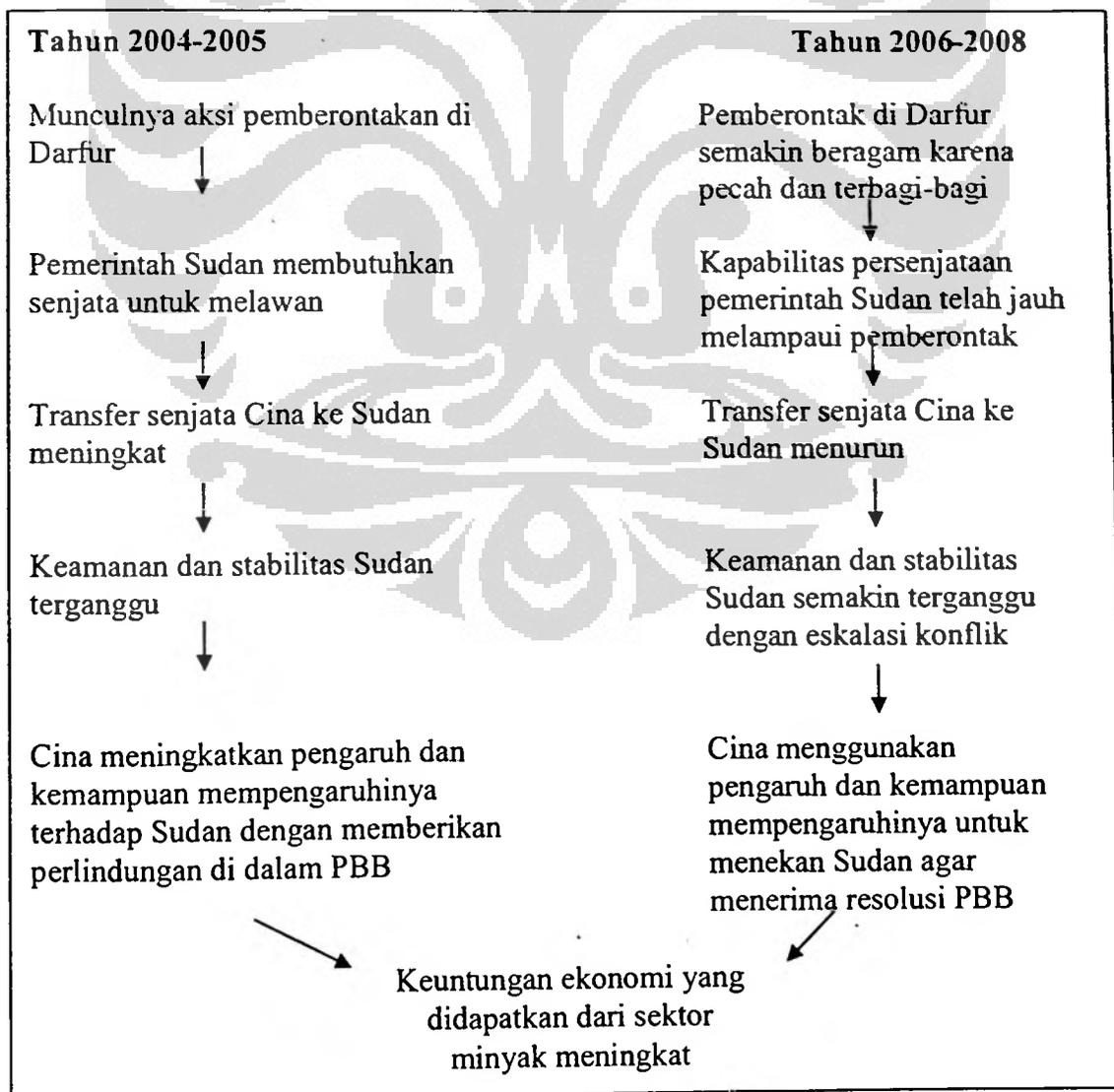
Hipotesis terakhir menyatakan bahwa tingginya transfer senjata Cina ke Sudan pada tahun 2004-2005 disebabkan oleh tingginya keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh Sudan. Hipotesis ini terbukti benar. Dengan pengaruh dan hasil investasinya yang dominan dalam sektor minyak Sudan, maka sebagian besar hasil produksi minyak Sudan ditujukan bagi Cina. Namun demikian, jika melihat paparan data sebelumnya, maka dapat terlihat bahwa keuntungan ekonomi Cina dari transfer senjata justru semakin meningkat di saat transfer senjata mengalami penurunan pada tahun 2006-2008. Oleh karenanya, hipotesis ini tidak terbukti. Dengan demikian, tinggi-rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan tidak berpengaruh pada besarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh Cina.

Jika temuan-temuan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori *uncertain rationales for arms sales*, maka kepentingan utama Cina dalam transfer senjata ke Sudan adalah keuntungan ekonomi berupa impor minyak dari Sudan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Variabel lain di dalam teori ini, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi serta keamanan dan stabilitas, berusaha diarahkan untuk mendukung kepentingan minyaknya. Hubungan variabel dalam teori *uncertain rationales for arms sales* dapat terlihat dari gambar di bawah ini.

Dari pemaparan temuan dan hubungan variabel di bawah ini, dapat terlihat bahwa tinggi-rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan didorong oleh upaya untuk memperkuat stabilitas rezim Khartoum dalam melawan pemberontak. Ketika kapabilitas militer Sudan dirasa belum mencukupi untuk dapat melawan pemberontak (2004-2005), maka pemerintah Cina akan terus meningkatkan transfer senjatanya ke Sudan. Dan ketika kapabilitas militer Sudan dirasa telah mencukupi (2006-2008), maka Cina mulai menurunkan transfer senjatanya. Transfer senjata ini juga menjadi alat bagi Cina untuk mengamankan kepentingan minyaknya di Sudan. Karena aksi

pemberontakan dianggap dapat mengganggu keamanan kepentingannya, maka Cina merasa perlu untuk meningkatkan transfer senjatanya ke Sudan. Oleh karenanya, transfer senjata yang tinggi tidak hanya dapat terjadi pada kondisi negara yang aman dan stabil, karena jika transfer senjata dikondisikan terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Sudan, maka kebutuhan senjatanya akan semakin tinggi dan negara yang memiliki kepentingan di negara tersebut seperti Cina tidak akan segan untuk mempersenjatai. Begitu pula ketika transfer senjata turun, selain kondisi keamanan dan stabilitas yang harus dilihat, kapabilitas persenjataan negara klien juga dapat mempengaruhi.

Gambar 3.8 Temuan dan Hubungan Variabel dalam Teori *Uncertain Rationales for Arms Sales*



Keamanan dan stabilitas yang mendorong transfer senjata ke Sudan kemudian berdampak pada pengaruh dan kemampuan mempengaruhi. Keamanan dan stabilitas ini khususnya dikaitkan dengan kapabilitas persenjataan Sudan. Sehingga ketika kapabilitas militer Sudan kurang mencukupi dan menyebabkan transfer senjata meningkat, maka pengaruh dan kemampuan mempengaruhi diarahkan untuk mengamankan transfer senjatanya ke Cina dan membuat perlindungan terhadap Khartoum begitu besar di PBB. Pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina ke Sudan pada periode 2004-2005 begitu besar namun karena kapabilitas persenjataan Sudan belum menjamin dapat melindungi kepentingannya, maka pengaruh dan kemampuan mempengaruhi belum digunakan untuk menekan Sudan. Ketika akhirnya pengaruh dan kemampuan mempengaruhi yang besar digunakan untuk menekan Sudan, maka hal itu juga tidak terlepas dari kemampuan persenjataan militer Sudan yang dianggap telah mencukupi untuk melindungi kepentingan Cina sehingga transfer senjata pun menurun.

Keuntungan ekonomi merupakan kunci dari hubungan transfer senjata Cina ke Sudan. Penjelasan-penjelasan mengenai variabel lain telah memperlihatkan bagaimana kesemuanya itu dikondisikan untuk mendukung kepentingan minyak Cina. Transfer senjata Cina yang sempat begitu tinggi yang didukung oleh kondisi keamanan dan stabilitas Sudan yang membutuhkan dukungan serta pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan yang begitu besar mengakibatkan keuntungan ekonomi yang didapatkan juga menjadi besar. Sementara ketika transfer senjata menurun dengan kondisi keamanan dan stabilitas di Darfur semakin memanas dan penggunaan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi untuk menekan Sudan semakin meningkat, justru tidak menyebabkan penurunan keuntungan ekonomi (minyak) Cina di Sudan, karena pada kenyataannya jumlah ini semakin meningkat. Oleh karenanya, penurunan transfer senjata tidak secara serta-merta disebabkan oleh pengaruh-kemampuan mempengaruhi serta keuntungan ekonomi yang semakin kecil, tetapi justru karena kapabilitas militer Sudan yang dianggap telah mencukupi dan keamanan serta stabilitas Sudan yang ditakutkan dapat mengancam kepentingan minyak Cina.

## BAB IV KESIMPULAN

Dengan dipaparkannya pembahasan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tinggi-rendahnya transfer senjata Cina ke Sudan, maka penelitian ini berusaha menjawab faktor-faktor apa yang menyebabkan transfer senjata ke Cina menjadi begitu tinggi pada tahun 2004-2005 dan kemudian pada tahun 2006-2008 menurun tajam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis termodifikasi, sehingga peningkatan dan penurunan transfer senjata tidak dapat sepenuhnya terbukti dengan hipotesis karena tergantung dengan konteks yang ada. Meski demikian, dari dua hipotesis pada periode yang berbeda, dapat terlihat variabel yang paling menonjol yang dapat menjelaskan dorongan transfer senjata Cina ke Sudan, yakni keuntungan ekonomi atau kepentingan minyak Cina di dalam Sudan.

Jika dikaitkan dengan hipotesis, melalui penelitian ini diketahui bahwa peningkatan transfer senjata pada tahun 2004-2005 disebabkan oleh adanya pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan serta keuntungan ekonomi yang besar. Sedangkan hipotesis yang termodifikasi adalah kondisi keamanan dan stabilitas Sudan. Disebutkan bahwa transfer senjata yang tinggi disebabkan oleh kondisi Sudan yang relatif aman dan stabil. Hal ini menjadi relatif karena kondisi Sudan pada tahun 2004-2005 semakin memanas menuju tingkat eskalasi meski jika dilihat dari jumlah penyerangan ke perkampungan, mortalitas, dan jumlah pengungsi, kondisi di tahun 2004-2005 lebih aman dan stabil jika dibandingkan periode 2006-2008.

Jika dikaitkan dalam teori *uncertain rationales for arms sales*, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi digunakan oleh negara pengirimim ketika sikap dan kebijakan negara klien tidak sesuai dengan keinginannya. Dengan pemaparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina saat itu tidak diarahkan untuk mengubah kebijakan/sikap Sudan, karena sikap Sudan sebelumnya telah sejalan dengan Cina. Tingginya transfer senjata dan besarnya perlindungan Cina terhadap Sudan di PBB lebih ditujukan untuk menambah pengaruhnya dalam sektor minyak Sudan. Dengan demikian, dalam kasus Cina-

Sudan pada periode 2004-2005, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi digunakan untuk semakin menambah keuntungannya dalam bidang ekonomi. Keuntungan ekonomi yang didapat pada periode ini, meski tetap tinggi, namun lebih rendah jika dibandingkan keuntungan ekonomi pada periode selanjutnya.

Pada periode 2006-2008, di saat transfer senjata menurun, hipotesis yang terbukti namun tetap relatif dan kontekstual adalah kondisi Sudan yang tidak aman dan stabil. Sementara hipotesis mengenai ketidakmampuan Cina untuk memberikan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi terhadap Sudan dan keuntungan ekonomi yang relatif kecil tidak terbukti. Mengenai kondisi Sudan yang tidak aman dan stabil, hal ini dapat dibenarkan, karena pada periode ini konflik semakin memanas dari pada periode sebelumnya, meski besarnya kapabilitas Sudan yang telah jauh melampaui pemberontak juga mempengaruhi penurunan transfer senjata ke Sudan. Penurunan transfer senjata juga dilakukan oleh Cina untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas di Sudan agar konflik Darfur tidak menyebar hingga ke bagian selatan Sudan di mana Cina memiliki kepentingan yang begitu besar.

Sementara itu, pengaruh dan kemampuan mempengaruhi terhadap Sudan dalam periode ini begitu besar sehingga Cina mampu mengubah sikap Khartoum. Penggunaan pengaruh dan kemampuan dan mempengaruhi di saat transfer senjata turun dapat dikaitkan dengan kapabilitas militer Sudan yang dianggap cukup oleh Cina sehingga Cina merasa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyetujui penempatan pasukan PBB di Darfur dan menekan Sudan untuk bertindak sesuai dengan keinginan Cina. Penurunan transfer senjata menurut peneliti juga berperan dalam memberikan pengaruh terhadap Sudan. Oleh karenanya, teori ini kurang dapat menjelaskan mengenai penurunan transfer senjata yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi. Dalam hal ini, teori yang ada juga tidak menjelaskan mengenai faktor kapabilitas persenjataan negara klien yang dapat menjelaskan tindakan suatu negara untuk melakukan transfer senjata.

Keuntungan minyak yang didapatkan Cina dari Sudan dan terus meningkat dari setiap periode menandakan besarnya dorongan keuntungan ekonomi untuk menjelaskan transfer senjata Cina ke Sudan. Meski transfer senjata Cina ke Sudan

meningkat lalu kemudian menurun, hal ini tidak berdampak pada keuntungan ekonomi yang didapatkan, selain karena pasar persenjataan Sudan tetap didominasi oleh Cina, hal ini juga disebabkan oleh variabel-variabel lain yang diusahakan untuk mendukung peningkatan ekspor minyak Sudan ke Cina. Selain itu, transfer senjata yang menurun, dapat digunakan untuk menekan pemerintah Sudan agar bertindak sesuai dengan keinginan Cina. Dengan demikian, tidak ada pola dan hubungan antara keamanan dan stabilitas Sudan serta pengaruh dan kemampuan mempengaruhi Cina terhadap Sudan dengan besar-kecilnya transfer senjata. Kepentingan utama Cina di Sudan adalah minyak dan kepentingan ini telah mendikte transfer senjata Cina ke Sudan dan mengharuskan Cina untuk dapat memberikan pengaruh dan kemampuan mempengaruhi serta keamanan dan stabilitas bagi Sudan. Oleh karenanya, teori *uncertain rationales for arms sales* kurang dapat menjelaskan secara pasti mengenai alasan peningkatan dan penurunan transfer senjata oleh suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Byman, Daniel dan Roger Cliff. (1999). *China's Arms Sales: Motivations and Implications*. Washington: RAND.
- Eikenberry, Karl W. (1995). *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*, Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies, National Defense University
- Flint, Julie dan Alex de Waal. (2005). *Darfur: A Short History of a Long War*. New York: Zed Books.
- Leonard, Thomas M. (2006). *Encyclopedia of the Developing World*. New York: Routledge.
- Pierre, Andrew J. (1997). *Cascade of Arms: Managing Conventional Weapons Proliferation*. Cambridge: The World Peace Foundation.
- Pierre, Andrew J. (1982). *The Global Politics of Arms Sales*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ra'anan, Uri, Robert L. Pfaltzgraff, Jr., dan Geoffrey Kemp (Eds.). (1978). *Arms Transfer to the Third World: the Military Buildup in Less Industrial Countries*. Colorado: Westview Press.
- Zisk, Betty H. (1981). *Political Research: A Methodological Sampler*. Lexington: DC Heath and Company.

### Sumber Jurnal Ilmiah

- Ahlbrandt, Stephanie Kleine dan Andrew Small. (2008) "China's New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting with Pariahs?". *Foreign Affairs*.
- Bitzinger, Richard A. (1992). "Arms to Go: Chinese Arms Sales to the Third World". *International Security*, Vol. 17, No. 2.
- Gelb, Leslie H. (1976-1977). "Arms Sales". *Foreign Policy*, No. 25.
- Gill, Bates and Evan S. Medeiros. "Foreign and Domestic Influences on China's Arms Control and Nonproliferation Policies". *The China Quarterly*, No. 161.

- Hilsum, Lindsey. (2005). "Re-enter the Dragon: China's New Mission in Africa". *Review of African Political Economy*, Vol.32, No.104/105
- Hyer, Eric. (1992). "China's Arms Merchants: Profit in Command". *The China Quarterly*, No.132.
- Keller, William W. dan Janne E. Nolan. (1997-1998). "The Arms Trade: Business As Usual?". *Foreign Policy*, No. 109.
- Kinsella, David. (1998). "Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict". *Journal of Peace Research*, Vol. 35, No. 1.
- Meek, Sarah. (2000). "Combating Arms-trafficking: The Need for Integrated Approaches". *African Security Review*, Vol 9 No. 4.
- Morrison, J. Stephen. (2008). "Will Darfur Steal the Olympic Spotlight?". *The Washington Quarterly*.
- Payne, Richard J. dan Cassandra R. Veney. (1998). "China's Post-Cold War African Policy". *Asian Survey*, Vol. 38, No. 9
- Pierre, Andrew J. (1981). "Arms Sales: The New Diplomacy". *Foreign Affairs*, Vol.60, No.2.
- Sachar, B.S. (2004). "Military Diplomacy through Arms Transfers: A Case Study of China". *Strategic Analysis*, 28:2.
- Sislin, John. (1994). "Arms as Influence: The Determinants of Successful Influence". *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.38, No.4.
- Survey, Small Arms. (2007). "Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan". *Sudan Issue Brief*, No.7.
- Survey, Small Arms. (2007). "The Militarization of Sudan: A Preliminary Review of Arms Flows and Holdings". *Sudan Issue Brief*, No.6.
- Taylor, Ian. (2007). "Arms Sales to Africa: Beijing's Reputation at Risk". *China Brief*, Vol. 7, No.7.
- Tinsley, Rebecca. (2009). "Breath of the Dragon". *New Internationalist*.
- Tull, Denis M. (2006). "China's Engagement in Africa: Scope, Significance and Consequences". *Journal of Modern African Studies*, Vol. 44, No. 3.

Yu, George T. (1977). "China's Role in Africa". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 432.

Zweig, David dan Bi Jianhai. (2005). "China's Global Hunt for Energy". *Foreign Affairs*, Vol. 84, No.5.

### **Dokumen Resmi**

*UN Security Council Resolution 1591*, 29 Maret 2005.

### **Sumber Artikel Internet**

\_\_\_\_\_. "Arms and Conflict in Africa". diakses dari  
[www.state.gov/s/inr/rls/fs/2001/4004.htm](http://www.state.gov/s/inr/rls/fs/2001/4004.htm).

\_\_\_\_\_. "Arms Trade". diakses dari  
<http://www.cdi.org/program/index.cfm?ProgramID=73>

\_\_\_\_\_. "Arms Transfers to the Government of Sudan". diakses dari  
<http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-05.htm>

\_\_\_\_\_. "China and Conventional Weapons Nonproliferation". diakses dari  
[www.nti.org/db/china/conpos.htm](http://www.nti.org/db/china/conpos.htm)

\_\_\_\_\_. "China Defends Arms Sales to Sudan". diakses dari  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7258059.stm>

\_\_\_\_\_. "China in Sudan: Having It Both Ways", diakses dari  
[http://www.savedarfur.org/pages/policy\\_paper/briefing\\_paper\\_china\\_in\\_sudan\\_having\\_it\\_both\\_ways/](http://www.savedarfur.org/pages/policy_paper/briefing_paper_china_in_sudan_having_it_both_ways/)

\_\_\_\_\_. "China's Oil Rush in Africa". diakses dari [www.iags.org/chinainafrika.pdf](http://www.iags.org/chinainafrika.pdf)

\_\_\_\_\_. "China-Sudan Briefing Paper". diakses dari  
[www.darfuraustralia.org/files/China\\_briefing\\_paper.pdf](http://www.darfuraustralia.org/files/China_briefing_paper.pdf)

\_\_\_\_\_. "Darfur Peace Agreement, 2006". diakses dari  
[http://www.cfr.org/publication/11020/darfur\\_peace\\_agreement\\_2006.html](http://www.cfr.org/publication/11020/darfur_peace_agreement_2006.html)

\_\_\_\_\_. "Eritrea, Chad Accused of Aiding Sudan Rebels". diakses dari  
<http://www.afrol.com/articles/13898>

\_\_\_\_\_. "Made in China: China's Arms Sales to Sudan". diakses dari

- [www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=45](http://www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=45)
- \_\_\_\_\_. "Stopping the Flow of Arms to Sudan: China's Arms Transfers and the Need to Expand the Arms Embargo". diakses dari [www.ajws.org/emergencies/darfur/.../china\\_arms\\_brief\\_9-08-08.pdf](http://www.ajws.org/emergencies/darfur/.../china_arms_brief_9-08-08.pdf).
- \_\_\_\_\_. "Sudan: Chinese Companies Among Bidders for Juba-Lamu Oil Pipeline", diakses dari <http://allafrica.com/stories/201010220924.html>
- \_\_\_\_\_. "Sudan Now Africa's Third Largest Oil Producer", diakses dari <http://www.afrol.com/articles/21889>
- \_\_\_\_\_. "UN Security Council Resolution 1556 on the Situation in Sudan", diakses dari [http://www.fcni.org/issues/item.php?item\\_id=992&issue\\_id=104](http://www.fcni.org/issues/item.php?item_id=992&issue_id=104)
- \_\_\_\_\_. "UNAMID". diakses dari [http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84&Itemid=105](http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=105)
- Action, Africa. "The UN Security Council and the Darfur Crisis: A Country-by-Country Analysis". diakses dari [www.africaaction.org/resources/docs/SCAnalysis0610.pdf](http://www.africaaction.org/resources/docs/SCAnalysis0610.pdf)
- Blank, Meredith Lauren. "Hugging with Tactical Arms: What Motivates China to Export Weapons?". diakses dari [http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank\\_meredith\\_2009.pdf](http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/63929/1/blank_meredith_2009.pdf).
- Chang, Andrei. "China Sells Arms to Sudan". diakses dari [http://www.upi.com/Business\\_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/](http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2008/02/15/Analysis-China-sells-arms-to-Sudan/UPI-75301203098635/)
- Chang, Andrei. "China Ships More Advanced Weapons to Sudan". diakses dari [http://www.upiasia.com/Security/2008/03/28/china\\_ships\\_more\\_advanced\\_weapons\\_to\\_sudan/6836/](http://www.upiasia.com/Security/2008/03/28/china_ships_more_advanced_weapons_to_sudan/6836/)
- Che, Kevin Ngang "Small Arms and Light Weapons, Africa's True WMDs: The Role of SALW in Conflict and Insecurity in Sub-Saharan Africa". diakses dari [www.aspr.ac.at/epr/research/Che.pdf](http://www.aspr.ac.at/epr/research/Che.pdf)
- Council, United Nations Security. "Resolution 1828 (2008)". diakses dari

- [www.eed.de/fix/files/doc/08-07-31\\_unsc-res-1828-2008-or.pdf](http://www.eed.de/fix/files/doc/08-07-31_unsc-res-1828-2008-or.pdf)
- Council, United Nations Security. "S/2006/65". diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/files/UN%20Panel%20of%20experts%20jan%2030.06.pdf>
- Council, United Nations Security. "Security Council Decides to Extend Mandate of African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur". diakses dari <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-7H4KDA?OpenDocument>
- Council, United Nations Security. "Security Council Endorses African Union Decision on Need for Concrete Steps in Transition to United Nations Operation in Darfur". diakses dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8721.doc.htm>
- Dagne, Ted. "Sudan: The Crisis in Darfur and Status of the North-South Peace Agreement". diakses dari [www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf)
- Ekengard, Arvid. "The African Union Mission in Sudan (AMIS): Experiences and Lessons Learned". diakses dari [www.foi.se/upload/projects/Africa/foir2559.pdf](http://www.foi.se/upload/projects/Africa/foir2559.pdf)
- Farley, Maggie. "Security Council Votes to Provide Aid after End to Sudan Civil War". diakses dari [http://www.publicinternationallaw.org/docs/PNW4/PNW.22Nov\\_04.html#Sudan](http://www.publicinternationallaw.org/docs/PNW4/PNW.22Nov_04.html#Sudan)
- Farley, Maggie. "U.N. Aims to Hasten Dispatch Troops to Darfur". diakses dari <http://articles.latimes.com/2006/may/17/world/fg-darfur17>
- Feinstein, Lee. "China and Sudan", diakses dari [http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/2007/04/24/china\\_and\\_sudan/](http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/2007/04/24/china_and_sudan/)
- First, Human Rights. "A Three-Step Guide to Strengthening the Darfur Arms Embargo: Targeting the Arms Supply Chain". diakses dari [www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/pdf/cah-081010-strength-embargo.pdf)

- First, Human Right. "Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan". diakses dari <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>
- First, Human Rights. "Letter to Ambassador Guangya", diakses dari [www.humanrightsfirst.org/pdf/071205-ij-hrf-ltr-china.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/pdf/071205-ij-hrf-ltr-china.pdf)
- First, Human Rights. "The Facts: China's Arms Sales to Sudan". diakses dari [www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=22](http://www.stoparmstosudan.org/pages.asp?id=22)
- First, Human Rights. "Written Submission to the United Nations Security Council", diakses dari <http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/081212-HRF-final-sanc-comm-briefing.pdf>.
- Flint, Julie. "Beyond 'Janjaweed': Understanding the Militias of Darfur". diakses dari [http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan\\_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf)
- Flint, Julie. "Rhetoric and Reality: The Failure to Resolve the Darfur Conflict". diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-19-The-Failure-to-Resolve-the%20Darfur-Conflict.pdf>
- Grimmett, Richard F. "Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005". diakses dari [www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf)
- Group, International Crisis. "Darfur's New Security Reality". diakses dari [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/Darfurs%20New%20Security%20Reality.ashx](http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/Darfurs%20New%20Security%20Reality.ashx)
- Gunness, Kristen. "China's Military Diplomacy in an Era of Change". diakses dari <http://www.ndu.edu/inss/symposia/pacific2006/gunnesspaper.pdf>
- Hanson, Stephanie. "China, Africa, and Oil". diakses dari [http://www.cfr.org/publication/9557/china\\_africa\\_and\\_oil.html](http://www.cfr.org/publication/9557/china_africa_and_oil.html)
- Hartung, William D. "Deadly Traffic: China's Arms Trade with the Sudan". diakses dari [www.newamerica.net/.../deadly\\_traffic\\_chinas\\_arms\\_trade\\_sudan](http://www.newamerica.net/.../deadly_traffic_chinas_arms_trade_sudan)
- Herbst, Moira. "Oil for China, Guns for Darfur", diakses dari [http://www.businessweek.com/globalbiz/content/mar2008/gb20080314\\_430126.htm](http://www.businessweek.com/globalbiz/content/mar2008/gb20080314_430126.htm)

- International, Amnesty. "Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur". diakses dari <http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR541392004>
- International, Amnesty . "Blood at the Crossroads: Making the case for a global Arms Trade Treaty". diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/011/2008/en/19ea0e74-8329-11dd-8e5e-43ea85d15a69/act300112008en.pdf>
- International, Amnesty. "China: Sustaining conflict and human right abuses: The flow of arms continues". diakses dari [www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/030/2006](http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/030/2006)
- International, Amnesty. "Sudan – Amnesty International Report 2007", diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2007](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2007)
- International, Amnesty. "Sudan – Amnesty International Report 2008". diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2008](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2008)
- International, Amnesty. "Sudan – Amnesty International Report 2009", diakses dari [www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2009](http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2009)
- International, Amnesty. "Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur". diakses dari <http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGAFR540192007&lang=e>.
- International, Amnesty. "Sudan/China: Appeal by Amnesty International to the Chinese government to the occasion of the China-Africa Summit for Development and Cooperation". diakses dari [www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006](http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/072/2006)
- International, Amnesty. "Sudan Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur", diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/139/2004>.
- International, United Press. "US says Darfur Violence as Genocide", diakses dari [www.highbeam.com/doc/1P1-98844354.html](http://www.highbeam.com/doc/1P1-98844354.html)
- Kahn, Clea. "Conflict, Arms, and Militarization: The Dynamics of Darfur's IDP Camps". diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-15-Conflict-Arms-Militarization.pdf>
- Knight, Sam. "China Denies Selling Weapons for Use in Darfur". diakses dari

- [www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article1762733.ece](http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article1762733.ece)
- Lewis, Mike. "Skirting the Law: Sudan's Post-CPA Arms Flows". diakses dari [http://www.humansecuritygateway.com/documents/SAS\\_SudansPostCPAArmsFlows.pdf](http://www.humansecuritygateway.com/documents/SAS_SudansPostCPAArmsFlows.pdf)
- Luard, Tim. "Buyers Line Up for China's Arms". diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5086416.stm>
- Lyman, Princeton. "China's Rising Role in Africa". diakses dari [http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/written\\_testimonies/05\\_07\\_21\\_22wrts/lyman\\_princeton\\_wrts.pdf](http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/written_testimonies/05_07_21_22wrts/lyman_princeton_wrts.pdf) pada
- Markowski, Stefan dan Peter Hall. "Real Weapons of Mass Destruction: Proliferation of Small Arms and Light Weapons in Developing Countries". diakses dari [www.unsw.adfa.edu.au/sbus/research/Small%20Arms.pdf](http://www.unsw.adfa.edu.au/sbus/research/Small%20Arms.pdf).
- McEvoy, Claire. "Powder Keg: Unfettered Arms Flows Reflect Sudan's Instability". diakses dari <http://odin.riresearch.net:42086/@api/deki/files/256/=HSBA-2009-JIR12-Unfettered-arms-flows-reflect-Sudan-instability.pdf>
- Medeiros, Evan S. dan Bates Gill. "Chinese Arms Exports: Policy, Players, and Process". diakses dari [www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm](http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm)
- Meulen, Emma van der dan Frans-Paul van der Putten, "Great Powers and International Conflict Management: European and Chinese Involvement in the Darfur and Iran Crises". diakses dari [http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090225\\_cscp\\_sec\\_paper\\_great\\_powers.pdf](http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090225_cscp_sec_paper_great_powers.pdf)
- Ofodile, Dr. Uche. "Trade, Aid and Human Rights: China's Africa Policy in Perspective". diakses dari [www.jiclt.com/index.php/jiclt/article/download/73/72](http://www.jiclt.com/index.php/jiclt/article/download/73/72)
- Pan, Esther. "China, Africa, and Oil", diakses dari [http://www.nytimes.com/cfr/international/slot2\\_011806.html](http://www.nytimes.com/cfr/international/slot2_011806.html)
- Paterno, Steve. "China interference and influence in Sudan". diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article30707>

- Pham, J. Peter Ph.D. “Khartoum’s Partners in Beijing”. diakses dari [www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml](http://www.worlddefensereview.com/pham013108.shtml)
- Reeves, Eric. “China, Darfur, and the Olympics: Tarnishing the Torch?”, diakses dari <http://www.dreamfordarfur.org/Portals/0/Uploads/Documents/TarnishingTheTorchFINAL.pdf>
- Reeves, Eric. “China’s Propaganda Campaign Can’t Obscure Complicity in Darfur Genocide”. diakses dari <http://mx.sudantribune.com/spip.php?article26260>
- Reeves, Eric. “Quantifying Genocide in Darfur: May 13, 2006 (Part 2)”. diakses dari [www.sudanreeves.org/Article104.html](http://www.sudanreeves.org/Article104.html)
- Reuters. “U.N. delays Sudan sanctions by three months”. diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article10526>
- SIPRI, “Types of Weapons”, diakses dari [http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/data\\_on\\_inter\\_arms\\_trade\\_default/background/coverage/coverage\\_default?searchterm=conventional+ar](http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/data_on_inter_arms_trade_default/background/coverage/coverage_default?searchterm=conventional+ar)
- Survey, Small Arms. “Arms, Oil, and Darfur: The Evolution of Relations between China and Sudan”, diakses dari [www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-7-Arms.pdf](http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-7-Arms.pdf).
- Survey, Small Arms. “Supply and Demand: Arms Flows and Holdings in Sudan”. diakses dari <http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SIB-15-arms-flows-and-holdings-in-Sudan.pdf>
- Teitt, Sarah. “China and Responsibility to Protect”. diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/172-asia-pacific/2053-the-asiapacific-centre-for-the-responsibility-to-protectchina-and-the-responsibility-to-protect>
- UNOCHA, “Sudan-Darfur Humanitarian Profile –June 2, 2008”. diakses dari <http://www.unsudanig.org/library/mapcatalogue/darfur/data/dhnp/Map%201226%20Darfur%20Humanitarian%20Profile%20June%203%202008.pdf>
- Watch, Human Rights. “Imperatives for Immediate Change The African Union Mission in Sudan”. diakses dari <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/37-the-crisis-in->

[darfur/508-human-rights-watch-sudan-imperatives-for-immediate-change-the-african-union-mission-in-sudan.](#)

Wezeman, Pieter D. "Arms Transfers to East and Southern Africa". diakses dari [http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/publications/other\\_sipri\\_public](http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/publications/other_sipri_public)

Ziada, Ismail S.H. "Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations". diakses dari [www.kanaanonline.org/articles/01042.pdf](http://www.kanaanonline.org/articles/01042.pdf)

Zygar, Mikhail. "Behind the U.N. Security Council Resolution: Chinese, Russian and Indian Oil interests in the Sudan". diakses dari <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=612>

